



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI  
DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Raker  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Waktu : Pukul 13.30 s.d. 18.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022  
2. Membahas Program Kerjan Tahun 2023  
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
43 dari 56 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
11 dari 12 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.  
5. Sukur H. Nababan, S.T.  
6. Ir. Sudjadi  
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
8. Sri Rahayu  
9. Ir. Effendi Sianipar  
10. Harvey B. Malaihollo  
11. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
6 dari 8 orang Anggota  
1. Drs. Hamka B Kady, M.S.  
2. Cen Sui Lan  
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.  
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

5. Muhammad Fauzi, S.E.
  6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
6 dari 7 orang Anggota
    1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
    2. Ir. Sumail Abdullah
    3. Sudewo, S.T., M.T.
    4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
    5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
    6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
4 dari 6 orang Anggota
    1. Roberth Rouw
    2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
    3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
    4. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)  
4 dari 6 orang Anggota
    1. H. Ruslan M. Daud
    2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
    3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
    4. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
3 dari 5 orang Anggota
    1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
    2. Willem Wandik
    3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)  
3 dari 5 orang Anggota
    1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
    2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
    3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)  
5 dari 5 orang Anggota
    1. H.A. Bakri H. M., S.E.
    2. Athari Ghauthi Ardi
    3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
    4. H. Boyman Harun, S.H.

5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri PUPR RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki  
Hadimoeljono, M.Sc.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT / F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta  
seluruh jajarannya, dan  
Hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada rapat siang hari ini, ya, yang semula kita jadwalkan jam 10 terus karena Pak Menteri ada kegiatan dengan Presiden, kita mundurkan jam 1 dan sekarang kita sudah terlambat pukul 13.30.

Bapak-Ibu sekalian, rapat ini masih dihadiri baik fisik maupun virtual dan menurut data dari Sekretariat Komisi sudah hadir 35 Anggota, 20 orang hadir secara fisik dan 15 hadir secara virtual. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini, demikian juga kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI.

Agenda kita hari ini ada pembahasan program kerja Kementerian PUPR Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Pak Menteri, dan seluruh jajaran, hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a, disebutkan bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Oleh karena itu, pada hari ini Komisi V DPR RI perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kegiatan Kementerian PUPR pada Tahun 2022 dan juga pembahasan terhadap Program Kerja Tahun 2023.

Untuk agenda pertama terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022, Komisi V DPR RI mendapatkan penjelasan dari Menteri PUPR bagaimana hasil akhir pencapaian Realisasi Anggaran Kementerian PUPR sesuai sasaran, dan, sesuai saran dan masukan Komisi V DPR pada rapat-rapat terdahulu.

Kemudian, adapun terkait dengan agenda kedua yaitu pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2023 perlu kami sampaikan bahwa Pagu Anggaran Kementerian PUPR dalam tahun, pada Tahun 2023 adalah sebesar 125,22 triliun, dengan anggaran yang ada ini kami ingin mengetahui bagaimana anggaran itu direalisasikan sesuai rencana program yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal pada rapat-rapat terdahulu.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, ada beberapa hal yang ingin juga kita dalam ya, pada hari ini.

1. Kementerian PUPR perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan seluruh bangunan infrastruktur di daerah yang terkena bencana dalam rangka mendukung konektivitas dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Mengintensifkan dan memperluas pelaksanaan Program Padat Karya di berbagai daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja
3. Mempercepat pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023, antara lain dengan melaksanakan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual secara transparan dan akuntabel.

**Hadirin yang berbahagia,  
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,  
Pak Menteri PU dan seluruh jajaran yang kami hormati,**

Demikian pengantar rapat kita pada hari ini, yaitu ada dua agenda utama kita adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2022
2. Persiapan pelaksanaan APBN Tahun 2023

Sekarang kita sudah memasuki bulan Januari, kami juga mendapat informasi bahwa beberapa kegiatan sudah dilakukan lelang dini oleh Kementerian PUPR dalam rangka mengejar percepatan serapan anggaran untuk Tahun 2023.

Demikian barangkali pengantar rapat pada hari ini, kami beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparan terkait dengan agenda kita pada hari ini saya persilakan.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak Ketua,  
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dan  
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,**

Pertama-tama terima kasih atas, dan penghargaan kami keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pelaksanaan rapat kerja pada hari ini yang dua kali tertunda jam 10.00, jam 1.00, sehingga akhirnya baru terlaksana jam 1.30. Baru kali ini kami tadi acara presentasi para menteri di depan Rakornas para kepala daerah seluruh Indonesia ditungguin langsung oleh Bapak Presiden, jadi kami tidak bisa meninggalkan tempat sebelum selesai presentasinya. Kami sendiri presentasi bersama Pak Menhub, Pak Menteri ATR, dan Menteri PAN RB, Menteri Keuangan, menteri, beberapa menteri lainnya, Kepala BPS, dan Gubernur BI, ditungguin langsung oleh Bapak Presiden. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perkenan Bapak-Ibu sekalian, mengundur Raker ini pada jam 1.30 ini.

Izinkan kami melaporkan sesuai dengan undangan untuk Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Rencana Program Kerja Tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menindaklanjuti laporan kami sebelumnya pada Rapat-rapat Kerja Komisi V DPR RI pada tanggal 25 Agustus 2022 dan 28 November 2022 tentang APBN Kementerian PUPR, bersama ini izinkan kami melaporkan agak detail ini Bapak, karena ini adalah laporan pelaksanaan jadi mudah-mudahan apa yang kami laporkan nanti lebih menjelaskan tentang capaian Tahun 2022 ini sesuai dengan pengawasan, sebagai hasil pengawasan Komisi V DPR RI.

Pertama, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 terakhir adalah 125,99 triliun dengan realisasi keuangan sebesar 118,03 triliun atau 93,7% dengan realisasi fisik sebesar 96,2% yang secara garis besar Anggaran Tahun 2022 yang tidak terserap adalah 7,96 triliun, yang terdiri atas dana diblokir 0,53 triliun atau 530 miliar, sisa lelang sebesar 620 miliar, sisa belanja pegawai 130 miliar, dan sisa pengadaan tanah 490 miliar, serta kegiatan hutang luar negeri sebesar 3,18 triliun, kegiatan SBSN sebesar 2,56 triliun, dan BLU Ditjen Pemeliharaan Infrastruktur sebesar 2 miliar, serta kegiatan yang tidak terlaksana lainnya yang diluncurkan ke Tahun 2023 sebesar 430 miliar.

Pada Tahun 2022, Kementerian PUPR melaksanakan Rencana Aksi Afirmatif Bangga Buatan Indonesia, yaitu belanja produk dalam negeri dengan

paket TKDN lebih dari 25%, yakni Pagu belanja produk dalam negeri sebesar 102,9 triliun atau sebesar 97,86% dari Pagu belanja barang dan modal dengan realisasi sebesar 96,3 triliun atau 93,55%, ini adalah belanja produk dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pagu Anggaran 2022 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional, antara lain melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program strategis nasional seperti bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum, dan program satu juta rumah pada Tahun 2022.

Dua, melaksanakan penugasan khusus berdasarkan Perpres Nomor 116 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk membangun infrastruktur dengan rincian kegiatan yaitu mendukung presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, renovasi Taman Mini Indonesia Indah, penataan kawasan Labuan Bajo termasuk pulau Rinca yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang untuk menyambut ASEAN Summit 2023. ASEAN Summit 2023 telah diputuskan dalam sidang kabinet akan dilaksanakan di Labuan Bajo pada bulan Mei 2023, sedangkan ASEAN Summit Plus akan dilaksanakan di Jakarta di Gedung JCC Jakarta pada bulan September 2023.

Empat, penataan kawasan Mandalika yang juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata telah menjadi faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan *event* MotoGP 2022.

Selanjutnya, melaksanakan program padat karya tunai, seperti yang disampaikan dalam kesimpulan rapat sebelumnya, untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah dengan rencana anggaran 14,92 triliun, serta target tenaga kerja sebanyak 797.000 orang. Realisasi yang dicapai sebesar 14,54 triliun atau 97% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1,07 juta orang atau 1.700.000 orang, yaitu 135%.

Dan, melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain bencana gempa bumi Palu, yaitu pembangunan hunian tetap sebanyak 5.732 unit di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Rehabilitasi 57 sekolah, rekonstruksi Universitas Tadulako, 25 gedung rumah sakit, serta rehabilitasi dan rekonstruksi gedung pemerintahan.

Rehabilitasi bendung dan saluran irigasi daerah Gumbasa Tahap 1 yang mampu mengairi area pertanian seluas 1.070 hektar, penggantian dan rehabilitasi jembatan di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan jembatan Huntap Tondo Talise, serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan Tompe-Palolo sepanjang 97,4 km.

Kedua, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, yaitu pembangunan hunian tetap sebanyak 1.951 unit yang telah selesai pada tanggal 31 Mei 2022 dan telah dihuni oleh para penggunanya. Dan, pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang telah selesai pada Juni 2022.

Yang ketiga, dalam rangka rekonstruksi bencana alam, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Seroja, berupa pembangunan hunian tetap sebanyak 1.922 di NTT dan sebanyak 292 unit di NTB yang baru-baru ini diresmikan oleh Bapak Presiden di Bima.

Kemudian bencana gempa Cianjur, yang sekarang sedang dilaksanakan berupa pembukaan jalan akses Cipanas-Cianjur ini sudah selesai dan sudah berfungsi sejak 22 November dan Jalan Mangun Kerta Kecamatan Cugenang yang sudah tembus sejak tanggal 24 November.

Kemudian pengiriman 314 insinyur muda PUPR, juga alat berat sebanyak 12 unit, *ekskavator, loader, truck, arm roll, dan dump truk*, dan sarana prasarana tanggap darurat, antara lain 10 unit tangki air, 1 *vacum tinja*, 1 instalasi pengolahan air, 130 unit hidran umum, 86 unit portable toilet, 40 bak sampah besar, 8 *septic tank*, 7 unit genset, 14 unit tenda kecil, dan 2 unit tenda besar.

Kami ingin menyampaikan bahwa 314 insinyur muda kita kirim memang untuk mendampingi para masyarakat yang ingin membangun rumahnya yang mendapat bantuan untuk rumah berat sebanyak 60 juta per rumah, dengan rumah tahan gempa yang dilaksanakan oleh BNPB, kemudian didampingi oleh para *engineer* muda PUPR, seperti halnya yang telah kita lakukan di NTB dulu.

Kemudian pemasangan panel RISHA sebanyak 115 dari 200 unit rencana pembangunan, ini yang untuk relokasi. Jadi, PUPR sendiri membangun rumah RISHA sebanyak 200 unit rumah yang ada di dua lokasi, sedangkan yang dibangun sendiri oleh masyarakat tadi yang didampingi oleh para *engineer* muda kita.

Selanjutnya, PUPR Tahun 2022 melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, antara lain di Kawasan Industri Terpadu Batang berupa pembangunan jalan, jembatan, air baku, drainase, pengolahan air limbah, dan persampahan, jaringan perpipaan air minum dari rumah pekerja. Ini yang pernah kami laporkan lebih dulu, terdahulu bahwa ini merupakan pendekatan baru dalam pengembangan kawasan industri, bukankah KEK tapi ini adalah kawasan industri terpadu, sehingga konsepnya investor hanya membawa anggaran dan teknologi. Semuanya sisanya dikerjakan, disiapkan oleh pemerintah, baik tanah, prasarana, perizinan semua oleh Kementerian Investasi.

Yang selanjutnya adalah memulai kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya 25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR Tahun 2022. Hingga

minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar 15,8 triliun dan pada akhir Desember terkontrak 16 kegiatan sebesar 8,89 triliun. Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulangi atau harus melakukan lelang ulang pada Tahun 2023 ini.

Selanjutnya, kegiatan pada Tahun 2023 adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan di Kupang. Sebagian dari yang di Manado besok hari Rabu, hari Kamis akan diresmikan oleh Bapak Presiden, yaitu Bendungan Kuwil, kemudian penataan Kota Malalayang di Manado, dan penataan kawasan Bunaken.

Selanjutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan *food estate* dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua dengan rincian sebagai berikut. *Food estate* di Kalimantan Tengah dengan komoditas padi atau tanaman pangan, luas potensial di lokasi eks PLG sebesar 43.500 hektar dengan fokus penanganan di blok a, 29.280 hektar. Tahun 2021, 2022 telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan sistem tata air mikro dengan rincian kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa blok a sepanjang 2.195 km, baik primer, sekunder, ataupun saluran tersiernya. Kemudian, pembangunan 166 pintu air, jembatan blok a, 18 sumur air tanah, pembangunan dan rehabilitasi pintu air daerah irigasi rawa Dadahup Tahap 2. Pada Tahun 2022 juga telah dilaksanakan peningkatan jalan sepanjang 77,30 km dan jembatan sepanjang 230 meter.

Yang kedua, di Dadahup ini progres tanamnya di blok a, yaitu blok a 1 dan 2 seluas 8.458 hektar. Sedangkan di Dadahup seluas 658 hektar yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Kemarin ada 6 hektar yang sudah dipanen dengan hasil cukup baik, yaitu 4,58 ton per hektar di demplot padi di sana. Ini akan nanti akan ada lagi proses panen mungkin pada bulan-bulan Februari.

Kemudian, untuk *food estate* Sumatera Utara untuk pengembangan hortikultura, komunitas bawang merah, bawang putih, dan kentang, luas yang sudah dilakukan penanganan 1.000 hektar dengan luas efektif yang akan dikelola 748 hektar. Tahun 2021, 2022, telah dilaksanakan pembangunan irigasi tetes (*drip irrigation*) seluas 143 hektar di blok b, Desa Ria-Ria dan yang sudah ditanami seluas 17 hektar untuk budidaya bawang merah.

Selain itu, pembangunan jalan akses TSTH sepanjang 14,3 km dan jalan akses *food estate* 8,6 km dan 2 jembatan. *Land clearing* di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) seluas 72 hektar dari rencana 200 hektar. Serta pembangunan fasilitas TSTH, antara lain gedung riset, mess karyawan, dan infrastruktur kawasan, dan progresnya sekarang 82,4% dan target selesai pada bulan April 2023 ini diharapkan menjadi pusat teknologi herbal untuk tanaman hortikultura.

Yang ketiga, *food estate* di Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan sorgum, tanaman pangan, dan tersebar di tiga lokasi. Kabupaten Belu dengan



komoditas sorgum, jagung, tomat, kacang hijau. Luas potensial 365 hektar dan seluruhnya telah dilayani dengan irigasi *sprinkler* dan sudah ditanami 43 hektar yang untuk sorgum dan jagung. Tahun 2021 telah dibangun jaringan irigasi 135 hektar dari bendungan rotiklot, haliwen, haekrit, dan 23 unit sumur jaringan irigasi air tanah.

Ibu-Bapak sekalian, ini kalau kita *nggak* memanfaatkan ini memang sebelumnya daerah yang sangat kering, jadi ini harus diulang-ulang, ini merupakan hasil budidaya jadi *nggak* bisa sekaligus. Ini pada saat pertama kali *ngajak* petani nyangkul itu bukan mudah. Jadi, kita harus, tanahnya sangat keras karena memang baru pertama kali akan dijadikan daerah irigasi, daerah tanaman untuk yang hortikultura. Jadi, ini kita harus memang harus sabar, tapi sekarang ini sudah dua, tiga kali saya kira tanahnya sudah lebih gembur dan masyarakatnya sudah mulai semangat untuk menanam.

Kemudian, Kabupaten Sumba Tengah luas potensial 6.100 dengan prioritas penanaman pada DI Waibakul, DI Waikabeti, dan DI Waipidi, serta DI Lokojange yang bersumber dari tujuh embung dengan luas layanan 960 hektar dan 30 sumur bor dengan luas layanan 180 hektar. Pada Tahun 2021, 2022 telah dilaksanakan dan diselesaikan peningkatan jaringan irigasi kiri embung Lokojange. Dan, Kabupaten Sumba Timur, luas potensialnya adalah 900 hektar di kecamatan Pandawai dan Kecamatan Umalulu untuk sorgum. Mulai Oktober 2022 telah ditanam seluas 10 hektar di Laipori Kecamatan Pandawai bekerja sama dengan P3H kelompok tani. Sumber air berasal dari 50 titik sumur air tanah dangkal, dan 8 titik sumur bor di Kecamatan Pandawei 135 hektar dan Kecamatan Umalulu 500 hektar. Jadi, ini sumurnya sudah ada *eksisting*, tinggal kita kita memanfaatkan air saja, jadi ini memang pemanfaatan sumurnya.

Kemudian, yang keempat adalah *food estate* di Kabupaten Keerom di Papua, untuk komoditas khusus jagung. Luas potensial 10.000 hektar di mana 7.000 hektar merupakan areal APL dan sisanya 3.000 hektar merupakan areal *eks plasma* sawit di 7 kampung yang akan ditangani irigasinya. Pada Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan *land clearing* seluas 496 hektar, progresnya 67% dan pembangunan saluran irigasi seluas 3.000 hektar.

Secara keseluruhan pembangunan berbagai infrastruktur pada Tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut. Untuk infrastruktur sumber daya air pembangunan 34 bendungan di mana sebanyak 94, 9 bendungan telah selesai, antara lain Bendungan Beringin Sila di NTB, Semantok di Jatim, Ciawi, dan Sukamahi, serta Sadawarna di Jabar, dan Kuwil di Kawangkoan di Manado Sulawesi Utara. Sementara 24 bendungan lainnya masih dalam tahap konstruksi dan satu bendungan baru dimulai, yaitu Bendungan Mbay di Flores NTT. Yang Beringin Sila, Semantok, Ciawi, Sukamahi, dan Sadawarna baru saja diresmikan, nanti Kamis Kuwil Kawangkoan akan diresmikan oleh Bapak Presiden.

Dan, pembangunan bendungan juga diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi, antara lain di DI Slinga di Purbalingga, DI Jambo Aye di Aceh, Baliase di Sulawesi, Bendung Wanggar, dan rehabilitasi jaringan irigasi *eksisting* seluas 237.000 hektar di DI Komerling, DI Way Umpu, DI Way Rarem.

Lokasi *food estate* di Kalimantan Tengah, *food estate* Sumatera Utara, dan *food estate* di NTT. Selain itu dibangun 28 embung, antara lain Embung Sanur di Denpasar, Kandang Menjangan di Sukoharjo, dan Mentawir di IKN.

Kemudian, penyediaan air baku sebesar 2,86 meter kubik per detik, antara lain air baku di kawasan industri Batang, air baku Jonggol Kalapanunggal, dan air baku Intake Sepaku. Pembangunan pengamanan pantai dan pengendalian banjir sepanjang 157 km, antara lain sodetan Kali Ciliwung, pantai, nanti Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, Pantai KEK Tanjung Lesung, pengendalian banjir Kota Jambi, dan pengendalian banjir kawasan Mandalika.

Infrastuktur jalan dan jembatan telah dibangun 183 km jalan tol melalui skema investasi dan kerja sama pemerintah dan badan usaha, antara lain Cisumdawu. Mudah-mudahan Cisumdawu ini secara total dapat kita operasikan akhir Februari atau awal Maret. Mereka mintanya Maret tapi saya akan coba upayakan akhir Februari bisa dioperasikan secara tuntas. Dan, kalau Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi I, sudah, Menado-Bitung seksi IIB Danowudo selesai, Cibitung-Cilincing selesai, ini harus sudah selesai semua.

Dan, pembangunan 846 jalan baru, jalan Pansela Jawa, yaitu di Jateng, DIY, dan Jatim. Di Sideng seluas, Sekayang, Entikong (Kalbar), dan pembangunan jalan dukungan IKN di Kaltim. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 22,4 meter, antara jembatan Sei Wampu di Sumut, Ciloseh di Jabar, Sungai Ratah di Kaltim, dan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat.

Pembangunan *flyover*, *underpass*, terowongan telah selesai sepanjang 1.120 meter, yaitu *flyover* Kopo di Jabar dan sedang dalam tahap konstruksi sepanjang 1.840 meter, *flyover* Patih Galung di Sumatera Selatan, dan Sekip Ujung di Sumatera Selatan, dan Aloha di Jawa Timur Surabaya.

Dan, infrastruktur pemukiman telah dibangun 861,5 liter per detik sistem penyediaan air minum untuk sekitar 1 juta sambungan rumah, antara lain SPAM Huntap Tondo Talise Kota Palu, SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang, dan SPAM Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang.

Kemudian, penanganan sampah dengan penerima manfaat 549 ribu kepala keluarga, antara lain TPA Regional Piyungan, TPA Regional Mamitarang, dan TPA Kebon Kongok NTB. Penanganan kawasan kumuh seluas 911 hektar, antara lain kawasan Ilir Kota Palembang, Semanggi Utara Kota Solo, dan Puday Lapulu Kota Kendari.

Pengembangan PLBN terpadu, di mana 3 PLBN dalam tahap konstruksi dan 5 PLBN telah selesai, yaitu PLBN Serasan di Riau, Jagoi Babang Kalbar, Napan NTT, Yetetkun di Papua, dan Sei Pancang di Kalimantan Utara. Selanjutnya adalah pembangunan dan rehabilitasi 580 unit prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar, antara lain Universitas Islam International Indonesia, rehabilitasi bangunan pasar sentral Gorontalo, pasar Tumburuni di Papua, dan pembangunan *indoor multifunction stadium*.

Infrastruktur perumahan, yaitu pembangunan 3.988 unit rumah susun, 4.039 unit rumah khusus, dan 186.172 unit rumah swadaya dan 20.750 unit sarana prasarana dan utilitas PSO.

Ibu-Bapak sekalian, selanjutnya dari pembangunan berbagai infrastruktur tersebut sebagian di antaranya diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang di antaranya turut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Terima kasih untuk Bapak-bapak yang sempat hadir pada saat peresmian. Dan, infrastruktur yang diresmikan mencakup 7 bendungan, 7 embung, 1 prasarana air baku persemaian, 4 ruas jalan tol, 2 ruas jalan nasional, 2 jembatan panjang, 2 jembatan gantung, 1 SPAM, 6 penataan kawasan, 3 Pasar, 2 bangunan gedung, 3 sarana pendidikan, 2 TPA, 1 hunian tetap pasca bencana, dan 2 rusun.

Dari sisi tata kelola anggaran, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021, tanggal 27 Mei 2022, Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diserahkan oleh Anggota IV BPK RI pada tanggal 13 Juli 2022. Hal ini mencerminkan pelaksanaan sistem penilaian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup baik.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan, melalui pelatihan bela negara dan pelatihan dasar bagi 155 peserta CPNS yang kami lakukan di pusat pendidikan Kopassus di Kandang Menjangan Surakarta dan di Batujajar. Kemudian pelatihan pendampingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di Cianjur Tahap 1 Tahun 2022 bagi 208 orang, yang selanjutnya sekarang sudah ada di lapangan untuk mendampingi masyarakat. Tiga, pelatihan tehnik dan manajemen bagi 9.027 orang ASN. Empat, pendidikan magister super spesialis sebanyak 495 orang, S1-9 orang, dan D4 sebanyak 27 orang. Kemudian pendidikan D3 vokasi Politeknik sebanyak 635 orang di Semarang. Yang keenam, program pendidikan melalui beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Tahap 1 sebanyak 19 orang di dalam negeri dan tahap 2 sebanyak 52 orang, 34 di luar negeri, dan 21 dalam negeri.

Ibu-Bapak sekalian, khusus LPDP ini kami mempunyai program setiap tahun kalau bisa kami mengirim minimal 100 orang, sehingga harusnya kami menyiapkan minimal 200 orang untuk bisa berkompetisi di LPDP, biasanya 50% itu bisa lulus. Karena saya menganggap pendidikan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk pemimpin-pemimpin PUPR 10-15 tahun yang akan datang.

Yang kedelapan, dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi telah dilakukan pula pembinaan dan sertifikasi terhadap 70.026 orang yang terdiri dari 16.029 orang tenaga kerja konstruksi reguler, 44.905 tenaga konstruksi vokasi, dan 9.092 orang tenaga konstruksi khusus untuk mendukung IKN.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati,**

Selanjutnya izinkan saya melaporkan Program Kerja Tahun 2023 Kementerian PUPR, sebagai berikut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi memang kemarin pada Sidang Kabinet Paripurna, Bapak Presiden memfokuskan dua hal. Untuk menghadapi Tahun 2023 semua kementerian dan lembaga, pertama indikasinya Ibu Menteri Keuangan masih terdapat apa, penyerapan yang terbanyak ada di kuartal IV, jadi beliau minta Presiden minta semua kalau bisa digeser ke Kuartal I tapi *alhamdulillah* kita Kementerian PUPR masih disebut sebagai contoh *gitu*.

Kemudian yang kedua padat karya, padat karya beliau juga menyebutkan agar ini dipercepat pelaksanaannya untuk dapat sebagai bantalan bagiantisipasi PHK yang terjadi untuk kalau terjadi di 2023 nanti. Jadi, persis tadi apa yang disampaikan pada hasil rapat kerja sebelumnya padat karya dan tender dini.

**Ibu-Bapak sekalian yang kami yang kami hormati,**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2003 dan Perpres 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka telah ditetapkan RKP dengan tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam 7 prioritas nasional.

Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Secara garis besar Kementerian PUPR akan mendukung seluruh program prioritas nasional dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kewenangan.

Berdasarkan DIPA Tahun 2023 yang diserahkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Desember, Alokasi Anggaran Kementerian PUPR adalah sebesar 125,22 triliun, dengan postur anggaran sebagai berikut. Pertama, alokasi anggaran perjenis belanja terdiri dari belanja modal 84,25 triliun, belanja barang 38,05 triliun, dan belanja pegawai 2,92 triliun. Belanja pegawai ini kami tahan terus tidak akan lebih dari 3%.

Dua, belanja barang dan modal sebesar 122,3 triliun terdiri dari belanja non operasional sebesar 119,75 triliun dengan pelaksanaan melalui tender sebesar 89 triliun dan melalui nontender 30 triliun, termasuk untuk pembayaran tunggakan eskalasi P3AI OP irigasi, revitalisasi drainase, pembangunan sanitasi MCK, pompa, penanganan bencana, dan peningkatan kualitas rumah swadaya. Ini saya kira kebanyakan dari kegiatannya aspirasi Bapak-bapak.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui tender 89,11 triliun terdiri dari kegiatan *single years* 23,29 triliun dan *multi years* baru 14,89, dan *multi years* lanjutan 50,93 triliun. Biasanya yang lanjutannya tidak tender lagi Ibu-Bapak sekalian, sehingga yang tender itu hanya untuk yang *single years* dan yang *multi years* baru, 23 ditambah 14.

Dengan Pagu Anggaran sebesar 125,22 triliun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Bidang sumber daya air sebesar 41,95 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan 12 bendungan. Jadi, Ibu-Bapak sekalian, sebelum kami menyampaikan detailnya prioritasnya seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN dan perintah-perintah presiden yang kalau diupayakan pada Semester I 2024, semua sudah selesai. Jadi, pembangunan-pembangunan baru sangat selektif sekali dan sekali lagi hanya saya akan berani melaksanakan kalau itu perintah Bapak Presiden. Nanti semua kita lakukan, fokuskan untuk menyelesaikan semuanya.

Jadi, sekali lagi melanjutkan pembangunan 12 bendungan, jadi dari 61 akan sudah diselesaikan 38, tahun depan, tahun ini 2023 mungkin 12 bendungan ini harus sudah selesai, yaitu Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bener, Jragung di Jawa Tengah, Bagong di Jatim, Jenelata di Sulsel, Meninting di NTB, Maniken dan Bay di NTT, serta pembangunan 4 bendungan baru, yaitu Cibeet dan Cijurey untuk pengendalian banjir di daerah Karawang atau daerah Citarum Hilir di Kabupaten Bogor dan Jabar, Bendungan Cabean di Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Di mana 13 bendungan ditargetkan selesai Tahun 2023 ini.

Kemudian, pembangunan 6.900 hektar daerah irigasi, yaitu antara lain daerah irigasi Lematang, Slinga, masih harus diselesaikan, Baliase, Gilireng, dan Bintang Bano. Ini Gilireng dan Bintang Bano ini yang bendungannya baru saja juga selesai. Kemudian, membangun merehabilitasi 98.700 hektar irigasi di Komeriing, Lakbok Selatan di Jawa Barat, Logung di Jawa Tengah, Karang Talun di DIY, Mrican di Jatim, Saddang di Sulsel, dan Malunda di Sulawesi Barat.

Kemudian, pembangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai di sodetan Kali Ciliwung, Sungai Barabai di Kalimantan Selatan, Sungai Bogowonto, pengendalian banjir kawasan Tambak Lorok, Bendung Karet, Sungai Juana kita selesaikan, termasuk juga normalisasinya nanti, banjir Sangatta, pengamanan pantai Bengkulu Utara, pantai terluar Provinsi Kepulauan Riau, Pantai Cilacap, Kabupaten Sambas, Pantai Sausapor, dan Pantai Raja Ampat.

Kemudian, bidang jalan dan jembatan sebesar 49,31 triliun akan digunakan untuk satu pembangunan 444 km jalan baru, antara lain ruas jalan Geumpang-Pameu di Aceh, Lahewa Afulu-Batas Nias di Sumut, Teluk Tapang-Bunga Tanjung di Sumbar, Teluk Buton-Klarik Di Kepri, Tepus-Jeruk Wudel di DIY, Lingkar Tuban-Lingkar Utara Lamongan Jatim, Rasau-Jaya-Batas Negara

Kalbar, Malinau-Semanu Kaltara, Singaraja-Mengwitani Bali, Oenaek-Saenam-Numpo NTT, Baypass Mamminasata Sulsel, Way Hitam Oksibil Papua, PLBN Yetetkun, dan Lingkar Sorong di Papua Barat.

Dan, pembangunan 8.255 meter jembatan, antara lain jembatan Karang Tamiang Aceh, Karang Peudada Aceh, Cilangka Jember, GORR Segmen 1 Gorontalo, Ake Moloku Maluku Utara, Kampung Muri-Kwatisore Papua. Kemudian pembangunan 2.165 meter *flyover*, *underpass* Sekip Ujung Sumsel, Gelumbang Sumsel, dan Aloha meneruskan menyelesaikan Aloha di Jatim. Dan, pembangunan 6,5 km jalan tol di Serang-Panimbang dan Semarang-Demak.

Bidang permukiman sebesar 25,03 triliun digunakan untuk pembangunan peningkatan 2.206 liter per detik, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) IKK Lotu Nias Utara, SPAM mendukung Bakamla RI di Kota Batam, SPAM Tual kawasan Dulah Laut, SPAM Kopassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dukungan air minum penanganan pasca abrasi Pantai Amurang, SPAM regional Mebidang, SPAM regional Benteng Kobema, SPAM Wosusokas, SPAM Mamminasata, SPAM KIT Batang, Huntap Tondo, dan Duyu Kota Palu, SPAM Bendung Bintang Bano, dan IPA, serta jaringan perpipaan SPAM Sepaku mendukung IKN.

Sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, antara lain pembangunan Jakarta Sewerage System, Pekanbaru *Waste Water Treatment Plant*, perpipaan air limbah Kota Jambi-Area Barat, kemudian air limbah kota Palembang, air limbah Kota Makassar, IPAL KIT Batang, optimalisasi PLT Duri Kabupaten Bengkalis, PLT Jugil Lombok Utara, PLT Samosir, dan pembangunan IPAL mendukung IKN.

Sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK, antara lain TPA Sampah Regional Mamitarang, Solid Waste Treatment Metro Bandung, TPS TRDF TPA Regional Kebon Kongok, perluasan TPA Ijobalit Lombok Timur, serta pembangunan TPST mendukung IKN. Penanganan 307 hektar kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kampung Inggris Kabupaten Kediri, Lagasa Muna, Kedaung Kota Tangerang, dan Belawan Bahari Kota Medan.

Kemudian, penyelenggaraan bangunan gedung TSTH Pollung, gedung parkir motor, dan kantin DPR, Mako Paspampres Jakarta, LP kelas 2B Sorong, karena kerusakan yang lalu, Papua Youth Creatif Hub Muda inspiratif, Rumah Anak Asmat, dan Masjid Baitul Arham Sumenep, dan PLPN Jagoi Babang Long Nawang, Long Midang, dan Labang.

Dan, pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan olahraga dan pasar, antara lain renovasi SMA Taruna Nusantara, pembangunan rehabilitasi gelanggang inovasi dan kreativitas UGM, Universitas Negeri Padang, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Institut Teknologi Kalimantan, IAN Metro, Universitas Negeri Gorontalo, ISI Yogyakarta, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Riau, pembangunan dan renovasi Pasar Gede Klaten, Pasar Thumburuni, Pasar Kota Batu, Pasar Alasa

Kabupaten Nias, Pasar Baros Kota Serang, Banjarsari Pekalongan, Pasar Tanjung Pinang, dan penyelesaian Indoor Multifunction Stadium Senayan, dan Venue Panjat Tebing di Jakarta. Penataan kawasan, antara lain KSPN Kawatobi, KSPN Bromo Tengger Sumeru, kawasan Kaimana dan kawasan Dieng, serta IKN.

Ibu-Bapak sekalian, untuk bidang perumahan sebesar 6,98 triliun akan digunakan untuk pembangunan rusun sebanyak 5.379 unit, antara lain Rusun Yayasan Al-Muslim Peusangan Aceh, Pompes Ali Baharuddin Sumut, RSUD Raden Mattaher Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Bima, Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, Rusun Lansia Gorontalo, dan termasuk program OPOR sebanyak 59 tower, dan hunian pekerja konstruksi di IKN.

Pembangunan Rusus 3.362 unit untuk masyarakat berdampak bencana alam dan konflik sosial seperti Sulawesi tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Sampang, Lebak, termasuk penanganan kegiatan OPOR untuk pembangunan rumah dinas IKN. OPOR ini Ibu-Bapak sekalian, ini adalah singkatan dari Operasi Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi. Jadi, untuk 2023, 2024 memang kami fokuskan hanya mengoperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun, mengoptimalkan yang mungkin belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki.

Dan, yang ketiga adalah bantuan rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim. Ini tadi juga disinggung khusus oleh Bapak Presiden dalam pengarahannya pada seluruh gubernur, dan Bupati, Walikota termasuk untuk penanganan *stunting*. Yang keempat adalah pembangunan 27.825 unit PSU untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, 3 lokasi PSU jalan akses perumahan, dan 100 unit rumah tumbuh tahan gempa.

Untuk dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yaitu Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM untuk pengembangan SDM, untuk pengembangan infrastruktur wilayah, Setjen dan Itjen, total sebesar 1,95 triliun.

Pada Tahun 2023 untuk membantu membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat, Kementerian PUPR juga mengintensifkan pelaksanaan program padat karya melalui kegiatan P3TGAI, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, PAMSIMAS, SANIMAS, KOTAKU, PISEW, sanitasi ponpes, lembaga keagamaan dan rumah swadaya dengan target keseluruhan penerima manfaat sebesar 785.000 pekerja.

Sedangkan, untuk mempercepat pelaksanaan program Tahun 2023 telah dilaksanakan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang dimulai sejak bulan Oktober 2022. Dari total 3.942 paket kontraktual senilai 89 triliun hingga tanggal 15 Januari terdapat 1.200 paket telah terkontrak termasuk MYC lanjutan dan 1.155 paket senilai 12 triliun dalam proses lelang dan 1.583 paket senilai 23 triliun belum lelang.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu-Bapak Anggota DPR Komisi V yang terhormat dan kami hormati,**

Demikian laporan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program APBN 2022 dan Rencana Kerja Program Tahun 2023 Kementerian PUPR yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami mohon arahan dari Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR yang kami hormati.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Menteri, atas paparannya.

Bapak-Ibu sekalian, demikian yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait agenda rapat kita pada hari ini, itu yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk APBN Tahun 2023. Semua sudah disampaikan secara jelas dan lugas oleh Pak Menteri, ya.

Namun demikian, manakala masih ada beberapa hal mungkin yang mau didalami, kami persilakan, namun demikian saya rasa Bapak-Ibu sekalian ini kan sudah kita bahas berulang-ulang Pak Roberth, ya, jadi juga kalau evaluasi itu juga di Tahun 2022, temporer kita sudah lakukan evaluasi dan 2023 disampaikan oleh Pak Menteri tadi sudah kita bahas juga di pelaksanaan rapat-rapat kerja terdahulu maupun rapat dengar pendapat kita, beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembahasan APBN Tahun 2023.

Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak-Ibu sekalian, di sini sudah terdaftar ada cukup banyak ini Anggota ya, mungkin bisa singkat padat jelas nanti teman-teman sekalian. Yang pertama sesuai daftar yang datang ini kelihatannya Pak Willem Wandik, lebih rajin hari ini mendapat kesempatan pertama, nanti yang kedua Pak Muhammad Aras. Saya persilakan Pak Willem, kalau bisa cepet jangan lama-lama.

**F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik.

**Pak Ketua dan juga para Wakil Bapak-Ibu Anggota Komisi V, Pak Menteri, serta seluruh jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan,**

Pertama, dari kami tentu memberikan apresiasi Pak Menteri beserta seluruh jajarannya atas Kinerja Realisasi Anggaran 2022, ini di atas dari seluruh Ditjen rata-rata di atas 96%. Karena itu kami patut memberikan apresiasi dan ini beda-beda tipis dengan Realisasi Anggaran 2021. Dan, teristimewa atas pelaksanaan program padat karya, dan juga program belanja modal dalam negeri, dan juga paket tingkat komponen dalam negeri, dan juga



terkait program kegiatan Kementerian PUPR di wilayah Papua tahun anggaran 2022 ini kami juga menyampaikan terima kasih.

Dan yang berikut, kami harapkan semakin pulihnya negeri ini dari mewabahnya *corona virus* semoga memberikan dampak pada kinerja mitra Komisi V lebih khusus Kementerian PU PERA dalam rangka mendukung daya serap.

Dan yang berikut, kami juga memberikan catatan terkait dengan lima destinasi pariwisata super prioritas. Ini dari sekian itu kalau bisa untuk Danau Toba diprioritaskan karena Bandara Simolangit statusnya sudah ditetapkan sebagai Bandara Internasional sebagai pintu masuknya para wisatawan. Namun sarana dan prasarana dari infrastruktur penunjang daripada Danau Toba sebagai pusat destinasi wisata ini juga perlu menjadi perhatian, Pak Menteri.

Dan, Pak Menteri, terkait dari gempa bumi tektonik yang berkekuatan 4,9 skala richter yang belum lama ini telah mengoncangkan Kota Jayapura. Tentu ini juga memberikan dampak kepada sejumlah infrastruktur fasilitas publik maupun juga warga, karena itu saya kiranya menjadi perhatian Pak Menteri.

Itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Willem. Pak Muhammad Aras, bersiap-siap Pak Boyman Harun.

#### **F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran,  
Dan, seluruh hadirin yang sangat berbahagia,**

Pertama-tama tentu kami mengapresiasi segala kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Menteri PUPR sepanjang Tahun 2022 dan tentu memperlihatkan progres yang sangat baik.

Yang kedua, tentu dalam hal ini kita mengevaluasi tentang hal-hal yang tentu masih ada yang perlu diperbaiki, perlu dipercepat, dan perlu tentu di tingkatkan kualitasnya dari segala program-program yang terlaksanakan di Tahun 2022. Yang pertama, tentu saya kembali ke Dapil bahwa, baru saja di Dapil saya sepanjang di Sulawesi Selatan mulai dari Makassar sampai ke Pare-

Pare itu diterpa banjir besar dan puting beliung, ya baru saja juga kemarin juga kami hadir di beberapa tempat karena musibah puting beliung. *Nah*, ini tentu dari PUPR sangat kami butuhkan kehadirannya untuk bisa membantu masyarakat di sana terutama mengatasi fasilitas-fasilitas, terutama antisipasi terjadinya banjir di mana-mana dan kerusakan-kerusakan infrastruktur yang ada. Terutama Jalan Poros dari Makassar sampai Pare-Pare akibat banjir besar sekarang banyak sekali yang berlubang, Pak, segera mungkin di daerah mempercepat anggotanya untuk turun ke lapangan, sehingga tidak mengakibatkan musibah yang lebih besar terhadap masyarakat kita.

Yang kedua, terkait dengan program *bypass* Mamminasata yang tentu dijanjikan untuk tahun ini segera dilanjutkan dan mohon dipercepat, Pak, sehingga kemacetan dari Makassar sampai ke Pare-Pare ini bisa teratasi dengan segera. Kemudian yang mengakibatkan banjir juga daerah Pangkep itu, kemarin kami sudah kunjungi Bendung Tabo-Tabo, karena anggarannya juga sudah keluar mohon dipercepat pelaksanaannya, sehingga masyarakat lebih cepat bisa menikmati apa yang menjadi program-program kita.

Yang kedua, juga pengerukan Sungai Pangkajene yang kemarin juga kami sudah usulkan. Ini dengan badai kemarin itu menahan lumpur di pinggir pantai, sehingga pendangkalan semakin tinggi, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan program 2022 terkait dengan jembatan gantung, ya, ada beberapa titik di Sulawesi Selatan sampai hari ini juga belum selesai program Tahun 2022. Mohon ini segera dipercepat sehingga janji kami di masyarakat bisa segera digunakan bisa segera terwujud.

Kemudian yang berikutnya adalah biasanya di awal tahun, itu di daerah Bosowa, Bone, Soppeng, Wajo di Dapil kami itu Danau Tempe biasanya meluap, Pak. *Nah*, oleh karenanya mohon diantisipasi segera mungkin sehingga masyarakat tidak banyak terdampak terkait dengan akibat meluapnya Danau Tempe, karena kalau Danau Tempe meluap, ya, biasanya rumah-rumah banyak yang hanyut, ya. Mohon ini menjadi antisipasi kita, sehingga ini bukan musibah tahunan ya memang ya pasrah saja menerimanya.

Kemudian ini saya menyeberang ke dekat rumah saya di Makassar, itu pembangunan IPAL di Makassar itu sepertinya terlalu lama. Sudah hampir dua tahun saya menikmati di Kota Makassar dekat rumah saya selalu *nggak* bisa lancar jalanan, karena jalannya dibongkar untuk dibangunin IPAL di bawahnya dan itu banyak jalan yang ditutup, Pak. Mohon disampaikan ke pelaksana lapangan, sehingga ini supaya gerak ekonomi masyarakatnya juga tetap lancar. Dan, banyak misalnya di tempat-tempat tertentu ekonomi masyarakatnya agak terganggu karena fasilitas jalan yang melewati di daerahnya juga tidak lancar.

Dan, yang terakhir tentu kami berharap bahwa program-program Tahun 2023 dan selanjutnya terus memprogramkan terkait dengan bagaimana kepentingan masyarakat dan padat karya. Dan, mohon juga ada surat saya kemarin melalui Pak Sekjen terkait dengan program yang kemarin yang belum terlaksana mohon ada jawaban sesegera mungkin, Pak Sekjen. Barangkali itu yang saya sampaikan, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Aras. Selanjutnya, silakan Pak Boyman Harun, bersiap-siap Pak Suryadi.

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Baik, terima kasih.

**Ketua yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama, tentu tidak henti-hentinya apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang begitu besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat yang sudah dilakukan. Dan, saya jujur saja dengan adanya angin topan kemarin itu saya sempat kirim videonya ke Pak Dirjen, Pak Jarot, betapa manfaatnya luar biasa, yang seharusnya Jalan Ketapang-Kendawangan itu, Pak, harus putus karena ombak begitu besar, tetapi dengan abrasi itu *alhamdulillah* semuanya terhindari dan bahkan menjadi tempat wisata di daerah kami itu, Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua koreksi, Pak, kalau saya salah berkaitan dengan masalah lanjutan pembangunan jalan Sungai Kelik-Tayap. Karena sejarahnya, Pak, untuk membangun lanjutan jalan Sungai Kelik-Tayap yang statusnya sudah jalan nasional itu waktu yang panjang, di mana antara jalan Kelik dan Tayap itu *overlap* dengan jalan perusahaan Kusuma. Kemarin 2022 sudah dilanjutkan pembangunan tapi saya tidak melihat untuk lanjutan 2023, lanjutin itu tidak ada. Maksud saya hanya sekitar hampir 20 kilo yang belum sampai ke Tayap ini jangan sampai dihentikan, Pak, karena kalau dihentikan menurut saya akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena kerusakannya akan semakin parah. Karena proses perjuangan agar jalan itu bisa dibangun itu tidak gampang, Bapak Dirjen pasti tahu itu, perjuangannya seperti apa. Saya bersama Pak Gubernur, bersama Pak Bupati, bersama Kabalai, dalam duduk satu meja untuk membicarakan agar perusahaan mau mengalah untuk memberikan jalan tersebut agar bisa dibangun oleh pemerintah. Jadi, harapan saya semoga di Tahun 2023 ini menjadi prioritas untuk dilanjutkan bahkan kalau bisa diselesaikan sehingga tidak lagi permasalahan yang akan timbul kemudian hari.

Kemudian, yang tidak henti-hentinya saya selalu sampaikan walaupun berdasarkan RDP kita jawaban dari Kementerian sudah saya terima berkaitan dengan masalah pembangunan Jalan Ketapang-Kendawangan belum berubah status jalan nasional, Inpres tidak keluar, tetapi masih ada harapan Bapak Dirjen sudah menjawab *insya Allah* menunggu sisa 2023, sisa Dipa kalau ada

sisanya akan diusahakan untuk ditender Jalan Ketapang-Kendawangan. Saya berterima kasih dan saya berharap semoga ini bisa direalisasikan.

Kemudian, saya yang poin-poinnya saja untuk cipta karya, Ibu, ada beberapa sekolah di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan datanya sudah lengkap di Kabalai sudah ada semua foto dan sebagainya bahkan sudah diusulkan. Harapan saya menjadi prioritas di 2023 untuk dibangun, karena sekolahnya bukan lagi rusak parah tetapi tidak bisa ditempati untuk sekolah. Tidak bisa ditempati untuk sekolah jadi harapan saya ingin menjadi prioritas utama.

Kemudian yang tidak kalah penting berdasarkan pengalaman yang kemarin terjadinya angin kencang puting beliung kata orang kami itu, Pak. Artinya sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa sekali abrasi itu bagi kami di Kalimantan Barat. Contohnya, Pak, di kecamatan Teluk Pakedai untuk Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya itu, itu hampir 40% itu daerah Pakedai dikelilingi dengan pantai dan lautan. Dengan bencana banjir kemarin dengan ombak yang besar sangat luar biasa akibatnya rumah-rumah penduduk itu rubuh, Pak. Jadi harapan kami dari Kalimantan Barat khususnya tolong abrasi-abrasi itu diprioritaskan sekali lagi di Kecamatan Teluk Pakedai, Pak, ini saya sudah lihat sendiri berdasarkan hasil reses kami kemarin itu dengan ombak yang langsung tidak lagi ke pantai tapi ke rumah-rumah. Termasuk di Sungai Tengar di Kabupaten Ketapang Kecamatan Kendawangan. Saya *insya Allah* nanti reses ke depan akan pergi bersama-sama dengan Kabalai untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan, yang nantinya *insya Allah* merupakan laporan utama yang akan disampaikan di Kementerian.

Saya pikir itu, Ketua, yang dapat saya sampaikan semoga rencana-rencana kerja dari PUPR ini tetap meningkat untuk kepentingan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Yang jelas tolong, tolong perhatikan hasil reses kami merupakan prioritas utama juga, Pak, karena kalau saya lihat dari apa yang disampaikan Bapak, Evaluasi 2022, kemudian rencana kerja 2023 sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi luar biasanya di daerah orang, Pak, di daerah kami khusus Kalimantan Barat agak kurang saya lihat. Apa yang sudah dibangun PUPR ini sifatnya saya pikir ya, sedikit-sedikit, itu pun dipotong-potong banyak atau susulan Anggota DPR RI, termasuk padat karyanya.

Jadi semoga ke depan Kalimantan Barat merupakan prioritas utama juga untuk dibangun, sehingga kami bisa melalui jalan-jalan enak seperti jalan di Jawa atau di Sumatera. Karena kalau kami mau cerita jalan kami di Kalimantan Barat, Pak, jujur saja ini menurut saya mohon maaf tidak manusiawi. Artinya tidak mendapatkan prioritas untuk menikmati jalan seperti daerah-daerah yang lain. Jadi, ini secara umum saya sampaikan apalagi sekarang ini, Pak, kalau sekarang ini ada tiga hari, dua hari, empat hari, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena amblas, karena amblas. Ibu di sebelah saya ini termasuk orang, bukan orang Kalimantan Barat tapi sudah keliling Kalimantan Barat sangat tahu dengan kondisi jalan kami di Kalimantan Barat.

Makanya kalau saya ngomong begini, Ibu, ini sangat mendukung benar apa yang Pak Boy katakan katanya. Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, sudah mewakili Kalimantan. Silakan selanjutnya, Pak Suryadi.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan dari Sekjen, Pak Dirjen, seluruh jajaran,**

Karena waktu kita singkat saya langsung saja, pertama saya juga apresiasi ya, capaian Pak Menteri beserta seluruh jajaran, khususnya di program padat karya. Selain capaian keuangan, kinerja juga cukup bagus, tapi kami bertanya sedikit terkait dengan realisasi jumlah tenaga kerja yang mencapai 135%. Dengan anggaran yang sama tentu sesuai dengan rencana, maka konsekuensinya jumlah upah pasti berkurang. Kami perlu penjelasan ini, apalagi 2023 jumlah anggaran kita bertambah untuk program padat karya 15 triliun, tetapi target untuk tenaga kerjanya masih 785.000 orang. Saya mungkin ini perlu di, kalau memang tahun lalu terealisasi 1 juta lebih, sekarang dengan anggaran lebih besar mestinya juga target keterlibatan tenaga kerja juga bisa lebih besar. *Nah*, ini mungkin perlu di apa namanya targetnya perlu penjelasan.

Yang kedua, banyak pertanyaan ke kami terkait dengan mekanisme rehab recon di pasca bencana, Pak, karena ini banyak sekali Kementerian/Lembaga yang terlibat, tetapi yang paling besar menjadi perhatian dari masyarakat itu adalah Kementerian PUPR. *Nah*, kami acuannya apakah ada PP atau apa mekanismenya, karena di lapangan sering simpang siur ini penanggung jawabnya siapa, apakah Badan Penanggulangan Bencana atau Kementerian Sosial atau Kementerian PU? Ya, ini perlu kami dapat kejelasan supaya kita juga bisa mensosialisasikan mekanisme penanganan bencana rehab recon pasca bencana. Seperti dulu di Lombok, kemudian di Palu, terakhir di apa namanya di Cianjur, ya ini perlu kami dapatkan.

Dan, terkait dengan ini nanti ada hubungannya dengan program yang berbasis masyarakat, misalnya ada daerah-daerah yang pernah terkena bencana, kemudian mereka dalam administrasi sudah mendapatkan bantuan dari program bencana itu, tetapi di program berikutnya program reguler misalnya di BPS itu tidak bisa masuk karena ada kendala administrasi. *Nah*, kesalahannya bukan di masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta agar seluruh juklak-juknis terkait dengan program-program ini kita evaluasi, kita revisi, supaya menyesuaikan.

Dalam evaluasi kami, lebih banyak pekerjaan administrasinya daripada fisiknya. Kadang-kadang untuk verifikasi butuh berbulan-bulan padahal pekerjaannya hanya sebulan atau dua bulan *gitu*. Bahkan masyarakat dirugikan akibat mereka sudah di data di kementerian lain tetapi belum terealisasi, kemudian di kita tidak bisa masuk juga padahal *real*-nya mereka sebetulnya layak mendapatkan bantuan. *Nah*, saya menekankan agar kriteria kita di PU ini lebih kepada kondisi *real* di lapangan, supaya tidak banyak terganggu oleh aspek-aspek administrasi. Ya, karena *toh* juga kalau memang realisasi di lapangannya membutuhkan dan terlaksana tidak akan ada masalah, jangan sampai kita terganggu karena status kemudian masalah administrasi. Dan, banyak sekali masyarakat yang dirugikan ini, kesalahannya ada di pemerintah tetapi masyarakat tidak mendapatkan bantuan.

Ya, misalnya di Kabupaten Lombok Utara, itu banyak yang memang rehab rekon pasca gempa tidak dapat tetapi datanya sudah ada di kementerian lain seolah-olah sudah dapat, kemudian PU mau masuk tidak bisa karena ada aspek administrasi. Padahal hasil survei *real*-nya memang sangat membutuhkan. *Nah*, saya lihat ini mungkin pengaturan tentang *readiness criteria* ini perlu dievaluasi, Pak Menteri, supaya tidak merugikan masyarakat.

Berikutnya kami menyoroti usulan-usulan kita dari daerah, sampai saat ini kami belum mendapatkan respon yang memadai terkait dengan program-program yang sudah kita sampaikan secara tertulis dan secara lisan. Sesuai dengan komitmen Bapak Menteri sering sampaikan bahwa prioritas utama adalah Direktif Presiden dan saya kira memang demikian. Dan yang kedua adalah usulan, saran, dan masukkan dari Komisi V. *Nah*, ini yang kami ingin dapatkan respon yang memadai ya, karena sampai saat ini misalnya usulan kita untuk 2023 belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Banyak sekali usulan-usulan kita di daerah, ya, dan jangan sampai juga usulan-usulan yang kemudian tidak jelas siapa yang mengusulkan tetapi diakomodir ya, ini banyak sekali kami sudah sampaikan secara tertulis, ya, mungkin nanti Pak Menteri bisa evaluasi lagi melalui Bapak Sekjen, Pak Dirjen, dan seterusnya ya. Mulai dari kalau di daerah misalnya dari Bima ada Jembatan Lewamori, kemudian nanti ada apa rehabilitasi HDL, apa HLD irigasi di Lombok, kemudian juga Institut Teknologi Lombok, Pak Menteri, dan lain-lain ini perlu ditindaklanjuti.

Terakhir, dulu kita salah satu rekomendasi rapatnya adalah melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan tidak lanjut revisi Undang-Undang Jalan, Pak Ketua, yang akan dikeluarkan Inpres-nya atau Keppres-nya saya kurang jelas, karena sampai saat ini rapat itu belum kita lakukan. Barangkali ini perlu, Pak Menteri, karena dulu Pak Menteri juga sudah sampaikan nanti akan ada rapat dengar pendapat terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang jalan yang sudah kita undangkan.

Mungkin itu, Pak Ketua, ya ini penting kami sampaikan sekali lagi karena terutama yang terkait dengan *readiness criteria*, ya. Banyak ketentuan-ketentuan yang Pak Menteri bisa ambil kebijakan ya, misalnya beberapa katakanlah satu contoh yang dulu pernah diangkat oleh kawan-kawan pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar pun bisa kita lakukan secara

penunjukkan langsung, ya, asal ada alasan-alasan yang memadai begitu ya, seperti di Taman Mini dan lain-lain. *Nah*, beberapa kriteria-kriteria yang mungkin yang kecil-kecil tapi bermanfaat untuk masyarakat ini juga saya kira perlu di sesuaikan ketentuan-ketentuannya, ya, dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh Pak Menteri yang punya kewenangan tertentu. Mungkin itu dari saya, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik makasih, Pak Suryadi. Selanjutnya, Pak Bakri, bersiap-siap Pak Mulyadi, Pak Mulyadi ada? Saya *nggak* lihat ya. Ya, Pak Bakri.

**F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):**

Ya, baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Sama dengan teman-teman, saya juga atas nama masyarakat Provinsi Jambi tentu mengucapkan terima kasih banyak di Tahun 2022 kemarin itu banyak sekali program-program yang sampai ke Provinsi Jambi, *wabil* khusus program padat karya, Pak. Itu sangat sekali dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di desa.

Ada satu hal yang mungkin yang akan saya sampaikan di sini, Pak Menteri. Pada tanggal 31 Agustus Tahun 2022, tepat pukul jam 16.24, pada saat kita rapat dengar pendapat, Pak, di tempat ini dengan lembaran di situ dikatakan bahwa *insya Allah* akan dibangun Jembatan Sungai Rambut. Tapi hari ini lembarannya agak tebal, Pak, ini saya buka-buka *kok* tidak ada, apakah ada lembaran khusus atau *gimana* ini, Pak Menteri. Karena Jembatan Sungai Rambut itu, bukan rambut maksudnya kalau di buku yang dulu itu Sai Rambut bacanya, ini Sungai Rambut. Dan, ini jembatan sangat diharapkan sekali, Pak, oleh masyarakat Provinsi Jambi khususnya di salah satu kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur. Kita terkenal Jabung Timur itu termasuk desa yang termiskin, Pak, dikarenakan infrastruktur yang tidak memadai, daerah yang gambut. *Nah*, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan Sungai Rambut ini, akan membuka ketersediaan kabupaten tersebut bisa menjadi kabupaten yang maju. *Nah*, mudah-mudahan di Tahun 2023 ini, Jembatan Sungai Rambut itu bisa direalisasikan. Karena saya tahu sampai hari ini Pemerintah Provinsi Jambi selalu menyiapkan anggaran dan selalu melaksanakan pembebasan

lahan dan pembangunan jalan menuju ke Sungai Rambut itu. Dan, harapannya mudah-mudahan ini bisa sinergi. Itu yang pertama.

Yang kedua, *insya Allah* berdasarkan agenda kunjungan spesifik tanggal 19 Januari nanti ini, kawan-kawan yang sebagian akan berkunjung ke Provinsi Jambi terkait dalam rangka meninjau jalan nasional yang sebagian besar rusak diakibatkan oleh angkutan batubara. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa diwakilkan dengan Pak Dirjen atau pun yang lain sehingga betul-betul ada azas manfaat, sehingga pada saat berkunjung nanti ada hal yang bisa dinikmati oleh kami semuanya. Hanya itu mungkin yang perlu saya sampaikan.

Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bakri. Lanjut Bu Cen Sui Lan, bersiap-siap Pak Anwar Hafid.

**F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran,**

Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Menteri kepada Kabupaten Natuna ketika ada bencana banjir tahun lalu, Pak Menteri. Terima kasih sekali, Pak Jarot, Pak Dirjen Bina Marga sudah mengirimkan direktur menemani saya dan sudah terlaksana dengan baik. Dampak dari bencana banjir tersebut ada jembatan rusak dan rumah-rumah yang hanyut, Pak Menteri, mungkin jembatan jalan-jalan rusak menuju fasilitas umum minta nanti dibantu Pak Menteri, agar bisa ditindaklanjuti di 2023.

Yang kedua, Pak Menteri, saya pernah meminta krematorium dan dari perencanaan cipta karya sudah mulai menghubungi kita. Kita harapkan 2023 dapat direalisasikan, terima kasih, Pak Menteri. Satu lagi Pak Menteri, program MCK yang mengharuskan ada siswa tinggal, Pak Menteri. Tolong agar bisa lebih fleksibel karena banyak lembaga pendidikan yang siswanya atau santrinya itu, ratusan tapi dia tidak tinggal di sana, tetapi sangat memerlukan bantuan MCK. Mohon bisa lebih fleksibel dan ada solusinya.

Terima kasih, Pak Menteri, Pimpinan, itu saja dari saya.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Bu Cen, sudah cukup, Bu? Ya, baik selanjutnya Pak Anwar Hafid ada? Oke, siap-siap Pak Ruslan Daud.



**F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita sekalian,

**Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Yang pertama, pada kesempatan ini tentu kami, saya dari Sulawesi Tengah, Pak, Dapil Sulawesi Tengah. Daerah yang juga banyak mendapatkan perhatian dari Pak Menteri, karena daerah kami adalah daerah *disaster* yang akhir-akhir ini cukup banyak bencana yang terjadi di sana. Sejak 4 tahun yang lalu sampai juga pada hari ini masih terjadi bencana banjir yang *alhamdulillah* Pak Menteri biasa langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan.

Ada beberapa hal Pak Menteri, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Sehubungan dengan Evaluasi Program Tahun 2022 dan juga Tahun 2023. Yang pertama, soal kondisi jalan negara Pak Menteri, yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini adalah salah satu provinsi yang memiliki panjang jalan negara yang cukup panjang. Dan, *alhamdulillah* kemarin sesuai dengan laporan dari Dinas PU Provinsi, bahwa kondisi jalan ini hampir sebagian mantap, Pak Menteri, cuma dari hasil perjalanan saya selama saya melakukan reses pada masa sidang kemarin, masih ada beberapa ruas jalan yang memang masih sangat kecil, Pak Menteri. Kami berharap bahwa mudah-mudahan ke depan akan terus dilakukan peningkatan utamanya pelebaran jalan, sehingga Jalan Trans Sulawesi, jalan negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa lebih menampung, ya, daya tampung kendaraan yang sudah mulai ramai juga di Sulawesi Tengah.

*Nah*, yang kedua, ada satu hal juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan jalan tersebut. Pak Menteri, mungkin masih ingat jalan yang setiap tahun, sudah sekian lama setiap tahun menelan anggaran yang cukup besar, yaitu jalan yang ada di poros Tawaeli Parigi di kebun kopi, itu jalan yang luar biasa menelan anggaran yang cukup besar. Jadi, pada kesempatan ini mungkin saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, sudah perlu dipikirkan untuk ada jalan alternatif. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiapkan perencanaan dan mudah-mudahan pada tahun kemarin *sih* kemarin sudah mendapat respon, tapi saya belum tahu apa penyebabnya sehingga program ini tidak bisa berjalan. Dan, jalan kebun kopi ini setiap saat, Pak Menteri, sedimentasinya sangat-sangat besar di situ. Karena di sana ini jangankan air, Pak, angin yang berhembus saja itu menimbulkan sedimen. Jadi, ini juga yang perlu menjadi perhatian khusus.

*Nah*, selanjutnya yang kedua kami juga berterima kasih soal pembangunan hunian tetap pasca bencana di Palu 4 tahun yang lalu. Tapi, Pak Menteri, saya perlu juga menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat hari ini yang terdampak yang masih tinggal di hunian sementara. Ini tentu sangat prihatin bagi kita semua orang yang tinggal di hunian sementara itu. Masih ada

Pak Menteri, ada di Kabupaten Donggala dan ada beberapa di Kota Palu, bahkan dua minggu kemarin, itu sangat miris karena ada kurang lebih sekitar 20 KK warga di Kota Palu itu terpaksa harus diusir ya, karena hunian sementara itu sudah tiba masa kontraknya dari pemilik tanah yang ada. *Nah*, ini juga saya sangat berharap kiranya program yang sudah ada tadi ini bisa dipercepat, sehingga masyarakat kita tidak ada lagi yang tinggal di hunian kasihan betul itu. Hunian itu sangat-sangat tidak manusiawi sebetulnya dan mereka bisa bertahan hidup sampai 4, 5 tahun, Pak Menteri.

Ada beberapa persoalan, Pak Menteri, di sekitar hunian ini saya mendengar langsung. Yang pertama, kalau kemarin Bupati Sigi itu, melaporkan bahwa sebetulnya hunian tetapnya sudah ada, Pak Menteri, tapi ada satu persyaratan saya tidak tahu itu pada regulasi yang di kementerian atau regulasi yang sengaja disepakati ketika awal bencana. Jadi, masyarakat yang berhak mendapatkan hunian tetap itu adalah masyarakat yang pada saat bencana berada di zona merah. Yang tidak berada di zona merah itu tidak berhak mendapatkan hunian tetap itu, padahal tingkat kerusakan mereka yang berada di zona merah dengan yang tidak berada di zona merah itu hampir sama, Pak Menteri. Ini juga salah satu penyebab menurut Bupati, sehingga tidak semua masih banyak masyarakat kita yang belum bisa memasuki hunian tetap tersebut. *Nah*, itu itu beberapa hal. Oleh karena itu, mohon kiranya kriteria ini bisa lebih di diperlunak sehingga memudahkan masyarakat kita yang hampir saat ini belum mendapatkan tempat hunian tetapnya.

Kemudian selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ke Pak Menteri, Tahun 2015 yang lalu, Pak Menteri, saya masih ingat waktu itu kita bersama-sama dengan Pak Presiden di Kabupaten Morowali pada saat peresmian pertama smelter nikel. Waktu itu Pak Presiden, memerintahkan supaya untuk memberikan dukungan soal infrastruktur jalan yang ada di kawasan industri Morowali itu. *Nah*, kami perlu melaporkan kepada Pak Menteri, bahwa kondisi jalan hari ini ya, yang ada di kurang lebih sekitar 8 km itu, ketika jam 5 sore atau jam 6 pagi itu terjadi kemacetan yang luar biasa, karena jalan yang sempit, kemudian karyawan sampai 70.000 melewati jalur yang sama.

Saya ingin menyarankan pada kesempatan ini perlu dipikirkan, apakah ini murni dilakukan oleh pemerintah atau juga kerja sama dengan perusahaan. Mungkin harus ada jalan alternatif, ya, atau mungkin apa namanya ini jalan *bypass*, ya, yang bisa dibangun, Pak. Karena itu juga pertama rawan, jalan nasional ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan ketimbang oleh masyarakat. *Nah*, ini yang ingin saya sampaikan supaya dipikirkan khusus, karena ini saya mengalami ketika saya pulang kampung, Pak Menteri, ini kemacetannya luar biasa. Bayangkan *shift* 35.000 keluar, 35.000 masuk, itu tabrakan itu luar biasa dan ini jalan negara yang digunakan.

*Nah*, kemudian selanjutnya untuk program 2023 juga terkait dengan BSPS, saya sependapat mungkin ada beberapa kendala tapi sebenarnya bukan kendala besar, Pak Menteri, ini hanya kendala kecil soal BSPS mengenai dengan, terkait dengan kriteria. Saya banyak mendapatkan keluhan masyarakat, karena mereka menganggap bahwa bantuan perumahan ini diperuntukkan bagi mereka masyarakat yang sangat miskin. Sehingga dengan

kriteria, contoh misalnya upah tukang yang sangat minim, Pak Menteri, 2 juta itu tentu kalau tidak ada swadaya akan sangat susah untuk bisa membantu mereka. Sementara kondisi masyarakat kita hari ini, itu untuk bisa saling membantu itu sudah sangat tidak bisa lagi kita harapkan, Pak Menteri, apalagi di Sulawesi Tengah dengan terbukanya kawasan industri beberapa itu lapangan kerja terbuka luas, sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja sangat susah. *Nah*, itu yang pertama mungkin kami menyarankan ke depan ini upah tukang itu bisa dinaikkan sedikit lagi, sehingga ini bisa membantu masyarakat kita. Banyak ada beberapa masyarakat yang terpaksa tidak bisa mengambil program itu karena mereka tidak bisa menyelesaikan, karena ketiadaan pembiayaan tukang, karena tidak cukup hanya dengan 2 juta itu.

*Nah*, kemudian selanjutnya soal kepemilikan tanah. Kebanyakan masyarakat kita belum memiliki sertifikat, mereka hanya memiliki surat keterangan tanah, itu pun surat SKT itu biasa, juga sangat-sangat susah didapatkan di pemerintah desa. Padahal tanah ini adalah milik mereka, ada yang berada di daerah Sempadan misalnya, Sempadan Sungai, Sempadan Laut, Sempadan Pantai, sehingga kadang pemerintah tidak bisa memberi alas hak di tempat itu, dan mereka sama sekali tidak punya tanah lain selain di situ. *Nah*, ini kendalanya terpaksa mereka biasa tidak bisa dan terpaksa tidak ikut dalam peserta yang mendapatkan manfaat tersebut.

*Nah*, ini beberapa hal, Pak Menteri, yang kami sampaikan aspirasi dari Dapil. Dan, saya juga mendapatkan aspirasi langsung dari kepala daerah, yang pertama dari Bupati Poso menyampaikan kepada saya bahwa Kabupaten Poso itu setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah penyangga kawasan pangan nasional. Daerah Kabupaten Poso ini memiliki luas wilayah yang cukup untuk mendukung pertanian di sana, Pak Menteri, tapi sayangnya beberapa daerah irigasi yang sudah pernah dicanangkan itu belum pernah dilaksanakan. Padahal, ada satu kawasan kurang lebih sekitar 6.000 hektar bisa dimanfaatkan, ada yang di seputaran Danau Poso itu juga, Pak Menteri, itu sangat potensi tapi irigasinya yang belum terbangun.

*Nah*, kemudian juga beberapa Jalan dalam rangka mendukung IKN. Ada program Pak Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu jalan poros yang menghubungkan kawasan timur Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang baru, itu kalau dibuat jalur itu, Pak Menteri, akan kami sampaikan semua FS-nya sudah selesai oleh Pak Gubernur. *Insyallah* dokumennya akan kami serahkan langsung nanti bersama Pak Gubernur. Ini hanya penyampaian awal, Pak Menteri, sehingga transportasi masyarakat nanti menuju ke IKN dari kawasan timur itu tidak terlalu jauh, tapi cukup kalau kita bisa membuka jalan ini bisa akan memudahkan arus distribusi, logistik, kemudian juga arus transportasi penumpang, dan sebagainya.

Saya kira itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan, Pak Menteri, untuk pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

*Wallahu musta'an,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Anwar Hafid, berikutnya Pak Ruslan. Bersiap-siap Bu Sri Rahayu.

**F-PKB (H. RUSLAN DAUD, S.E., M.A.P.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh para Anggota yang hadir, Yang kami hormati Bapak Menteri beserta jajaran yang kami banggakan semua,**

Pertama, sama dengan teman-teman kami mengapresiasi atas kinerja capaian Bapak Menteri, Anggaran Tahun 2022 sangat luar biasa.

Yang kedua, Pak Menteri, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih masyarakat Aceh Utara, Pak Menteri, pasca banjir kemarin sangat luar Bapak Menteri turun langsung ke lapangan. Atas kerja keras anak buah Bapak Menteri, bisa menyelesaikan pekerjaan yang Bapak Menteri kasih, ini sangat luar biasa sekali lagi kami mengapresiasi.

Dan, apresiasi sekali lagi, Pak Menteri, atas Bapak Menteri mengunjungi Kabupaten Aceh Utara dan memboncengi saya kemarin dengan motor cikal, *alhamdulillah* itu sudah nampak lagi ini 2024 ini mungkin saya *nyampe* lagi ke sini, Pak Menteri. Moga-moga kalau memang Pak Menteri, sering ke lapangan apalagi ke Aceh memboncengi kami-kami ini sangat luar biasa, itu kampanye yang sangat luar biasa, Pak Menteri, luar biasa, Pak Menteri.

*Nah*, jadi, Pak Menteri, ada sedikit ini kita Evaluasi Anggaran Tahun 2022. Yang mengenai yang kemarin ini memang ada niat kita kunjungi tetapi ini waktu yang tidak bersahabat dengan kita pada saat itu, yaitu DI Krueng Pase, Pak Menteri, itu belum selesai sampai sekarang. Itu sudah dikerjakan sudah 14 bulan, Pak Menteri, tetapi progresnya masih 36%. Empat belas bulan dia kerja progresnya 36%, Pak Menteri. *Nah*, yang kami tahu di lapangan dan juga saya turun ke lapangan, saya serap aspirasi masyarakat yang ada di situ. Memang kontraktornya ini sangat luar biasa, sangat luar biasa tidak bagus maksudnya, bukannya biasa bagus, makanya pekerjaan di situ terbengkalai.

*Nah*, dengan terbengkalainya pekerjaan yang dirugikan oleh masyarakat, Pak Menteri, masyarakat sangat rugi. Tidak bisa bercocok tanam, yaitu dua kabupaten, Kabupaten Aceh Utara dan juga Kota Lhokseumawe, ini sangat luar biasa. Jadi, dalam kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Menteri, coba dievaluasi apa sebabnya sehingga proyek yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat secara keseluruhan di dua kabupaten tersebut dapat diselesaikan ternyata menjadi hambatan yang sangat luar biasa.

Dan, untuk Tahun 2023, Pak Menteri, saya lihat atas paparan tadi dan saya baca di buku ini tidak masuk, Pak Menteri, termasuk kelanjutan yaitu pembangunan Jalan Cut Meutia. Ini tadi pun saya sudah sampaikan kepada Bapak Dirjen moga-moga dapat ditindaklanjuti kembali untuk Tahun 2023. Dan, juga pembangunan jembatan *flyover* di Simpang Krueng Geukeuh Aceh Utara, supaya bisa masuk juga di anggaran berikutnya dan juga sudah ada perencanaan. Dan, juga peningkatan pelebaran jalan menuju tempat wisata Bantayan di Seunuddon Aceh Utara, ini juga perencanaannya sudah selesai saya rasa. Moga-moga Bapak Menteri dapat mengabul, dapat menindaklanjuti apa yang kami sampaikan tentunya adalah sesuai dengan undang-undang yang melekat.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih, Pak Ruslan, selanjutnya Bu Sri Rahayu, silakan.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya langsung saja maaf agak banyak sedikit. Yang pertama adalah saya ingin tanya, Pak, yang tidak bisa direalisasi karena PHLN dan SBSN itu sebenarnya kenapa tidak bisa turun begitu. Artinya SBSN ini kan surat utang ya, apa karena memang *nggak* ada yang diutang atau bagaimana, mohon penjelasan.

Kemudian yang kedua, tentu saya juga mengapresiasi apa yang di lakukan Pak Menteri dan seluruh jajaran capaian-capaian yang ada. Dan, terima kasih pula mungkin salah satu dari Tahun 2022 jembatan gantung di Kabupaten Tulungagung sudah diresmikan kemarin bulan Desember. Yang di Kediri Tahun 2022 belum selesai, Pak, mudah-mudahan saya *nggak* ngerti apakah ada perpanjangan waktu untuk itu, tapi yang jelas belum selesai untuk anggaran 2022, mungkin bisa dicek.

Selanjutnya masalah *food estate*, ini Kementerian PUPR kan terlibat di dalamnya, Pak, baik yang agri bisnis maupun apa yang lain-lain dalam rangka untuk ketahanan, bukan ketahanan ya, kedaulatan pangan di Indonesia. Saya sangat mendukung termasuk di dalamnya adalah pendamping beras, yaitu sorgum, kemudian jagung, dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk pembuatan lahan ini kan angkanya atau anggarannya cukup besar. Dan tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa itu berulang-ulang tidak bisa langsung bisa jadi, bisa subur, dan seterusnya, masyarakatnya juga perlu edukasi, saya setuju untuk itu. Namun yang ingin saya sampaikan saya tidak tahu bagaimana

komunikasinya Pak Menteri PUPR dengan kementerian yang lain, bahwa justru di Jawa ini lahan-lahan yang subur yang sudah tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk peningkatan pangan, itu sekarang justru tumbuhnya tumbuh rumah-rumah. Jadi, bukan tumbuh sawah, bukan padi, tapi rumah-rumah di lahan-lahan subur. Oleh karena itu, mohon dengan hormat dan sangat barangkali komunikasi dengan Pak Menteri, baik itu terutama Menteri Agraria ya BPN, ya, mohon itu disampaikan begitu. Sayang sekali, Pak, saya rasanya sedih di satu sisi Bapak membuat mati-matian lahan dengan segala pembiayaannya tapi di sisi lain dihabiskan begitu saja.

Kemudian, terkait dengan *food estate* juga, sorgum ini enak, Pak, rasanya tetapi yang paling penting adalah yang pertama adalah bagaimana mengedukasi masyarakat memanfaatkan tanaman itu. Dan, yang kedua adalah bagaimana pasca panen itu harganya tidak turun sebagaimana yang Bapak buat tadi juga bawang. Bawang itu saya dari Nganjuk, Pak, dekat di Kecamatan Rejoso yang ada Semantok, Pak, tanah kelahiran saya sehingga bawang merah itu di sana kalau sudah jatuh harganya luar biasa, karena di sana bawang merah itu luar biasa juga penanamannya. Oleh karena itu, itu perlu juga mendapatkan perhatian sehingga pembiayaan untuk pembuatan yang lain-lain tidak terlalu tersedot ke sana begitu. Terutama pasca atau apa pemasaran atau pasca panennya itu seperti apa.

Terkait dengan Semantok, Pak, kan barusan diresmikan tapi kapan itu adik saya datang ke sana untuk melihat karena itu tempat wisata juga. Ternyata di sana ditutup karena katanya ada yang berenang, Pak. *Nah*, info ini mudah-mudahan tidak benar ini kan menjadi satu manajemen yang perlu mendapatkan perhatian ya, bahaya sekali itu kalau ada yang renang di danau itu, apa di bendungan itu. *Nah*, oleh karena itu mohon apa namanya ke pengelolanya.

Kemudian terkait dengan BSPS, apa yang disampaikan Pak, lupa, terkait dengan Sulawesi Tengah tadi bahwa ada satu persoalan juga terkait dengan tanah, Pak, lupa, njih. Mereka itu sudah menempati tempat tinggal di tempat tersebut, yaitu di tempat perkebunan sejak sebelum kemerdekaan, itu sudah ada. Artinya sudah turun-temurun di situ sudah ada tetapi mereka orangnya miskin dan layak untuk mendapatkan BSPS, tapi tidak bisa karena seperti tadi ada persyaratan. *Nah*, sampai kepala desanya bilang "Bu, saya disuruh tanda tangan memenuhi syarat apa saya *insya Allah* mau yang penting warga masyarakat saya ini mendapatkan", karena memang saya turun langsung di sana dekatnya hutan. *Nah*, ini perlu solusi, Pak, meskipun aturan-aturannya tadi sudah ada tetapi kalau hal seperti ini, kalau itu miskin ekstrim akhirnya *nggak* dapat juga *gitu*, padahal kita diminta untuk memberikan bantuan itu kepada yang bersangkutan.

Dan, terkait dengan BSP, saya selalu menyampaikan, Pak Menteri, pendamping ini jangan 4 bulan, Pak Menteri, tolong ditambah 2 bulan karena proses verifikasinya itu, penjadwalannya itu sangat mepet kadang hanya sehari, dua hari, dua hari, tiga hari, itu *ndak* cukup untuk program yang sebanyak itu. Sehingga saya mohon dengan hormat dan sangat, kasihan itu para pendamping itu. Karena harus cepat-cepat yang pada akhirnya istilahnya *wong Jowo* itu *kebat kliwat* begitu. Jadi, ada hal-hal yang mesti harus

mendapatkan perhatian tetapi tidak mendapat perhatian. Saya betul-betul turun, Pak, kalau BSP itu saya datangi satu persatu sehingga saya tahu persis persoalannya. Makanya tolong ini dibantulah, dulunya 8 bulan turun sampai sekarang hanya 4 bulan, padahal gajinya cuma 5 juta itu. Kadang-kadang mereka berkorban untuk supaya gimana caranya, karena masyarakat itu kan kadang-kadang (suara kurang jelas) seperti tadi karena *ndak* punya ini harus nunggu-nunggu dan seterusnya *nggolek dino* istilah kalau orang Jawa itu. Jadi, untuk membongkar rumahnya itu cari hari yang baik, Pak, sehingga tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat itu ditentukan seperti itu. Itu orang Jawa soalnya, mohon perhatiannya.

Kemudian PAMSIMAS, maaf, Pak Ketua, izin agak panjang, agak banyak. PAMSIMAS itu kalau yang menggunakan air bawah tanah, itu *nggak* ada masalah karena jaraknya pendek langsung bisa masuk tandon kemudian didistribusikan. Tapi kalau yang gravitasi, Pak, itu jaraknya ada yang 9 kilo, ada yang apa, 6 kilo, sehingga memerlukan, apa namanya, paralon yang panjang. Dan, kalau airnya bagus bisa langsung tapi kalau tidak juga perlu filter. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat mungkin bisa dibedakan antara anggarannya ini antara PAMSIMAS yang gravitasi dengan yang sumur bor itu mungkin agak lebih tinggi begitu angkanya, karena jaraknya cukup jauh untuk menggapai air tersebut, dari gunung itu, yang gravitasi. Sangat dibutuhkan, oleh karena itu juga mohon program ini jangan dihentikan, Bu, karena daerah kami bergunung-gunung, sehingga banyak memerlukan, memerlukan itu. Yang problem air itu tidak hanya orang perkotaan ternyata pedesaan itu juga sangat problem dengan air bersih.

Yang berikutnya adalah tentang padat karya, seringkali begini kalau yang mengelola itu yang bersangkutan oke, tapi kalau yang mengelola itu orang lain dalam arti mereka hanya mendapatkan program, itu rata-rata begini, Pak, Bu, ketika sosialisasi misalkan ABSAH, ya, sosialisasi itu nanti padat karya akan diambilkan tenaganya dari situ, tapi pada kenyataan ketika, ketika proses itu berjalan ternyata tidak mendapatkan apa, apa namanya tenaga kerjanya tidak diambilkan dari orang sekitar. *Nah*, ini perlu *monggo* silakan dari Balai juga meskipun saya juga sudah menyampaikan tolong ini juga mendapatkan perhatian.

Jalan Lintas, Jalan Lintas Selatan, Pak, ini kan ya sampai Tulungagung kan mestinya ya, Pak, ya. Jalan lingkar apa lintas ya namanya itu? Lintas selatan. Itu karena belum selesai sekarang ini kalau saya hanya minta penjagaannya, Pak, ini dipakai balapan motor liar, Pak. Jadi tidak hanya dari orang tersebut tapi justru dari luar kemudian bawa truk-truk begitu, orangnya datang ke tempat tersebut untuk balapan liar. Silakan itu di, jalannya memang bagus sudah, tapi karena belum digunakan kan akhirnya dimanfaatkan oleh anak-anak dan itu bukan hanya dari orang Blitar tapi dari luar kota yang menggunakan. *Nah*, oleh karena itu penjagaannya juga perlu di, apa ya istilahnya *monggo* silakan bagaimana cara teknis untuk hal tersebut.

Yang terakhir, mungkin saya sudah pernah menyampaikan juga, yaitu jembatan yang ada di wilayah Kesamben. Yang sudah ada jembatan itu satu sudah selesai dan sudah dimanfaatkan, yang seharusnya semuanya empat

tetapi satu sudah dibangun selesai. Dan, yang kedua ini rencananya itu sudah, sudah dipindahkan, Pak, makam itu sudah dipindahkan. Jadi di situ ada makam kemudian sudah dipindahkan tetapi dari balai itu ternyata titiknya dirubah. *Nah*, ini karena apa tolong ini, ini juga orang sudah memindahkan makam *kok* sekarang dirubah lagi begitu. *Nah*, tolong ini kenapa demikian, balai yang minta titiknya untuk dirubah. Supaya kita saya juga kalau misalnya ditanya itu juga mengerti gitu, kenapa *kok* bisa titiknya dirubah padahal sebelumnya kan pasti sudah ada FS-nya, sudah ada seterusnya, dan kabupatennya juga sudah oke, kemudian warga masyarakatnya juga sudah oke, makamnya sudah dipindah, sehingga itu menjadi perhatian bagi Kabupaten Blitar.

Yang terakhir kali, Pak, terakhir.

**KETUA RAPAT:**

Tadi, tadi sudah terakhir.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Tadi baru terakhir, sekarang terakhir kali, Pak, ada kalinya, Pak. Yang terakhir kali, jadi saya mohon dengan hormat dan sangat PISEW ini sangat diharapkan oleh, program ini sangat diharapkan oleh masyarakat karena untuk mengantisipasi. Di satu sisi desa itu tidak mampu bangun, kemudian pemerintah kabupaten juga merasa bahwa itu adalah jalan desa sehingga yang bangun juga harus APBDes, APBDes tidak mampu mohon itu jumlahnya diperbanyak supaya untuk mengantisipasi itu. Dan, jalan-jalan desa yang APBDes-nya *ndak* mampu tentu jalannya *ndak* karu-karuan begitu ya. Kalau di dalam perkotaan kan masih halus-halus ya, justru orang desa ini tolong juga diberikan perhatian.

Terima kasih, Pimpinan, mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ya, selanjutnya Pak Djenri Alting, siap-siap Pak Syarif Abdullah. silakan

**F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Dan, kementerian beserta jajarannya.**

Tentu kami memberi apresiasi atas hasil yang dicapai pada 2022, tetapi yang mau kami sampaikan justru seperti KSPN itu, yang strategi pariwisata nasional itu, salah satu itu seperti yang saya sampaikan ke Pak Menteri itu adalah Sulawesi Utara Tahun 2022 kemarin, jalan yang dari bandara ke Likupang itu, tapi saya tidak lihat kawasan itu yang merupakan kawasan



strategi nasional itu, masuk dalam penganggaran di 2023 ini. Bahkan kemarin 2022 waktu dengan Menteri Perhubungan saya menyerahkan surat terakhir dari Pak Gubernur, Pak Olly, Tahun 2002 kita cuma kedatangan rehab pelabuhan Likupang yang kecil itu, padahal itu strategi nasional. Itu satu yang diprioritaskan, sehingga kami juga tetap mengingatkan kepada pihak kementerian ini, seperti strategis nasional Danau Toba, Danau Tondano kita juga itu salah satu 10 danau yang ditetapkan lewat Keppres untuk menjadi prioritas nasional. Mudah-mudahan yang sementara dikerjakan di sana karena *multi years* saya lihat ada 123 miliar untuk Danau Tondano itu tidak dipotong-potong lagi seperti tahun kemarin. Itu baru satu *item* di salah satu danau yang menurut presiden itu, itu harus di perhatikan, itu satu.

Kemudian kemarin Tahun 2020 akhir kita rapat *zoom* dengan Balai SDA di sana tentang abrasi Pantai Amurang gitu. Anggarannya tidak banyak, Pak, tapi mudah-mudahan itu ada kebijakan khusus dari dirjen atau Pak Menteri, karena semakin hari memang ada alokasi dana ke sana, tapi itu rumah yang direlokasi saat abrasi terjadi dan untuk jalan itu memang belum ada anggaran yang masuk, karena rapat *zoom* kami kemarin di balai itu dengan pihak kementerian itu cuma kurang lebih 30 miliar. Untuk secara permanen kita akan memperbaiki itu agar tidak setiap hari terjadi abrasi terus di sana, bisa terjadi terus kalau tidak ada penanganan permanen yang kita maksudkan itu. 1.54.29

Syukur kemungkinan hari Kamis besok malam Pak Presiden akan ke Sulut akan apa meresmikan Bendungan Kuwil mungkin bersama-sama Pak Menteri, mudah-mudahan juga saya diundang ke sana karena Dapil saya di sana, mudah-mudahan kita akan bersama-sama di sana. Masih ada titipan mungkin juga Bendungan Lolak itu tidak lagi lama akan selesai, walaupun Pak Menteri saya perlu sampaikan Bendungan Lolak ini masih ada orang yang mengkomplain bahwa masih ada masalah tanah di sana. Mudah-mudahan itu sudah bisa terselesaikan di 2023, agar supaya itu salah satu bendungan besar yang ada di sana.

Kemudian berikut, saya ada titip salam dari masyarakat perbatasan, Pak Menteri, jalan yang ke Rainis itu jalan nasional itu kurang lebih 10 km sampai hari ini belum terselesaikan. Sementara menurut saya itu prioritas karena ini daerah perbatasan dengan Philipin. Tidak panjang jalan di daerah kepulauan itu, kurang lebih 10 km yang belum bisa terselesaikan. Mudah-mudahan lagi ada, ada kebijakan khusus dari Pak Menteri, itu ke Rainis.

Yang terakhir, masalah BSPS. Hampir semua teman-teman bicara tentang BSPS, teknisnya itu memang tidak semua daerah sama. Setelah kemarin kami reses seperti di daerah Talaud, ya, daerah perbatasan Talaud juga sana. Mereka batunya itu kalau mau buat rumah itu datang ambil di Pantai Malalayang yang besok, Pak Presiden nanti mau resmikan proyek di sana. Ongkos angkutnya itu sudah lebih dari 20 juta, sementara alokasi dana untuk BSPS itu maksimal 20 juta saja. Sehingga mungkin ada perlakuan khusus untuk daerah-daerah jauh begitu dengan ongkos angkut yang luar biasa. Saya tawarkan BPS di sana barusan untuk aspirasi saya, mereka bilang "Pak, sia-sia karena uang 20 juta itu habis diangkut, ya". Batunya ambil di Manado pergi ke daerah terluar Sulawesi Utara di Talaud. Sehingga mungkin kita bisa

pikirkan sama-sama apakah BPS ini tidak harus sampai di sana atau ada kebijakan khusus yang kita boleh ambil agar supaya program ini juga tersentuh sampai di masyarakat perbatasan yang memang rata-rata memerlukan bantuan itu.

Kemudian untuk teknis persyaratan, seperti yang saya katakan kemarin itu ada kebijakan di BPS itu untuk menerima rumah ini, bahwa mereka tidak menerima bantuan-bantuan lain ya, seperti dari dinas sosial ya, ada bantuan sosial. Saya katakan justru mereka yang diprioritaskan untuk mendapatkan itu, karena makan sehari-hari saja mereka itu hampir tidak cukup, apalagi untuk membangun rumah. Sehingga seperti yang teman-teman sekarang sarankan tadi mungkin ada lagi hal-hal teknis yang perlu kita rumuskan agar supaya orang-orang ini bisa menerima bantuan rumah ini, katakanlah pada rumah ini. Seperti masalah kepemilikan sudah disampaikan Ibu tadi juga. Ada orang yang memang sampai hari ini cuma numpang sama keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Dia punya tanah tapi tanahnya ada di kelurahan yang lain atau di kampung yang lain, dia tidak bisa untuk aturan sekarang dia tidak bisa membangun di situ karena berbeda lokasi, sehingga itu bisa juga dipikirkan kalau rumah itu memang diperuntukkan bagi orang yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak huni.

Yang terakhir mungkin, Pak Menteri, saya tetap berjuang karena tadi dihubungkan dengan masalah ketahanan ekonomi. Saya pulang reses, saya pergi daerah-daerah pertanian, sawah. Wilayah Bolmong Raya itu merupakan daerah penyuplai beras terbesar di Sulawesi Utara bahkan dia sampai mengirim ke Indonesia Timur. Mereka sekali lagi meminta kebijakan dari Pak Menteri, lewat saya di Komisi V. Kalau bisalah ada kebijakan untuk bagaimana kita masuk dengan program jalan akses pertanian itu. Yang ongkos angkutnya jadi mahal karena mereka mengangkat hasil tani, apakah itu padi, cengkih, pala, atau tanaman lainnya yang sangat banyak di sana tapi habisnya di jalan, ongkosnya luar biasa.

Bahkan ada yang bilang kita angkat satu karung beras saja 50.000 baru keluar dari lokasi kebun. Baru untungnya kita di mana walaupun beras harga sekarang cukup naik, tapi kalau cengkih, kopra, vanili itu ya harganya terjun bebas. Sehingga sekali lagi minta ada kebijakan dari Pak Menteri, mungkin di APBN perubahan nanti ada anggaran-anggaran itu kita yang masuk ke situ. Katakanlah perprovinsi atau per kita Anggota Komisi V itu ada alokasi sekian berapa miliar untuk akses perkebunan, akses pertanian itu. Itu selalu saya sampaikan terus ke pihak kementerian dan mungkin dalam waktu dekat kami akan menyampaikan secara tertulis dan lebih lengkap lagi.

Pak Ketua, Pimpinan, Pak Menteri, dan jajarannya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Djenri, selanjutnya Pak Irwan, bersiap-siap Pak Syarief.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi V beserta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Pak Menteri PUPR,  
Pak Sekjen,  
Irjen,  
Pak Dirjen,  
Pak Direktur, serta  
Seluruh jajaran Kementerian PUPR yang hadir pada rapat siang dan sore hari ini,**

Pertama-tama tentu terkait Program Tahun 2022 kami mengapresiasi apa yang telah direncanakan kemudian dieksekusi di Tahun 2022, kemarin, terutama terkait pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh PUPR. Terima kasih, Pak Menteri dan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga terkait rekonstruksi dan preservasi di beberapa ruas jalan nasional di Kaltim. Semua poros baik di selatan kemudian yang ke barat juga dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, ke Mahakam Ulu, juga dari Samarinda-Bontang, Kutai Timur Berau ke perbatasan Kaltara, semua tertangani dan dalam skema *multi years* kontrak. Juga terkait akses IKN juga dilaksanakan kami, sangat mengapresiasi.

Kemudian Cipta Karya terkait pembangunan rehab sekolah, juga SPAM untuk Tahun 2022 kami sampaikan apresiasi. Sumber daya air, rehab daerah irigasi di Kaibun juga tuntas, kemudian normalisasi sungai di Karang Mumus juga selesai, serta pembangunan bendungan di IKN, Sepaku, serta pembangunan air baku di Sangkulirang. Terima kasih, Pak.

Kemudian terkait perumahan, rumah susun, juga apa namanya sekarang lagi pembangunan di IKN, rumah susun untuk para pekerja konstruksi. Serta ada ini juga Pak Dirjen, Pak Iwan, memang ada masalah seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi, memang masa kontraknya itu TFL itu kan 3 bulan, 4 bulan ya. *Nah*, sementara kadang-kadang mereka kerja sampai 7 bulan, 9 bulan. Mungkin bisa di bijaksanain terkait apa namanya masa kontrak ini untuk para fasilitator.

Kemudian, untuk program padat karya, *alhamdulillah* semua selesai dan itu membantu langsung masyarakat kami di Kalimantan Timur. Untuk terkait 2022 ini kami juga mengundang, ya, mengajak para Bapak Dirjen ya, Pak Direktur untuk bisa bersama-sama mengunjungi, ya, menyaksikan apa yang sudah Bapak bangun ya, di Kaltim. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan waktu di tahun ini untuk sama-sama mengunjungi, syukur-syukur bisa meresmikan.

Kemudian terkait Progres Program Tahun 2023 untuk Bina Marga, kami ingatkan kembali kemarin kita sudah setuju terkait akses Pelabuhan Kenyamukan Sangatta agar bisa menggunakan sisa lelang dan bisa kemudian dilaksanakan di awal tahun ini, karena kalau akses pelabuhan ini tuntas maka Pelabuhan Kenyamukan yang merupakan tol laut, Pak Jokowi bisa fungsional ya.

Kemudian, percepatan lelang juga terkait ruas jalan dari batas kota Tenggarong, Senoni, ke Kota Bangun agar segera, Pak, kalau yang lainnya memang sudah tuntas di 2022 cuma segmen ini memang rusak, berikut juga segmen dari Kota Bangun ke Gusik, kemudian ke Simpang Blusuk, Simpang Blusuh ke perbatasan Kalteng, termasuk juga Simpang Blusuh ke Melak, juga lanjutan dari Tering ke Long Bagun. *Nah*, ini agar bisa ada percepatan lelang dininya, Pak. Juga percepatan lelang di ruas Kota Bontang, Sangatta, Simpang Perda. Karena hanya segmen ini memang yang belum tuntas terkait di jalan nasional yang di Kaltim. Mudah-mudahan bisa dipercepat lelangnya.

Kemudian untuk cipta karya, kemarin kita juga sudah setuju untuk Program 2023, yaitu SPAM di Mahakam Ulu, dan salah satu kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, airnya masih dari air Sungai Mahakam, agar bisa terwujud di tahun ini SPAM air bersih di Mahakam Ulu. Kemudian, lanjutan Kotaku skala kawasan yang di Bontang yang pernah dibangun oleh PUPR jangan sampai apa namanya mangkrak ini bisa dilanjutkan tahun ini, karena sebelumnya juga sudah disetujui.

Kemudian, terkait rehab sekolah juga di beberapa kabupaten kota bisa dilaksanakan di Tahun 2023 ini. Kemudian untuk sumber daya air, terima kasih Pak Menteri, pengendalian banjir Sangatta sudah kita setuju dan tadi juga sudah disampaikan kembali di paparan, Pak Menteri, mudah-mudahan ini terus berlanjut karena mungkin permasalahan banjir Sangatta ini *nggak* bisa cuma selesai tahun ini, tapi harus ada kemudian *master plan* pengendalian banjir Sangatta ke depannya agar masalah banjirnya bisa tuntas.

Kemudian, terkait rehab daerah irigasi juga kami mohon untuk tahun ini dilaksanakan, karena kemarin juga sudah disetujui untuk masuk dalam Program 2023. Kemudian lanjutan pembangunan sumber air baku yang di Sangkulirang juga udah disetujui kemarin terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan segera tahun ini termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus yang banjir apa namanya selama ini terjadi banjir di kota Samarinda.

Sementara untuk perumahan kami harapkannya rumah susunnya juga bisa terus berlanjut tahun ini. Dan, fasilitas jalan lingkungan terkait perumahan masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa terus dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Kemudian, terkait Padat Karya untuk Tahun 2023 mudah-mudahan bisa berjalan lebih awal dan bisa membantu perekonomian masyarakat, dan juga memperbaiki kualitas lingkungan, juga infrastruktur lingkungan di Kalimantan Timur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Irwan sudah, terima kasih, Pak Syarief, bersiap-siap Pak Syahrul Aidi.

**F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore dan selamat sejahtera,

**Yang saya hormati Ketua Komisi V dan beserta Pimpinan,  
Bapak Menteri beserta jajaran yang saya banggakan,  
Rekan-rekan Anggota Komisi V,**

Yang pertama, yaitu kalau berkaitan dengan Evaluasi Tahun 2023 ya, eh 2022. Yang artinya pertama berkaitan dengan masalah perumahan itu, itu mungkin itu salah satu yang mempercepat untuk masuk surga, Pak, karena setiap kita berkunjung selalu diberikan apresiasi dan terima kasih. Jadi, saya pikir mungkin Pak Menteri selalu segar ini, ini salah satu juga yang didoakan, Pak, para penerima rumah ini. Ya tentu kita berharap ini lebih banyak lagi.

Baik, beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Pertama, saya kaitan dengan beberapa ada di Bina Marga kemarin saya lihat sudah masuk tetapi hilang kembali berkaitan dengan perbaikan jalan di Sintete itu, Pak, yang menuju ke pelabuhan. Dan, itu sudah beberapa waktu, sudah bertahun-tahun juga diusulkan, tahun yang lalu juga masuk tapi kemudian hilang lagi. Dan, itu kan cuma sekitar 5 kiloan itu dan itu sangat memang betul-betul rusak parah di wilayah Kabupaten Sambas.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan saya berharap berkaitan dengan pelebaran jalan Senggiring, Pinyuh, sampai Mempawah, Mempawahnya sudah tertangani. Ini juga tentu untuk ke depan perlu untuk menjadi perhatian kita, karena itu masih belum memenuhi jalan nasional, masih sekitar baru bukannya 6 meter itu.

Kemudian kaitan yang lain saya kira, pertama juga saya ucapkan terima kasih ya, sekarang sudah berlangsung pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, kemudian Jembatan Kapuas 1 sudah berjalan dengan baik, untuk itu tentu menjadi perhatian.

Yang kedua, berkaitan dengan Cipta Karya saya mendapat ini, Pak Menteri, kemarin kebetulan dititipin dari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan penataan daerah Sekumpul itu, Pak, yang tahap 2 dengan tahap 3-nya masih belum dilaksanakan. Sedangkan, memang di situ merupakan satu kawasan, sekarang itu menjadi satu tempat, kawasan boleh

sudah masuk ke wisata *religious* setiap Haul Guru Sekumpul itu, tidak kurang dari jutaan orang yang hadir di situ. Tapi, sampai saat ini kelanjutan itu belum terlaksana, kemarin saya akan sampaikan ini dari Pak Bupati, kebetulan di sini tidak ada yang dari Kalsel kebetulan kami dari Kalimantan beliau titipin itu kaitan dengan itu.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kegiatan padat karya. Yang pertama masalah saya ada satu, Pak Menteri, yang sebenarnya bagi kami cukup baik itu, berkaitan dengan ABSAH itu, Pak. terus terang saja kita di Kalimantan kalau berkaitan dengan sumur bor itu *ndak* bisa, Pak, sampai ratusan meter pun tetap keluar airnya kuning. Sedangkan satu-satunya memang sekarang masyarakat terutama pesisir itu, ya menggunakan ya galon itu dan kemudian ya tentu bak-bak air. Makanya ABSAH yang diluncurkan kemarin itu sangat bermanfaat dan saya terus terang saja kewalahan banyak yang mengusulkan itu, dari pondok pesantren, masjid. *Nah*, tetapi, saya kira ini perlu dipikirkan ulang terutama di daerah-daerah pesisir, Pak, berkaitan dengan itu.

Kemudian kaitan dengan masalah perumahan, saya juga di daerah saya itu mengalami persoalan yang cukup mendasar. Tadi juga saya sudah bicara dengan Pak Dirjen, ya harus karena ini berkaitan dengan bencana alam harus ke BNPB, ya. Berkaitan dengan masalah banyak rumah kita itu di sana di pinggir, kemarin sudah ditangani oleh Kementerian PUPR ada sekitar 40 rumah tapi masih banyak, Pak, yang di kawasan daerah dari Sempadan Laut itu yang berhadapan. Itu di daerah Kabupaten Kubu Raya itu kemarin terkena juga musibah sekitar 60 rumah yang hancur, ya, sehingga itu mereka kehilangan tempat tinggal. Tapi, ini merupakan mohon perhatiannya ke depan.

Kemudian, berkaitan dengan perumahan BSPS, kemarin itu baru turun yang apa, tentang masalah kemiskinan ekstrim. Saya pikir ini memang perlu cepat ini, Pak, sampai saat ini memang masih sesuai dengan apa yang sudah menjadi alokasi itu belum, belum, belum bisa, belum direalisasikan itu. Baru yang, yang untuk menangani kemiskinan ekstrim itu. Saya kemarin ya katanya menangani kemiskinan ekstrim itu baru sekitar berapa. *Nah*, sehingga ini mungkin yang lain masih banyak yang belum diluncurkan, berkaitan dengan itu memang perlu untuk penanganan lebih cepat. Karena memang pengalaman kami beberapa tahun ini ada keterlambatan mungkin karena waktunya yang perlu penyesuaian.

Kemudian berkaitan dengan masalah bina marga, Pak, yang berkaitan dengan padat karya sampai saat ini kita belum mendapatkan. Saya berkali-kali juga ingin mungkin karena Kepala Balainya baru berkaitan dengan masalah yang padat karya kemarin itu, supaya bisa koordinasi lah lebih lanjut, supaya titik-titiknya itu kita juga bisa mengetahui. Dan, kita berharap memang padat karya itu bisa menyerap terhadap terutama pekerja di lokasi tersebut. Ini tentu menjadi harapan bagi kita semua.

Kemudian, kaitan dengan masalah cipta karya juga itu kaitan dengan itu, Bu. Yang kemarin, yang kita usulkan katanya sudah dimasukkan di dalam perencanaan, penataan pemakaman Kesultanan Pontianak itu. Cuma *ndak*

tahu saya sampai sejauhmana realisasinya untuk di 2023. Termasuk berkaitan dengan air bersih.

Saya kira ini beberapa hal yang kaitan yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Dan, saya akan menyampaikan amanah ini yang perlu untuk kami sampaikan kepada Pak Menteri dari Kabupaten Banjar ini.

Terima kasih.

**F-PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Pimpinan, izin boleh sekalian menyerahkan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Boleh sekalian, Bu Sarce, Bu Cen Sui Lan, silakan, silakan, ya. Ini warung sudah tutup masih banyak datang ini, orderan, padahal sudah *last order* tahun lalu ini. Silakan Bu Cen, ya 2024, itu buat 2024 Pak Menteri.

Baik,

**F-P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Pak, sebentar saya lupa menyampaikan tadi, sedikit saja kaitan dengan cipta karya, kaitan dengan masalah sampai sekarang juga tidak kelihatan, Bu. Kemarin berkaitan dengan masalah rehab sekolah itu, Bu, dari 14 sudah terverifikasi 7 tapi kemarin kita koordinasi itu di Kabupaten Kubu Raya dan memang sekolahnya sangat memprihatinkan.

Saya kira itu saja tambahan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Syahrul, silakan, ya, bersiap-siap Pak, siapa lagi tadi itu, Bu Cen sudah belum? Sudah ya, siap-siap Pak Dewo.

**F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta jajaran,**

Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Menteri kemarin ketika peresmian tol di Pekanbaru-Bangkinang saya tidak bisa menemani Pak Menteri dengan Pak Presiden, kebetulan melaksanakan umroh, Pak Menteri. Dan Saya dengar banyak berkahnya dengan kehadiran Pak Presiden dan Pak Menteri di sana mudah-mudahan bisa terealisasi. Dan, harapan masyarakat Riau tentunya, kehadiran Pak Presiden dengan Pak

Menteri di sana juga bisa memberikan pembangunan infrastruktur lebih besar lagi untuk Riau tentunya.

Sebagai daerah penghasil devisa bagi negara, Riau luar biasa, Pak Menteri, sebagaimana kita tahu ada minyak di atas, minyak di bawah, tetapi infrastrukturnya cukup memprihatinkan. Tapi, *alhamdulillah* dalam beberapa tahun ini karena kehadiran kami di Komisi V ini cukup memberikan warna dan pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur Riau.

Untuk jalan nasional banyak pelaksanaan preservasi sekarang secara *multi years*, ya. Pekanbaru-Batas Sumbar, Pekanbaru-Kiliran Jao, itu sedang dilaksanakan begitu juga di Pekanbaru-Rengat, ya, sedang dilaksanakan. Cuma kemarin Pak Dirjen, saya dengar meninjau daerah ke Bangkinang, Pak Dirjen, ke Bangkinang melihat rencana pembangunan jalan dua jalur di Kota Bangkinang.

Kota Bangkinang itu terlalu pendek, Pak Dirjen, maka perlu jalan dua jalur sehingga nampak kotanya lebih panjang. Cuma saya mendapat informasi itu di bintang pula, katanya tinggal 10 miliar. Mudah-mudahan bintangnya segera dibuka, Pak Menteri, harapan dari Pak Bupati itu jalan dua jalurnya pas samping kantor Balai Bupati setelah itu satu jalur lagi. Kalau dua jalur ini akan terbuka aksesnya apalagi kota Bangkinang nanti menjadi daerah persinggahan bagi jalur tol tentunya. Harapannya bisa mendukung apa namanya untuk akses jalan tol.

Kemudian untuk khusus jalan tol, Pak Menteri, mohon saya diberikan akses untuk koordinasi dengan BUMN, Pekanbaru Bangkinang itu ada keluhan dari masyarakat ada akses-akses jalan masyarakat ke kebun mereka yang dulu dijanjikan untuk dibangun, dibangun oleh HKI atau HK tetapi belum dibangun. Saya kemarin mendata beberapa mudah-mudahan itu bisa dikomunikasikan dengan HK nantinya, sehingga keberadaan tol itu tidak justru akan menyusahkan masyarakat.

Kemudian, Pak Dirjen kemarin sebelum ke Bangkinang ada jalan pas depan rumah saya, kalau saya keluar dari rumah itu jalan akses. Ini pengerjaannya di 2020, eh 2019, Pak Dirjen. Itu bongkar pasanginya sudah lebih 10 kali semenjak dibangun. Pas waktu pemeliharaan saja itu dibongkar pasang sampai tiga kali itu, Pak Dirjen, sampai sekarang itu saya hitung hampir 10 kali. Itu saya, pas pelaksanaan itu saya sempat ditegur oleh salah seorang kontraktor. Saya bertamu ke rumah seseorang, saya ditegur, "Pak Syahrul ini pengerjaan tidak benar, masa kerukan itu dimasukkan lagi ke dalam" katanya. Waktu itu saya diam saya sempat sampaikan ke Pak Slamet waktu itu jadi Kepala Balai, dan betul sampai sekarang sudah sampai 10 kali, Pak. Dan anehnya yang melaksanakan selalu dapat kegiatan. Dan, informasinya memang pelaksana kegiatan di balai jalan ini orang-orangnya itu-itu saja dan sehingga tidak ada kompetisi. *Nah*, mudah-mudahan ke depan akan lebih ada kompetisi, Pak, untuk pengerjaan jalan sama seperti pengerjaan jalan yang preservasi. Preservasi Pekanbaru-Kiliran Jao ini, juga setelah dibangun tidak lama rusak lagi, entah apa karena tonase atau kualitas dari pengerjaan yang ada di Pekanbaru Bangkinang, Pak.



Kemudian untuk Sumber Daya Air, ini evaluasi ini beberapa tahun dan beberapa kali saya sampaikan. Rasio yang diberikan kepada Riau untuk penanganan sungai, Pak, Turap Tebing. Saya selalu menyampaikan ada 5 sungai menjadi kewenangan BWS 3, Pak, sungai besar saja belum yang kecil-kecil. Tapi rasio yang didapatkan untuk nahan tebing ini saya rasa kurang adil, Pak, dibandingkan dengan yang lain. Mohon perhatian, ini evaluasi dan mudah-mudahan menjadi kebijakan yang lebih bagus lagi berpihak kepada masyarakat Riau khususnya, Pak. Karena kasusnya itu setiap saya turun reses, turun ke masyarakat kalau di bantaran sungai itu selalu itu saja yang menjadi permasalahan. Dan, anehnya sudah saya sampaikan ternyata belum juga masuk dalam rencana DED-nya, Pak, permasalahan selalu tidak ada DED. DED yang ada tidak dibangun alasannya masih ada DED yang belum dibangun. Ya, karena diberikan hanya lima titik per tahun mana mungkin bisa terbangun semuanya, Pak. Dan, ada yang kondisi-kondisi yang sangat kritis. Mohon, Pak, bisa untuk ke depannya lebih diperbanyak lagi.

Kemudian untuk ABSAH, Pak, saya mendapatkan pola padat karya yang ada di ABSAH ini beda dengan padat karya yang ada di P3TGAI atau padat karya yang lain. Keluhan dari teman-teman balai katanya itu semua tidak ada dana SPPD dan operasional, saya begitu tahu tapi intinya tidak sama, Pak, mohon disamakan. Sehingga kalau daerahnya jauh orang Balai agak kurang mau kalau kami taruh daerah-daerah jauh begitu, padahal itu yang membutuhkan. *Nah*, kalau bisa ini kan lebih fleksibel dalam apa namanya penggunaan anggarannya.

Kemudian, untuk cipta karya terima kasih Bu Dirjen, *alhamdulillah* pengerjaan sekolah kita secara umum saya lihat bagus. Dan, saya hanya minta, Pak, sekali-sekali dikirimkan untuk peresmian ini kalau *nggak* bisa Pak Dirjen ya, Pak Direktur lah untuk beberapa sekolah atau apa. Mohon juga ini memberikan dukungan ke kami juga *nih*, Pak, kalau biar bisa hadir lagi 2024 di sini, Pak Menteri.

Kemudian untuk SPALD-S, Bu Dirjen, SPALD-S khususnya di daerah kalau di Dapil saya itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir ini kan tanahnya itu tanah gambut, sehingga biaya pembangunan SPALD-S itu *tak* cukup 10 juta satu titik, Bu. Jadi, mudah-mudahan dengan kalau tidak salah nilainya sekarang 350 juta. itu jangan dipatok *gitu* lihat kondisi juga kebutuhan infrastuktur di sana. Karena membangun pondasi saja di Inhil itu, secara umum itu sama dengan membangun satu rumah tipe 36 di Pekanbaru misalnya atau di Kampar. Jadi, mohon ini lebih fleksibel.

Kemudian terakhir, yang ingin saya sampaikan juga di Inhil, Pak. Inhil ini adalah pusat produksi kelapa dunia bukan hanya kelapa di Indonesia, kelapa dunia. Saat ini abrasi luar biasa di pantai-pantai di Inhil. *Nah*, kemarin ada satu titik yang kita anggarkan di 2023 tapi tertunda, lagi-lagi tidak ada DED. Mohon ini DED-nya bisa ditampung Tahun 2023 ini lebih banyak, Pak, jadi tidak hanya satu titik. Jadi, penanganannya SBSN-nya lebih bisa dimasifkan, karena akan mengancam ekonomi masyarakat yang ada di Inhil. Banyak daerah yang ada di Inhil itu sebagai penghasil kelapa yang di dunia. Mudah-mudahan ke depan

akan lebih baik kebijakan-kebijakan kepada Pak Sekjen, yang, Pak Dirjen juga selain Pak Menteri, mohon keberpihakan kepada daerah Riau khususnya.

Saya selalu diberikan apa, Pak, bahan "Pak Syahrul protes dong ke Kementerian PUPR harusnya Riau mendapatkan porsi yang lebih besar sebagai imbalan atas devisa yang disumbangkan oleh Riau" katanya. Pada ada kesempatan ini kami sampaikan, Pak, dan mudah-mudahan 2024 sebagai tahun terakhir periode ini kami di sini bisa lebih tertampung untuk lebih besar lagi.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih, Pak Syahrul. *Eh* Mas Dewo *nggak* ada ya, Pak Hamka dulu Pak Hamka, silakan Pak Hamka, Pak Hamka minta duluan, silakan, habis Pak Hamka Pak Bob kalau Pak Dewo *nggak* ada ya.

**F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY. MS.):**

Izin.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,**

Pertama, agenda kita pada hari ini adalah Evaluasi Program 2022 dan sekaligus Pak Menteri sudah melaporkan Program 2023. Pimpinan, saya hanya men-*stressing* di sini bahwa evaluasi itu, itu memerlukan proses panjang buat kita sebenarnya bukan hari ini saja. *Guideline* yang sudah diberikan oleh Pak Menteri itu adalah bahan untuk kita lakukan evaluasi lanjutan dalam aspek pengawasan. Itu yang ingin saya sampaikan, apapun itu tentu kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan siapapun itu hampir seluruh rakyat Indonesia tentu mengapresiasi apa kerja-kerja Pak Menteri. Tapi namun demikian, Pak Pimpinan, kita memerlukan sesuatu akuntabilitas daripada pengakuan-pengakuan rakyat melalui kita. Setiap saat tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah tapi kita harus didukung dengan data akuntabilitas akibat *statement* kita kepada pemerintah. Oleh karena itu, saya hanya menitikkan, Pak Pimpinan, ini adalah bahan kita untuk menindaklanjuti proses pengawasan kita dalam fungsi ke DPR-an kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hanya berharap kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya tolong dilaksanakan apa yang kami sudah sepakati bersama Bapak-bapak. Apakah program padat karya dan sebagainya tolong ditindaklanjuti. Tidak perlulah kami harus menelepon Bapak-Bapak, tidak perlulah kami harus

mengklaim kiri-kanan, ayo mari kita sama-sama. Tanggung jawab kami apa? Dan, tolong di-*deliver* saja apa yang kita sudah sepakati, *ndak* usah ada yang macam-macam. Saya juga merasa malu kalau saya selalu saya telepon kepada Bapak-Bapak sepertinya saya mau meminta-minta dan sebagainya. Ini saya hanya ingatkan bahwa tolong dilanjutkan saja apa yang sudah disepakati. Ini, Pimpinan, supaya kita paham fungsi kita masing-masing.

Saya kira itu yang paling penting dari sisi evaluasi, saya tidak masuk angka-angka dulu, Pak Ketua. Nanti pada saatnya nanti akan saya lakukan *exercise* atau *exercise* dalam satu kegiatan tertentu, apakah kita melakukan proses pengawasannya itu dengan baik atau tidak. Kita juga menjadi beban kepada rakyat. Itu kira-kira sebagai pegantar dari apa yang ingin saya sampaikan.

### **Pak Menteri yang saya hormati,**

Ada tiga poin catatan saya pada saat sekarang ini. Yang pertama, saya *stressing* lagi tolong ditindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita pada waktu-waktu yang lalu. Yang kedua, ada aspirasi dari fraksi, Pak Menteri, aspirasi itu terkait masalah fungsi Bendungan Waymuli di Nusa Tenggara Timur. Enam tahun yang lalu katanya sudah dilaksanakan tetapi sampai saat sekarang ini belum bisa optimal difungsikan oleh rakyat terutama di lokasi Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elor Manggarai Timur. Ini banyak hal yang mungkin bisa kita selesaikan, ini aspirasi yang masuk dari sana melalui fraksi yang diamanahkan untuk saya menyampaikan pada kesempatan ini. Rakyat di sana sangat membutuhkan dan 6 tahun yang lalu sudah dibangun tetapi tidak berfungsi dengan optimal, sehingga rakyat sangat membutuhkan aliran air dari bendungan itu. Saya tidak tahu bahwa prosesnya seperti apa yang jelas 6 tahun lalu bendungan itu dibangun. Tolong kita perhatikan, kita evaluasi mengenai manfaat dan fungsinya.

Cukup banyak bendungan yang sudah berhasil kita lakukan dan sudah bermanfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pertanian. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita lihat sampai sejauhmana keluhan masyarakat ini apakah benar atau tidak *wallahualam* kita akan sama-sama untuk bisa selesaikan dengan baik.

Kemudian yang terakhir, terkait padat karya, Pak Menteri, sehubungan dengan penyelesaian persoalan miskin ekstrim. Saya melihatnya bahwa apa tidak salah kalau bisa disatukan saja kegiatan padat karya dengan BPS itu melalui kami, karena kami juga sudah melihat ternyata apa yang dilakukan di bawah itu tepat guna. Misalnya miskin ekstrim di salah satu kabupaten yang di Dapil saya Kabupaten Jeneponto dibangun jalan. Memang di situ miskin ekstrim hampir sama dengan PISEW tetapi syaratnya yang berbeda.

Maksud saya program pada karya ini adalah kita satukan saja agar supaya apa namanya penyampaian kepada masyarakat ada yang berbeda dari Pak Hamka sampaikan, ada juga yang dilakukan oleh kementerian. Ini yang saya maksudkan mari kita sinkronisasi, kalau misalnya BPSP pangkas, jatah BPS-nya kasih semua saya kasih semua, Pak Menteri. Itu yang saya

maksudkan, jangan berbeda-beda ada yang satu laksanakan a, ada yang laksanakan b.

Saya kira, Pimpinan, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk kita dan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

*Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Pak Hamka terima kasih. Selanjutnya, soal pengawasan ini memang kita akan, nanti kan akan kita tindaklanjuti lagi (suara kurang jelas) dengan Eselon I dan seterusnya kita dalami di sana.

Baik, karena tadi sudah *tak* geser dulu ke Bob, abis Bob, baru Mas Dewo ya, silakan Bob.

#### **F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):**

Terima kasih.

**Yang saya hormati Ketua Komisi V beserta Wakil Ketua Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri PUPR beserta jajarannya,**

Saya langsung saja, Pak, mengenai kalau Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 pasti kita apresiasi Pak Menteri, karena kita mendapat dampak dari program-program padat karya yang Pak Menteri, langsung turunkan kepada masyarakat. Saya langsung ke Program Kerja Tahun 2023, Pak Menteri, saya ada satu usulan saya mengenai jalan nasional, Pak Menteri, sudah 2 tahun ini tidak ditampung oleh Dirjen Bina Marga. Itu pelebaran jalan nasional Serdang Bedagai, Pak Menteri, ini 2-3 tahun kalau *nggak* salah saya sampai hari ini, Pak Menteri, *nggak* masuk dalam usulan saya ini. Jadi, saya pun heran apa kira-kira kesalahan saya ini makanya program saya 3 tahun yang saya usulkan sampai sekarang *nggak* masuk-masuk ini, Pak Menteri.

Terus yang kedua, Pak Menteri, ini sebagai catatan Pak Menteri, supaya kita evaluasi ke depan. Di Sumatera Utara ini kan begitu banyak jalan tol dibangun, Pak Menteri, tapi ini nanti ada satu contoh *nih* ruas jalan tebing ke batubara *nih*, Pak Menteri, yang dikerjakan oleh Waskita ini, Pak Menteri, Waskita Beton. Ini banyak laporan kepada saya sebagai Anggota Komisi V, saya takut nanti ini jalan ruas tol ini yang akan kita resmikan akan menjadi dampak akibat nanti masyarakat atau pengusaha-pengusaha itu akan demo, Pak, karena masih banyak yang belum dibayar oleh pihak BUMN ini, Pak. Ini selalu satu jadi catatan, Waskita Beton ini meninggalkan banyak utang kepada pelaksana-pelaksana sekitar Provinsi Sumatera Utara, Pak. Ini jadi catatan kita, Pak, jangan nanti waktu kita resmikan jalan tol ini nanti diblokir, Pak, sama

pihak pelaksana-pelaksana yang ada di, yang bekerja sama selama Waskita selama ini.

Mungkin itu saja, Pak Menteri, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri begitu hebat jalan tol yang ada di Sumatera Utara, tapi kita mau dalam peresmian nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan dampaknya membuat malu kita, Menteri PUPR, walaupun pelaksana ini adalah BUMN, tapi pelaksana itu tahunya ini Menteri PUPR. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak, silakan, Pak Menteri ke, kita tunggulah. Ya, Mas Dewo mau bicara nunggu Pak Menteri kan? Oke oke. Baik Mas Dewo silakan. Setelah Mas Dewo berisap-siap Pak Mulyadi.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan, langsung saja.

**Pak Menteri yang saya hormati dengan seluruh jajarannya.**

Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak Menteri PUPR berkenan hadir di daerah pemilihan saya di Kabupaten Pati. Dan, yang merasa saya terhormat, Pak Menteri berkenan mampir di rumah saya.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Ada duren sukun, Pak.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya yakin Pak Menteri sangat terkesan karena ada duren sukun yang enak sekali. Saya jamin tidak kalah dari duren sintang, Pak. Di Kabupaten Pati sekarang ini memang dilanda banjir hampir separuh wilayah Kabupaten Pati, yaitu wilayah Pati bagian selatan itu tergenang banjir, termasuk di kampung saya. Kalau Pak Menteri hadir didampingi Pak Dirjen SDA, kemudian juga Direktur Pantai dan Sungai, juga Kepala Balai, ingin memastikan apa penyebab banjir di sana, itu sangat luar biasa manfaatnya, karena untukantisipasi banjir di tahun-tahun mendatang supaya tidak terjadi lagi.

Dan, dari kunjungan Pak Menteri pada saat itu, sehingga direncanakan beberapa program untuk mengatasi banjir. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu program karena sudah berada di perencanaan BPWS di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Yang paling signifikan dari beberapa program yang direncanakan itu adalah pelebaran sungai di bagian muara, di situ tidak hanya mengatasi banjir tetapi juga mengatasi persoalan tambat kapal para nelayan dan para pengusaha kapal yang sudah berjalan puluhan tahun bahkan

mungkin ratusan tahun kondisinya semacam itu, sementara kontribusinya terhadap negara juga sangat besar melalui PNBP. Jadi kalau program itu nanti dilaksanakan oleh Pak Menteri PUPR, ini adalah sejarah baru bagi mereka yang perjuangan panjang tapi yang memberikan solusi adalah Pak Menteri PUPR. Untuk itu, atas nama warga Kabupaten Pati saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yang berikutnya kepada Pak Menteri PUPR, saya mengikuti berita di media dan juga beberapa kawan yang ada di Kota Solo, bahwa akan ada rencana pembangunan jalan tol di lingkaran Solo. Menurut hemat saya itu bagus sekali dan memang dibutuhkan. Saya ini lama tinggal di Solo tahu persis situasi kondisi lalu lintas Surakarta dan sekitarnya. Wacana untuk pembangunan jalan lingkaran Solo, baik itu apakah jalan arteri nasional ataukah jalan tol memang sudah di wacanakan kira-kira 15 tahun yang lalu, tetapi itu hanya baru wacana tidak pernah ada tindak lanjut berupa studi, berupa perencanaan, apalagi *action* untuk pelaksanaan konstruksinya, tapi akhir-akhir ini wacana itu muncul kembali.

Harapan saya sebagai orang Kota Surakarta juga, supaya ini tidak hanya sekedar wacana tetapi ada langkah-langkah konkrit sampai merealisasikan tol lingkaran Surakarta ini. Karena Kota Surakarta itu sudah di, yang sebelah timur dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo, kemudian yang sebelah barat itu sudah perumahan yang sangat padat yang tidak memungkinkan untuk lalu lintas berkembang menjadi kota atau perkotaan di sekitar itu, maka perlu hadirnya jalan lingkaran di Kota Surakarta.

Namun demikian, Pak Menteri, apabila ini direalisasikan meskipun itu sebuah keburuhan jika jalan tol Demak-Tuban ini juga tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan satu pertanyaan besar bagi masyarakat Pantura khususnya. Yang memang secara wajar, secara lazim jalan tol di Pantura ini memang harus ada, karena jalan ini merupakan *backbone* perekonomian di Pulau Jawa. Yang sudah diwacanakan cukup lama, yang menurut masyarakat di sana merupakan sesuatu yang wajar tetapi tiba-tiba di Kota Surakarta akan dibangun jalan tol dan itu didahulukan misalnya seperti itu, itulah yang menjadi sesuatu yang tidak tepat.

Alangkah baiknya walaupun yang Solo ini dilaksanakan yang Demak-Tuban itu juga dilaksanakan, soal waktu itu barangkali Demak-Tuban didahulukan supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai hadirnya jalan lingkaran Solo ini merupakan satu muatan politik, padahal itu betul-betul satu kebutuhan itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri.

Yang berikutnya, kita itu ingin sekali ada satu kepastian Inpres yang sekarang ini sedang digodog ya, sedang berproses. Kemarin kami rapat dengan sekjen, sekjen menyampaikan bahwa Inpres sedang diproses begitu tetapi sudah sejauh mana Instruksi Presiden untuk memastikan bahwa infrastruktur yang berada di daerah, baik di kabupaten ataupun provinsi utamanya infrastruktur jalan yang perlu mendapatkan bantuan dari pusat itu bisa berjalan, yaitu dengan berharap payung hukumnya Inpres ini bisa segera

di-*clear*-kan jadi sejauh mana Inpres ini. Sebagai implementasi juga terhadap Undang-Undang tentang Jalan. Jadi, Undang-Undang tentang Jalan ini kan isu utamanya adalah bagaimana pemerintah pusat punya kewenangan untuk membantu, untuk menangani jalan kabupaten atau jalan provinsi, atau jalan poros desa yang dalam kondisi rusak parah di mana pemerintah daerahnya tidak mampu. Tapi, kalau tidak ada tindak lanjut, baik berupa peraturan pemerintah atau instruksi presiden, Undang-Undang tentang Jalan yang memiliki isu yang strategis ini yang sangat diharapkan daerah ini tidak akan bisa berjalan, maka saya mendorong supaya Inpres ini segera di-*clear*-kan.

Yang berikutnya adalah tentang Undang-Undang SDA, Undang-Undang Sumber Daya Air itu kan sudah ditetapkan diputuskan sejak Oktober 2019. Ada empat isu penting di situ, di sana tetapi satu isu pun belum terlaksana oleh karena belum ada aturan turunannya, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan apapun itu belum ada yang terbit yang untuk memastikan. Paling tidak salah satu isu tersebut itu bisa berjalan di antaranya adalah soal penataan atau tata kelola air. Mengingat air kita ini melimpah, Pak, tapi masyarakat untuk menggunakan air sebagai air baku itu banyak kendalanya seolah-olah air kita ini langka, maka perlu hadirnya negara melalui undang-undang ini. Saya minta supaya Undang-Undang SDA ini mendapatkan perhatian khusus untuk bisa segera diimplementasikan.

Yang terakhir, untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 yang sangat saya pesankan sekali lagi kepada Pak Menteri adalah supaya pelaksanaan setiap program, setiap kegiatan, itu memastikan terciptanya ekosistem konstruksi yang baik. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di situ, itu merasa *happy* dalam koridor peraturan perundang-undangan. Sampai penyedia makan, penyedia minum untuk pekerja saja bagaimana supaya tidak dirugikan. Apalagi sampai sub kontraktor jangan sampai tagihannya dipersulit, supply material jangan sampai tagihannya dipersulit. Jadi, pemerintah dalam hal ini melalui Satker atau KPPK membantu mereka yang ikut sama-sama mendukung pekerjaan konstruksi itu menjadi bagus. *Supplier* diperhatikan bagaimana supaya pembayarannya lancar, subkon juga begitu, selain daripada *quality control*. Jadi, ekosistem pelaksanaan konstruksi ini saya wanti-wanti, saya pesan kepada Pak Menteri supaya di tahun anggaran 2023 betul-betul bisa tercipta.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Dewo, Pak Mulyadi silakan.

**F-P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, M.M.A.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Wakil Ketua Komisi V yang saya hormati,  
Serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya cintai dan saya banggakan,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya hormati dan saya banggakan,**

Tentu saya sudah membaca, Pak, terkait materi bahan rapat yang hari ini kita bahas. Pertama, yang harus saya sampaikan adalah apresiasi, Pak, apalagi capaian penyerapan anggarannya 93,7% kalau tidak salah. Dan, hal-hal yang membuat saya semakin memaklumi Indonesia yang begitu besar dengan anggaran yang Bapak kelola, ujungnya saya kira sangat terbatas, Pak. Karena begitu besar di Indonesia dan begitu besarnya harapan masyarakat, maka suka tidak suka Bapak harus berikan skala prioritas yang lebih maksimal. Tetapi namun demikian, buat kami Bapak sedang memberikan warna dan *legacy* yang sangat luar biasa melalui direktorat-direktorat yang Bapak pimpin.

Kemudian, Pak, sebagai warga Dapil juga saya berterima kasih, Pak, atas diresmikannya penggunaan Bendungan Ciawi, Dry Dam Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan keberadaan bendungan itu menjadi bagian dari upaya terbaik mengatasi banjir Jakarta, Pak. Dan, tentu kami di wilayah yang ditempatkannya proyek itu betul-betul juga bisa mendapatkan manfaat terutama untuk menjadi destinasi wisata dan mudah-mudahan pengembangan-pengembangan lainnya, Pak. Dan, kami mengapresiasi dan terima kasih juga bahwa tidak terdengar, Pak, ya dampak selesainya pembangunan Ciawi-Sukamahi itu masukkan-masukan dari masyarakat terkait hal-hal yang mohon maaf misalnya masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi, Pak.

Termasuk kami mengucapkan terima kasih mengatasnamakan warga untuk program-program aspirasi yang didedikasikan melalui kami sebagai rekanan kerja dari Komisi V. Namun demikian, Pak, kami tetap ingin memberikan penekanan terkait pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan. Saya selalu sampaikan pembangunan harus selalu tepat sasaran, tepat waktu jangan sampai *delay*, karena berkonsekuensi fungsi dan *cost of fund*, kemudian tempat anggaran jangan sampai ada peningkatan-peningkatan anggaran yang akhirnya sekali lagi menjadi mahal biayanya, dan tentu meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* di daerah, Pak. Supaya apa? Supaya daerah betul-betul bisa merasakan manfaat dan menjaga setiap alokasi pembangunan yang sudah diselesaikan oleh kementerian yang Bapak pimpin. Termasuk kami berharap betul-betul menambah kualitas kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak di kemudian hari, Pak.

Sebagai contoh mohon maaf, Pak Menteri, saya berterima kasih tentang tol yang difungsikan di Cisumdawu misalnya, saya kira itu sangat bagus dan terima kasih. Kami terus berkoordinasi dengan Pak Danang, terima kasih Pak Danang. Tapi kalau boleh, Pak, ya, itu sekarang Cadas pangerannya jadi sepi, Pak, karena melintas ke wilayah tol yang masih digratiskan. Akibatnya apa,



Pak? Ada potensi ini kesan negatif UKM, restoran, menjadi terancam bangkrut misalnya. *Nah*, kalau boleh, Pak, itu segera saja, Pak, di tarif gitu, Pak, jangan seperti jalan tol bersaing dengan jalan non tol gitu. *Nah*, ini penting, Pak, kenapa? Supaya kawasan Cadas Pangeran yang destinasi wilayah Sumedang juga tidak terganggu, Pak, terutama ancaman terhadap keberadaan UKM, restoran, dan segala macamnya itu. Penyelesaian cisumdawu pun saya setuju kalau misalnya tepat waktu, tapi lebih penting tepat mutu, Pak, jangan sampai *grasak-grusuk* tapi mutunya tidak terjamin. Saya kira lebih maksimal dengan pengerjaan yang lebih baik, Pak, sehingga mutu pekerjaan itu juga menjadi semakin maksimal. Termasuk tol Patimban dan seterusnya mudah-mudahan bisa berjalan, Pak.

Sebagai warga Dapil sekali lagi, Pak, kami juga tetap berharap ada solusi terkait penanganan masalah Puncak, Pak. Kalau sekarang ada pembahasan *unsolicited* terkait tol Puncak, saya kira itu juga harus menjadi konsen kita bersama sebagai bagian dari solusi bagaimana macet Puncak bisa segera teratasi, Pak. Termasuk mungkin opsi jangka pendek yang pernah saya sampaikan ke Pak Menteri, untuk melihat Pak, mensurvey bersama Hanjawar menuju wilayah timur Bogor, itu sebenarnya itu opsi tercepat. Kenapa? Karena wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan revitalisasi untuk di sisi Bogornya belum, padahal itu menjadi opsi kalau Puncak tersumbang pasti ke sana, Pak.

Dan, saya selalu ingat walaupun misalnya tol, bahasa Pak Dirjen itu yang selalu saya mengiang-ngiang itu Dirjen Bina Marga, bahwa tol itu menjadi *backbone*-nya ekonomi Indonesia. *Nah*, tapi kami juga berharap *gitu* keberadaan tol betul-betul juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, Pak, ya misalnya mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat supaya juga mereka merasa dilibatkan dalam proyek pembangunan, banyak, Pak, ya saya kira.

Kemudian Pak Menteri, kami mengingatkan untuk Dirjen Sumber Daya Air, Pak Menteri, Pak Djarot. Saya terus diakses oleh masyarakat, Pak, untuk pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurey, Pak. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi tidak *delay* untuk pelaksanaannya. Tapi kami berharap, Pak, itu kan hampir lebih dari 12 desa, Pak, akan direlokasi di dua kecamatan. Dan, kalau mau *ngomong* efek elektoral itu Dapil saya dan itu potensi suara saya pada hilang itu, Pak, kalau dihijrahkan, Pak. Ya saya kira ini beresiko tapi saya demi pembangunan dan ini masuk ke *project* strategis nasional, saya kira itu harus menjadi konsen bersama.

Buat saya catatannya adalah pra, saat, dan paska. Pra pembangunan saya selalu ingatkan libatkan masyarakat dan jangan sampai ganti rugi, Pak, ganti untung, Pak. Saat pembangunan tadi saya senang, Pak, ada ada materi yang Bapak sampaikan lebih dari satu juta yang memanfaatkan program-program padat karya, Pak, padat karya tunai dan seterusnya. *Project-project* seperti pembangunan itu pun libatkan, Pak, masyarakat di wilayah di mana *project* itu dilaksanakan, Pak, supaya mereka punya kemanfaatan dan merasa punya rasa memiliki terhadap keberadaan *project* tersebut. Dan, pascanya kalau itu berkembang kemudian menjadi destinasi wisata dan seterusnya, jadi

venue olahraga dan seterusnya tolong diprioritaskan, Pak, KTP warga sekitar, Pak, supaya tidak ada kecemburuan sosial dan seterusnya.

Terakhir sekali, Pak, saya berharap *project-project* yang sudah Bapak laksanakan termasuk sekarang konsen ke IKN, Mandalika yang sudah selesai, kemudian juga ada beberapa tol yang sudah selesai. Saya berharap bahwa *project-project* itu sekali lagi menjadi *legacy* terbaik, Pak, jangan ditinggalkan masalahnya, Pak. Saya masih diakses, Pak, oleh warga-warga yang tinggal di sekitar tol Jatikarya. "Kapan nih Pak Mul?" Mereka seolah-olah sendiri *nih*, Pak, jadi tolong perhatikan SOP paling tidak pendampingan untuk bisa mencari solusi terbaik setiap proyek yang sudah selesai kita tidak lepas tangan itu, Pak. Maksudnya tetap *concern* untuk membantu supaya mereka juga merasa tidak ditinggal sendiri, termasuk Mandalika dan seterusnya itu harus memberikan manfaat, Pak.

Terakhir sekali, apa kabar tadi saya sampaikan, apa kabar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, ya, sudah ya. Tapi paling tidak revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini, saya sudah bantu sosialisasi, Pak, gubernur, bupati, walikota terkaget-kaget, Pak, dengan revisi undang-undang. Kalimat yang bisa mengintervensi jalan provinsi, kabupaten, desa itu, itu mengagetkan, Pak, para kepala daerah. Maka kami sangat menunggu aturan teknisnya dan bagaimana pelaksanaan dari undang-undang tersebut, di mana pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Itu saja Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran, dan kita semua. Mudah-mudahan terus bisa memberikan dedikasi terbaik dan karya terbaik buat negeri ini.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih, ya Pak Menteri memang jalan daerah revisi Undang-Undang 38/2004 ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini memang banyak dipertanyakan soal Inpresnya, saya dapat informasi ya belum selesai, nanti mungkin bisa dijelaskan, memperkuat apa yang disampaikan Pak Mulyadi tadi.

Selanjutnya Bu Sri Wahyuni, silakan Bu, berhenti dulu makan permennya Bu, silakan Bu. Ya, selanjutnya bersiap-siap Ibu Athari.

#### **F-P. NASDEM (SRI WAHYUNI):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang semuanya,

**Yang saya hormati Ketua dan Bapak-bapak Wakil ketua Komisi v,  
Yang saya hormati rekan-rekan Komisi V,  
Yang saya hormati juga Pak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Saya sedikit saja tadi sudah banyak teman-teman yang menyampaikan. Yang pertama terima kasih, Pak Menteri, kalau bagaimanapun kita harus berterima kasih ini kepada Pak Menteri, bahwa program-program sudah sampai ke Dapil masing-masing. Kalau perkara kuota saya ngikut sajalah, Pak, kalau pas ada anggarannya pasti ditambah sama Pak Menteri, iya *nggak*, Pak?

Terus selanjutnya untuk jembatan gantung, Pak, terima kasih juga sudah jadi dan tinggal peresmian. Cuma ini jembatan gantung kalau di tempat saya itu jadi apa namanya, jadi yang diharap-harapkan masyarakat karena memang di Dapil saya banyak sungai-sungai kecil, di tengah kota saja ada sungai-sungai kecil yang itu membutuhkan jembatan. *Nah*, jadi banyak harapan masyarakat jembatan ini kuotanya bisa ditambah seperti itu, Pak Menteri, kalau bisa dualah, Pak, kalau ada anggarannya.

Selanjutnya untuk pelebaran jalan yang di Kabupaten Ponorogo di Desa Babadan sampai ke Terminal Seloaji, itu sudah rampung, Pak Menteri, tapi kemarin sempat tertunda sedikit beberapa waktu. Dan, saya tanyakan kenapa? Katanya menunggu jembatan itu kering begitu, jadi terima kasih juga untuk itu.

Selanjutnya, saya sudah ajukan juga tertulis untuk kelanjutan pelebaran jalan mengarah ke kota. Tolong nanti, Pak Menteri, kalau anggarannya cukup ada bisa ditambah lah dari 2 km mungkin menjadi 5 km *gitu* ya.

Selanjutnya, Pak Menteri, harapan-harapan ke depan yang paling penting, yaitu untuk bisa koordinasi lebih lebih baik lagi selama ini sudah cukup baik koordinasi antara kementerian dengan kita. Dan, yang selanjutnya untuk balai-balai ini kami minta koordinasinya secara terbuka, artinya kalau dihubungi staf-staf saya tolong jangan dipersulit. Selama ini sudah bagus tapi ke depan untuk apa, kelancaran pekerjaan di lapangan tolong kalau staf saya koordinasi apa namanya ditanggapi dengan baik dan cepat, agar supaya program-program terlaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Saya rasa itu, Ketua, Pak Menteri, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, Bu Sri Wahyuni, selanjutnya Bu Athari, terakhir Pak Irmawan, *oh* ada Bu Neng Eem ya? Oke, makasih.

**F-PAN (ATHARI GAUTHI ARDI):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan, rekan-rekan, dan juga Pak Menteri beserta seluruh jajaran dari Kementerian PUPR,**

Pertama, saya mau ucapkan terima kasih apresiasi buat Pak Menteri dan juga seluruh jajarannya sampai ke balai, terutama balai jalan saya dari Sumatera Barat karena banyak program-program padat karyanya sudah selesai, ada juga program seperti jembatan Sungai Pisang itu sudah rampung dan seperti jalan-jalan yang lain-lainnya itu semua oke.

*Nah*, Pak Menteri, di sini saya ada masukan sedikit. Kemarin itu untuk BPS untuk 2023 ada 20% data yang diambil dari data BKKBN. Setelah dicek ke bawah data ini *nggak* akurat, banyak yang, itu *nggak* sesuai, rumahnya *nggak* ada, lalu tiba-tiba ada yang masuk dalam data BKKBN ternyata udah punya rumah, udah ada mobil, udah layaklah hidupnya. Jadi, saya minta peraturan soal data BKKBN ini ditinjau kembali apakah datanya diperbarui dengan cepat atau dilakukan langkah-langkah supaya data ini bisa akurat, sehingga programnya tepat sasaran. Sebelum-sebelumnya program BPS itu selalu tepat sasaran karena rata-rata datanya diambil langsung dari bawah. Jadi, ada tim yang survei sendiri, lalu nanti ada yang verifikasi juga dari PUPR tapi data BKKBN ini saya rasa agak bermasalah.

Dan juga, Pak Menteri, untuk jalan kemarin dapat info katanya Jalan Kapujan Rimbo Data itu sudah masuk. *Insy Allah* untuk Tahun 2023 itu di Kabupaten Solok, *nah* ada satu aspirasi lagi ini ruas Jalan Muaro Kalabantan-Tanah Badantuang. Ini merupakan jalan akses untuk Kabupaten Sijunjung dan ini akses utama dan juga ini karena jalan nasional beliau minta, kabupatannya minta supaya jalan ini dibikin jalur dua. Karena, Pak, jalan dari Kabupaten Solok ke Sijunjung itu lewat Sawahlunto itu lewat hutan-hutan, sehingga jalur akses Sijunjung ini *nggak* kelihatan. *Nah*, saya khawatirnya ini akan jadi rawan karena dari hutan-hutan tiba-tiba langsung masuk kabupaten itu *nggak* kelihatan. Saya khawatir ini nanti malah bikin masalah ada kecelakaan dan yang lainnya.

Dan untuk Sijunjung, Pak Menteri, Pak Dirjen, semuanya Sijunjung ini semuanya bergantung di sektor pertanian. *Nah*, sedangkan sekarang ini banyak jembatan-jembatan dan jalan usaha tani yang kondisinya sangat memprihatinkan. *Nah*, saya harap nanti usulan detail akan sampaikan di rapat yang berikutnya dengan Pak Dirjen, tapi saat saya harap ada perhatian khusus untuk jembatan-jembatan dan jalan usaha tani bukan hanya Sijunjung tapi juga untuk seluruh daerah pemilihan saya dan teman-teman, karena saya yakin daerah lain juga begitu karena masyarakat kita kebanyakan petani. Jadi, kalau misalnya jalan usaha tani dan juga jembatan-jembatan di situ diperhatikan, ini sangat membantu masyarakat kami semua.

Dan, Pak Menteri, ada satu lagi *nih* ketinggalan, 2022 kemarin saya banyak dapat keluhan dari masyarakat yang mendapatkan program P3TGAI. Ada di beberapa daerah-daerah terpencil yang mereka sudah senang “*Oh*, kami akan dapat P3TGAI irigasi kami terbantu”, karena mereka daerahnya terpencil sangat bergantung dan sangat bersyukur dengan datangnya program dari pusat seperti ini. Tiba-tiba di Balai tidak dimasukkan alasannya dari Balai katanya daerahnya kejauhan. *Loh*, justru karena kejauhan itu, karena terisolir itu mereka perlu. Jadi saya alasannya nanti kirim apa bukan kirim alat kirim barang-barangnya itu susah. *Loh*, kan di desa itu di Nagari itu ada anak

desanya yang usaha sebagai tukang bangunan, sebagai tukang bangunan ya, yang jual-jual bahan bangunan itu kan ada di situ. Justru kalau misalnya kita kasih ke daerah terisolir, daerah yang kurang mampu seperti itu yang jauh, perekonomiannya bisa terbantu di situ. Artinya akan ada perputaran perekonomian di situ, mereka beli bahan-bahan dari tukang-tukang dari toko bangunan di situ. *Nah*, ini saya minta tolong yang seperti-seperti ini saya *nggak* mau dengar lagi alasan *nggak* bisa dibantu karena daerahnya terisolir jauh. Justru saya yakin Pak Menteri di sini juga Pak Presiden juga kan sangat memperhatikan daerah yang terisolir ya. Jadi, saya mohon ini jadi catatan di kementerian untuk ke depannya, mungkin apa balainya apa gimana saya kurang tahu ya.

Jadi, itu sedikit catatan dari saya, tapi pada intinya saya terima kasih sekali karena Sumatera Barat ini sangat-sangat terbantu dengan program-program dari Pak Menteri saat ini. Kemarin Pak Menteri sudah ke Sumatera Barat meninjau bersama saya dengan Pak Gubernur itu ninjau Sitinjau Lauik, dan juga tol, dan juga abrasi pantai. Saya harap dengan datangnya Pak Menteri kemarin bisa memberikan jawaban yang pasti atas keluhan-keluhan kami di Sumatera Barat. Karena biasanya, Pak, yang datang-datang itu Cuma *nggak* memberikan solusi jangka panjang. Jadi, saya harap dengan datangnya Pak Menteri langsung kemarin itu bisa disampaikan ke Pak Presiden, nanti bisa jadi satu solusi yang baik bagi kami, solusi jangka panjang yang efeknya bukan hanya dirasakan saat ini tapi juga nanti ke generasi-generasi di bawah saya, di bawah kita.

Itu saja, Pimpinan, Pak Menteri, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Athari, Pak Irmawan? *Nggak* ada, Bu Neng, Neng Eem silakan.

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):**

**Terima kasih, Ketua.**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
*Om Swastiastu,*

**Ketua beserta jajaran dan Anggota Komisi V yang saya hormati dan banggakan,**  
**Pak Menteri beserta jajaran,**

Terima kasih beberapa kali sudah turun ke Dapil saya Kabupaten Cianjur dalam menangani masalah bencana. Ini juga yang kemudian ingin saya tanyakan, Pak, terkait penanganan terutama *recovery* pasca bencana ini. Terakhir tadi malam saya mengadakan acara di Cibulakan ada beberapa

kebetulan dari asosiasi pesantren putri dari Jawa Timur menyumbangkan bantuan ke sana, sebenarnya sudah lama mereka bikin hunian, apa, Huntara, terus kemudian dan ada beberapa juga. Dan, di akhir masa siaga ada beberapa juga temen-temen saya memberikan bantuan padat karya untuk membersihkan puing-puing, juga hunian darurat karena memang masih banyak yang tinggal di tenda secara bersama-sama. Dan, tentu saja ini tidak efektif karena kalau terlalu lama akan melahirkan konflik sosial seperti itu, maka beberapa bikin hunian darurat yang dari terpal tapi mungkin agak lebih baik per KK.

*Nah*, beberapa saya mengamati dari media juga dari beberapa informasi korban, bahwa Pak Presiden mau mengganti beberapa rumah yang rusak yang berat, 60 juta, kemudian ada yang rusak dan ringan yang itu berbeda-beda. Terus kemudian saya tahu juga dari Kementerian PUPR ada hunian tetap dan lain sebagainya. Dan, saya juga pernah ketemu dengan relawan dari Kementerian PUPR di Desa Gasol yang memang langsung turun untuk apa, mendata rumah yang rusak dan lain sebagai langsung pakai aplikasi. Saya tanyakan beberapa pakai aplikasi, langsung apa ada apa kayak *google map* kayak *gitu* langsung keluar angkanya kalau itu rusak berat dan lain sebagainya.

Tetapi kemudian ini sekarang di lapangan banyak yang konflik, karena beberapa saya juga mohon informasinya ini. Mana saja yang kemudian di tangani oleh Kementerian PUPR yang sumbernya dari APBN. Apakah hunian tetap, apakah yang rumah khusus yang untuk yang rumah-rumah rusak itu semuanya, apakah ada yang lain termasuk mungkin fasilitas-fasilitas sarana umum, kayak sarana ibadah, terus kemudian pendidikan, dan lain sebagainya, karena ini informasinya simpang siur, Pak.

Jadi, ada *statement* Pak Bupati juga “perbaiki saja dulu nanti diganti oleh pemda”. Ini sering sekali didemo beberapa, ya karena memang ada yang cuma nerima 4 juta. *Nah*, kita ingin tahu apakah ini di oleh Kementerian PUPR, atau BNPB, atau Pemda, atau seperti apa *gitu* kan, biar kita tidak simpang siur. Karena mereka menanyakan karena mungkin beberapa kali saya sering memberikan BSPS, sehingga mereka banyak yang menanyakan ke saya terkait itu. Agar saya juga tidak memberikan jawaban yang ngambang *gitu* pastinya seperti apa, karena saya kira relawan Kementerian PUPR pun saya lihat hanya yang saya ketemu baru di Gasol saja, di tempat lain tidak semasih waktu di Gasol banyak yang turun seperti itu.

Dan, kemudian juga sebenarnya di lapangan itu banyak sekali yang satu rumah itu beberapa KK, sedangkan di sana yang didaftarkan hanya satu KK. Jadi, yang beberapa KK yang satu rumah itu ternyata tidak bisa di-cover. Itu juga mungkin permasalahan yang harus kemudian yang itu tidak ter-capture mungkin oleh pendataan dari Kementerian PUPR. Harap ini yang ingin saya tanyakan sumbernya itu dari APBN yang ditangani oleh Kementerian PUPR mana saja, apa saja, di mana saja, saya minta datanya *gitu* kan. Terus apakah dari BA-BUN karena kemarin kan Tahun 2022 sekarang 2023, berarti kan dari 2022 walaupun ini terjadinya kan di akhir yang sebenarnya mungkin belum teranggarkan, tapi kemungkinan kalau darurat biasanya dana BA-BUN. Apakah ada dari dana-dana lain yang sumbernya APBN, atau bukan APBN, atau

daerah, dan lain sebagai. Mohon ini dijelaskan agar kami juga tidak simpang siur, Pak.

Terus kemudian yang kedua, ini sebenarnya yang sering saya katakan tetapi tetap ingin saya suarakan. Beberapa korban itu banyak sekali yang punya pondok pesantren, yang mana tentu saja fasilitas tempat tinggal, sarana prasarana ibadah, masjid, madrasah, dan lain sebagainya, termasuk juga pesantren, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya itu juga kemudian banyak yang hancur. Dan, ini apakah di mana kehadiran negara dalam hal ini, karena menurut Perpres Nomor 57 itu kan kemarin hanya negeri *gitu* kan, sedangkan ini kan tentu saja swasta.

Padahal kalau dilihat dari itu mereka juga ikut berperan untuk melaksanakan tugas negara, yaitu mencerdaskan bangsa. Itu di mana mungkin oleh lembaga negara yang negeri itu tidak ter-cover, tidak terjangkau. Jadi, harap ini mungkin ada kebijakan sebenarnya saya juga berharap Perpres Nomor 57 Tahun 2019 ini juga bisa direvisi terkait hal itu, agar setiap bencana itu juga negara hadir tidak hanya yang negeri-negeri saja yang kemudian ditangani. Mungkin yang swasta yang hanya dikunjungi oleh presiden saja yang ditangani, sedangkan yang tidak dikunjungi oleh presiden tidak ditangani. *Nah*, itulah jadi satu sisi berdasarkan perpres ini tidak bisa kami swasta, tapi satu sisi kemudian yang ada presiden hadir, kemudian di tangani. Ini menimbulkan kecemburuan sosial, Pak, di lapangan kami tanya seperti itu. Mohon ini ada pemecahannya, ada solusinya itu, itu yang terkait.

Dan, saya berharap teman-teman Komisi V juga kunker ke sana, kunker spesifik, atau kunjungan kerja bersama kementerian, mitra kerja kita *gitu* kan ke lapangan, agar juga ini juga mungkin bisa duduk permasalahannya ini bisa segera *clear*, terang benderang, sehingga masyarakat juga tidak berasumsi yang tidak-tidak, demo-demo juga mungkin bisa apa teratasi tidak demo terus-terusan, terus kemudian tidak berasumsi negatif, masyarakat juga seperti itu.

Terus kemudian yang kedua di Kabupaten Cianjur Selatan, daerah Cianjur Selatan, jalan nasional itu, kan ada yang mau dibangun jalan ya, jembatan. Yang mana di tahun sebelumnya, yaitu pembangunan jalan itu perbatasan Sukabumi sama Cianjur Selatan daerah Agrabinta itu. *Nah*, ini agak berbeda, Pak, masyarakat menanyakan *appraisal* penggantian tanah ketika pembangunan dulu itu lebih murah, apa lebih mahal ketimbang *appraisal* yang sekarang, *nah*, ini kan lebih maju. Biasanya kan lebih ke sini justru *appraisal* itu harusnya mahal. Ini yang kemudian masyarakat menanyakan kenapa ini *appraisal*-nya *kok* justru yang dulu itu lebih mahal yang sekarang *kok* lebih murah. Itu yang mohon mungkin ini juga, karena saya tidak bisa jawab juga *gitu* kan. Jadi, tolong ini juga saya dibantu *gitu* kan apa data-data, alasan-alasan kenapa bisa seperti itu.

Terus kemudian yang terakhir, Pak Pimpinan, mohon izin. Mohon, Pak, agar ada juga program-program padat karya untuk melibatkan korban gempa di sana. Mereka sangat membutuhkan pekerjaan minimum padat karya yang melibatkan bagaimana pekerjaannya ada mereka, yang *unskilled* mungkin di jalan nasional itu kan daerah-daerah gempa juga, bagaimana mereka korban gempa

yang ikut padat karyanya. Terus beberapa di daerah SDA juga ada kan Cirumput itu apa di sana, itu juga sumber air yang kemudian sumber baku yang diambil. Dan, itu juga mungkin daerah Cirumput, bagaimana juga Bapak melakukan padat karya juga dan pesertanya penerima manfaat dari padat karya itu ada para korban-korban gempa tersebut. Termasuk juga beberapa dirjen-dirjen yang tentu saja kalau perumahan, cipta karya juga saya kira itu banyak. Saya minta agar partisipasi untuk itu, karena mereka banyak apa kehilangan pekerjaan dan mungkin butuh untuk bangkit, untuk *recovery*, di antaranya juga di antaranya mungkin hal itu juga akan sangat membantu.

Dan mengharap Dirjen Bina Marga ini, Pak, mungkin terutama balainya agar juga bersinergi untuk padat karya jalan-jalan nasional, itu sama sekali mungkin belum bersinergi dengan kita. Beberapa kali kita ketemu tapi seperti halnya diabaikan seperti itu, termasuk untuk Padat Karya Tahun 2023 kita berkoordinasi juga belum. Mungkin kalau Bapak memberikan atensi beliau mungkin apa akan lebih *welcome*, lebih akomodatif.

Dan yang terakhir, Pak, program-program padat karya ketika sosialisasi apakah itu ada anggarannya, kalau *nggak* ada mohon dianggarkan. Padat karya itu kan kita perlu sosialisasi ini untuk kapitalisasi agar *benefit*-nya juga bisa diambil oleh kita, *gitu* kan. Kalau *profit*-nya itu terserahlah, kalau menjelang pemilu itu kan kita yang kita butuhkan *benefit*, Pak, karena kita ingin dipilih lagi seperti itu.

Terus kemudian ketika serah terima juga, itu tolong juga dianggarkan, Pak, akomodasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian serah terima program kemudian urunan dari penerima program tersebut. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak, saya *nggak* enak, Pak, malu *gitu* kan. Saya datang ternyata ketika ini, "ini dari mana?" Ternyata urunan dari penerima program, jangan sampai hal itu terjadi, Pak. Tentu kita sangat ingin, itu momentum bagi Anggota DPR RI dan dia penting untuk misalkan pas sosialisasi kita akan memberikan program pas kemudian juga di akhir penutupan di-*closing* itu, yaitu terserah terima program. Di tengah-tengah bila perlu juga di tengah-tengahnya juga ada pas pengawasannya, biar pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Mungkin itu saja, terima kasih, Ketua, mohon maaf kalau terlalu panjang.

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih Bu, kadang-kadang panjang itu perlu ya, Bu, makasih Bu Eem. Sekarang terakhir Bu Novi, biasanya singkat Bu Novi, silakan Bu Novi supaya Jam 5.

#### **F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan, sudah diingatkan untuk singkat.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**Yang saya hormati Pak Ketua,  
Pimpinan,  
Pak Menteri dan jajaran,  
Di sini ada Pak Sekjen, Irjen, Dirjen, dan semuanya,**

Pak Menteri, semuanya saya mengucapkan sebelumnya terima kasih walaupun tadi teman-teman terima kasihnya karena Pak Menteri datang, saya Pak Menteri *nggak* datang juga terima kasih sekali, Pak Menteri. Karena daripada datang pada saat bencana *gitu* dan saya berharapnya nanti Pak Menteri datangnya Cilacap, Banyumas bukan karena bencana. Kalau yang lain terima kasih banjir, Pak Menteri, baru datang *gitu*. Saya *nggak* datang *nggak* apa-apalah minimal programnya dimaksimalkan, Pak Menteri, dan gunting pita. Peresmian kalau bisa diwakilkan saya semuanya ya.

Pak Menteri, tadi pasti saya dalam rapat ini memang untuk mengucapkan terima kasih atas program-program yang sudah diberikan oleh Pak Menteri dan jajaran, Dirjen Bina Marga, kemudian Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Program yang diberikan Pak Menteri itu sangat bermanfaat dan mengenai *gitu*. Sangat mengangkat ibaratnya nama saya jadi ngangkat popularitasnya *gitu* loh, Pak Menteri, jadi terima kasih. Semoga apa yang dibantu Pak Menteri dan jajaran dapat imbalan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sehingga kalau programnya ditambah semoga pahalanya lebih bertambah.

Kemudian, Pak Menteri, terima kasih sekali lagi. Dan, memang di jajaran di bawah, Pak Menteri, itu sudah bagus, Pak, Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, kemudian Perumahan, walaupun ada lah *gitu* ada yang kurang apa namanya baik tapi mayoritas sudah baik. Jadi, nanti sambil perjalanan waktu semoga yang tidak baik itu kurang komunikasinya, kurang koordinasinya, atau kalau koordinasi iya-iya *gitu*, kalau bahasa Jawa *nggeh-nggeh mboten kepanggih gitu*. Dalam rapat ini bisa dilihat sehingga bisa meningkatkan koordinasi kita di bawah, sehingga tidak merepotkan Dirjen dan Pak Menteri pada saat rapat, tidak diprotes sama kita kalau yang di bawah koordinasinya baik *gitu*.

Dan dalam Bina Marga, Pak, satu-satu sedikit. Bina Marga terima kasih juga sudah banyak membantu, tetapi ini di sini saya ingin mengusulkan di Dapil saya ada jalan yang Adipala menuju Kebumen, Pak Menteri dan Pak Hedi, itu kelihatannya di 2023 belum *gitu*. Jadi, karena saya *nggak* ngerti sudah apa belum, kalau sudah *alhamdulillah* kalau belum ya mohon menjadi prioritas, karena ini jalan menuju Yogyakarta-Kebumen, ini sangat penting dan rusaknya parah. Dan, banyak jalan nasional nanti mungkin saya koordinasi dengan Bu Hidah dan timnya koordinasinya sangat baik.

Hanya ada beberapa yang belum tapi katanya sudah di 2023, di sini sama seperti beberapa teman Pak Menteri ada jalan yang nonstatus, kemudian jalan apa namanya, inspeksi ya, Pak, ya itu, kemudian jalan usaha tani dan bahkan tidak di Dapil saya ada jalan eks-transmigrasi itu yang sangat perlu dibantu, Pak Menteri. Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini tadi ditanyakan apa kabar *gitu*, tapi semoga kabarnya baik dan bisa segera

teralisasi program-program untuk kita bisa membantu. Karena kalau mengandalkan anggaran dari kabupaten atau provinsi itu sangat berat, seperti di Cilacap ini sekali lagi saya kasih tahu Dapil saya Cilacap dan Banyumas. Cilacap ini kabupaten yang terluas di Jawa Tengah dan sangat luas, dari ujung perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat dan itu di Buntu, membutuhkan banyak sekali bantuan infrastruktur khususnya jalan yang banyak sekali rusak itu, Pak Menteri.

Kemudian Bina Marga, Pak Hedi, kemudian Sumber Daya Air, saya juga mengucapkan terima kasih, Pak Menteri dan Pak Djarot, karena embung kemudian beberapa itu terealisasi dan koordinasinya sangat baik. Di Cilacap ada Serayu Opak, ada embung, dan kemudian ada Citanduy. Memang tetap berharap karena ada di sana banjir *gitu*, di Wanareja kita usul karena menggenangi 5 desa tetapi turun baru 10 m, itu mungkin ke depan mohon untuk bisa ditambah. Kemudian juga, ada PR Cilacap itu Segara Anakan, Pak Menteri, itu kalau *nggak* salah saya dari umur SMP itu, saya SMP sudah ikut rapat di DPRD Kabupaten sampai sekarang belum terpecahkan. Karena sampai sekarang sedimentasinya makin tinggi dan bahkan banyak yang sudah menjadi daratan. Ini pertanyaannya apakah mau dibiarkan menjadi daratan sekalian *gitu*, tetapi kita jadi kehilangan biota laut atau bisa diberikan pertolongan dari anggaran pusat. Kemudian, Pak Menteri, nanti yang detail saya akan kombinasi dengan Pak Djarot dan jajaran di bawah.

Yang Sumber Daya Air kemarin, Pak Menteri, saya dan rombongan datang ke tempat bencana Cianjur, seperti tempatnya Bu Neng Eem. Kemudian di Semarang itu ada daerah Trimulyo, Pak, ini tadi cerita Dapil tetapi saya tidak bisa menutup mata tentang banjir-banjir yang begitu kena di masyarakat seperti Trimulyo kota Semarang, kemudian Demak itu yang selalu kena. Jadi, mohon sekali ada prioritas bagaimana penanganannya Kota Semarang, kemudian Demak, kemarin Pati, Kudus, dan Kota Pekalongan. Ada beberapa daerah yang tidak bisa ditolong katanya karena Kota Pekalongan ranahnya provinsi, sedangkan provinsi *nggak* bantu-bantu gitu. *Nah*, ini apakah bisa diintervensi dari pusat tempat-tempat yang ranahnya katanya provinsi atau kabupaten, tetapi mereka tidak juga membantu karena korbannya juga masyarakat daerah sana.

Kemudian untuk Cipta Karya, terima kasih, Bu Diana, Pak Cakra, koordinasinya sangat baik. Kami juga mengajukan beberapa pasar ke depan. Dan juga Perumahan kita ingin mengajukan, Pak Iwan, rusunawa untuk Unsoed Universitas Negeri yang ada di Purwokerto. Itu, Pak Menteri, terima kasih untuk semuanya mohon kalau yang di bawah kurang nanti saya akan koordinasi, mohon bisa diberikan arahan kepada jajaran di bawah untuk bisa lebih koordinatif dengan kita.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Novi. Selesai dari meja Anggota, sekarang ke Pimpinan, Pak Roberth dulu silakan.

**F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Saudara Menteri PUPR dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat Sore untuk kita semua,

Yang pertama, sesuai dengan nomenklatur kita pada hari ini yaitu rapat kerja tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022, untuk itu dan yang berikut membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2023. Saya masuk di Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

**Saudara Menteri dan seluruh jajaran, saudara-saudaraku,**

Saya ingin agar ke depan, apa yang kita sudah anggarkan di Tahun 2023 nanti tidak akan terjadi seperti di Tahun 2022.

Yang pertama, ini sudah saya sampaikan hampir berkali-kali pada kita semua yaitu tentang pelaksanaan dalam rangka pengadaan barang dan jasa khususnya tender proyek yang ada di daerah kami. Ini menjadi catatan penting agar di Tahun 2023 ini tidak terjadi lagi, Saudara Menteri.

Kita lihat bahwa di daerah saya, tempat kelahiran saya, di satu kabupaten Pulau Nyapen, itu ada tiga, lima proyek yang pengadaannya sudah dilakukan dan tendernya itu dilakukan pada bulan April atau Maret itu dan dari lima proyek yang ditenderkan hanya satu yang selesai tepat seperti kontrak yang dilakukan.

Satu lagi, Kalut (suara kurang jelas), itu kontraktornya mundur maka dilakukan lagi ulang karena pemenangnya sudah menang, tapi ternyata tidak sanggup jalan, karena begitu menang sadar bahwa tidak mungkin dilakukan karena penawaran terlalu rendah, akhirnya mundur sendiri dengan teratur. Maka itu, dilakukan lagi dan masih seperti yang sama hasilnya yang saya dapatkan bahwa itu dengan penawaran yang begitu rendah maka saya ingin sampaikan ke Pak Irjen, untuk melakukan pengawasan ke proyek ini, karena apa yang saya dapatkan kalau memang itu dilakukan seperti itu, ya memang sesuai dengan penawarannya bahwa kualitasnya tidak ada, material yang dipakai adalah material yang ada di tempat itu, ya kan. Speknnya tidak sesuai, menurut saya, saya sudah lihat ini nya semua data-datanya ada nanti saya akan berikan, lengkap foto-fotonya, kualitasnya sangat rendah, *nah*, ini catatan penting.

Sekarang, dilakukan lagi jembatan yang kemarin akhirnya putus kontrak, saya ingin supaya ini dilakukan yang benar ya, Pak Dirjen Bina Konstruksi

supaya pengawasan juga bahwa tidak harus memakai nomenklatur yang terendah yang menang, ini yang berbahaya, ini membuat kualitasnya tidak bisa terjamin dan menjadi proyek-proyek yang terbengkalai. Kita lihat apa yang terjadi, mohon verifikasi pelaku usaha itu yang betul, bukan verifikasi kertas kelengkapan alat itu dengan kertas, kalau bisa verifikasi di tempat, kalau semua ini dilakukan maka 2023 itu akan sama seperti ini karena kita bicara evaluasi saya ingin sampaikan ini agar ini tidak akan terjadi lagi.

Saya usulkan kepada Pimpinan, kita semua, kita buat Panja tentang Pengadaan ini, agar kita semua yang selama ini kita sampaikan bahwa terjadi hal ini kita bisa menemukan hasilnya agar ke depan ini tidak lagi terjadi karena selalu yang dipakai nomenklatur yang terendah yang dimenangkan, sedangkan kita semua tahu, ya, proyek-proyek yang nilainya tinggi yang dikerjakan oleh BUMN itu tidak ada nomenklatur itu. Saya punya data yang kemarin sempat saya sampaikan di sini, terakhir yang dimenangkan bedanya jauh sekali ya, ini kan tidak *fair*. Apakah yang kecil-kecil ini berebut kulit sama tulang ini boleh berebut silakan, tapi yang besar yang punya ini, ini tidak *fair*.

Maka menurut saya, sepantasnya kita dewan ini harus melakukan juga pengawasan dan sekaligus kita bisa tau betul apakah ini, yang selama ini kita tidak, selalu kita *ngomong* di sini bahwa ini tidak layak tapi kita tidak pernah masuk ke sana. Maka jalan satu-satunya untuk kita masuk adalah melalui Panja menurut saya.

Saya minta kepada Pimpinan, untuk kita harus lakukan ini agar betul-betul kita *tau* seperti apa, ke depan kita punya data untuk bisa kita membantu juga Saudara Menteri dan jajaran untuk bisa menjaga kualitasnya. Saya tau betul Pak Menteri juga sampaikan tidak bisa bikin apa-apa, ada satu lembaga ini yang nanti akan protes, maka jalan satu-satunya kita melakukan itu supaya kualitas yang selama ini, ya. Pak Menteri sudah bekerja begitu baik tetapi sudah anggarkan semua kita di sini tapi pelaksanaan di daerah ini membuat kita semua tercoreng.

Maka ini yang menjadi catatan saya penting saya ingin sampaikan pada saat ini untuk kita semua.

Yang berikut, saya Pak Menteri, saya, ya teman-teman selalu membuat menyatakan aspirasi yang begitu besar kepada Saudara Menteri dan jajaran. Banyak menyampaikan juga, karena memang ada kegiatan yang memang Pak Menteri ke daerah tempat Dapil teman-teman bersama Presiden dan sebagainya. Saya belum bisa berterima kasih Pak Menteri karena Pak Menteri belum ada kegiatan dengan saya di daerah, mudah-mudahan nanti bisa kita kunjungi *food estate* nanti di Kerom, mungkin bisa kita lihat supaya saya juga bisa hadir bersama Pak Menteri di Dapil saya.

Yang berikut Pak, saya juga menyampaikan juga tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini juga menyangkut aspirasi yang sudah kami putuskan di tempat ini bahwa ada kita diberikan aspirasi untuk di daerah kita, Pimpinan itu diberikan slot tiga tapi mohon maaf Pak Menteri, saya karena di Papua katanya angka kemahalannya tinggi maka saya cuma dikasih

satu. Sekali lagi saya mohon, ini membuat saya sangat bertanya-tanya, apakah Menteri PUPR dan jajaran ini memakai standar ganda untuk melihat kita, BSPS di tempat saya khususnya di pegunungan waktu itu saya minta dapat 41 BSPS, karena memang tingkat kemahalannya, kalau ada hitung-hitungan dengan nilainya, bukan jumlah barangnya, maka harusnya BSPS pun saya teman-teman dapat satu, ini saya tidak dapat, karena nilainya beda 20 dan 40, beda, iya kan. Ya, memang daerah saya itulah, *nggak* mungkin dinilai dengan besar, ya, memang masyarakat di tempat saya dibutuhkan itu di daerah pegunungan, membutuhkan rumah susun untuk ASN, membutuhkan rumah susun untuk pendidikan, ya. Saya sudah sosialisasi, mereka sudah kasih data semuanya sudah, tiba-tiba dibilang tidak bisa karena nilainya cuma sekian Pak Robert, jadi dapatnya cuma satu, *waduh, kok* dari awal *nggak* dikasih tau seperti itu? Ini kan standar ganda yang dibuat,

Harap saya, Pak Menteri tidak seperti itu, harapan saya tidak seperti itu, agar apa yang sudah kita sepakat di sini bahwa itu yang kita jalankan, begitu jalan oh ini tidak bisa, karena tempat Pak Robert kemahalannya tinggi, ya memang tempat saya kemahalannya tinggi ya kan, kalau pakai standar itu saya kira mungkin jalan di tempat kami Pak Menteri, mungkin kasih yang harusnya lima kilo mungkin harus dapat cuma satu kilo, tapi tetap Pak Menteri kasih lima kilo karena tingkat kemahalannya kan.

Jadi saya kira ini, tidak mungkin sampai seperti itu, jadi ini yang ingin saya sampaikan agar Pak Menteri, tolong menjadi perhatian juga, apa yang sudah kami sepakat kami tidak ribut lagi karena ini dibuat masalah baru untuk kita.

Yang berikut, tadi banyak juga disampaikan, saya berterima kasih karena verifikasi tentang BSPS ini sudah jalan di tempat kami, Pak, sudah berjalan dan ini sangat cepat menurut saya, saya memberikan apresiasi karena semua sudah selesai di daerah saya. Tapi, masih ada satu masalah, saya kira kita semua mendapat masalah yang sama yaitu BSPS yang non Dapil kami, karena kami adalah Anggota fraksi, kita semua ini kecuali saya di sini Pak Menteri, saya Ketua Fraksi, yang lain semua di sini Anggota Fraksi. Yang punya kewajiban untuk *men-support* fraksi, itu perintah fraksi kepada kita. Saya pun sebagai Pimpinan Fraksi tunduk pula, karena itu adalah perintah dari partai kepada fraksi, memberikan juga, non fraksi ini sekarang ini belum diverifikasi Pak Menteri, ya, non Dapil, ini belum diverifikasi, saya kira pasti kita semua punya sama, tidak mungkin saya sendiri.

Mohon saya, ini tolong diperhatikan dengan baik, memang saya tau maksudnya ini baik karena ada juga Anggota yang memang tidak layak sekian tidak ada di daerahnya. Tapi, ada yang memang itu harus ada diskresi bahwa oh kalau itu boleh, kalau yang seperti itu tidak ada satu pun di Dapil tidak boleh, sepakat itu, ya, tapi kalau ini karena memang kami juga melapor kepada mitra bahwa ini fraksi *loh* karena memang itu aturan di dalam fraksi, semua kita, bukan cuma di Komisi V, komisi-komisi yang ada di DPR ini semua wajib, ya, karena saya Pimpinan Fraksi semua wajib menyerahkan di fraksi karena kami mendukung untuk teman-teman yang tidak, karena tidak semua duduk di sini,

tidak semua duduk di Komisi IX misalnya untuk alat-alat kesehatan, itu karena slotnya kita Anggota terbatas.

Harapan saya, ini bisa segera dilakukan agar tidak menjadi masalah ya di dalam Anggota nanti Komisi ini dengan Fraksinya, ini perlu menjadi catatan penting, Pak Menteri.

Yang berikut, saya kira apa juga yang disampaikan teman-teman tadi ya saya ada beberapa catatan penting yang saya catat juga. Yang pertama tentang, tadi saya melihat Pak Menteri buka data ada 5.000 rumah bencana, ya, terdampak bencana yang diberikan sekian-sekian, saya cari-cari di daerah saya bencana kerusakan bencana juga, belum masuk Pak Menteri ya, karena waktu itu Pak Menteri sampaikan belum ada jaminan keamanan di sana, tapi saya kira sekarang ini sudah lebih baik ya, Yahukimo ya, terdampak kemarin kerusakan masih ada yang sampai saat ini masih belum, ya, Intan Jaya itu masih pengungsi masih banyak yang rumahnya terbakar habis, Wamena juga masih ada. Harapan saya, Pak Menteri, bisa melihat itu juga untuk kami juga mendapat itu.

Saya ingin kasih catatan Pak Menteri bahwa, rumah-rumah yang terdampak bencana kita memberikan apresiasi untuk pembangunan itu, tapi mohon juga agar pembangunan rumah-rumah di daerah bencana itu betul-betul melalui satu skema yang baik, agar tidak nanti karena itu daerah bencana sudah pasti akan terjadi bencana lagi karena daerah-daerah bencana, agar rumah-rumah yang dibangun itu tidak di daerah yang terdapat resiko bencana, resiko akan terdampak lagi, iya kan dan struktur bangunan itu harus bisa, agar nanti tidak ke depan terjadi bencana, bantuan lagi turun itu, seperti itu. Jadi, ini juga menjadi catatan saya untuk Pak Menteri dan jajaran.

Yang berikut, saya ingin juga bahwa karena daerah saya, saya lihat tadi banyak bener, *support* kita untuk IKN, ini Ibukota Negara kita, saya sepakat kita dukung, tapi saya juga minta dukungan Pak Menteri, karena daerah saya ada daerah otonomi baru yang belum punya kantor, belum punya apa-apa, mohon juga menjadi catatan. Kalau kita harapkan itu semua beban ke daerah, saya kira beban daerah tidak akan mampu untuk secepatnya bisa hadirkan kantor-kantor yang baik untuk melayani masyarakat. Masyarakat sudah berteriak-teriak, pemerintah mau bikin DOB, mana? *Kok*, masih juga pakai duit kita katanya, bikin DOB bangun *dong* kantornya, itu yang kami dapat keluhan dari masyarakat, protes masyarakat.

Jadi, harapan saya, Pak Menteri bisa sampaikan ke Pak Presiden, bahwa kami ingin juga supaya masyarakat percaya benar kepada pemerintah, bahwa pemerintah memberikan daerah otonomi baru memberikan juga pembangunan kantor ya kan, fasilitas-fasilitas untuk daerah otonomi baru ini bisa hadir supaya masyarakat bisa bangga dengan pemerintah ini.

Yang berikut, tadi Pak Menteri juga sampaikan SPAM, saya waktu itu sudah sampaikan bahwa Saudara Presiden kita, Bapak Jokowi sudah hadir ke Nduga, itu daerah yang memang sangat sekarang ini menjadi daerah yang rawan, tapi kasihan masyarakatnya itu Bupati dan jajaran ketemu saya minta

supaya bagaimana dengan air bersih SPAM yang baik. Mohon, Ibu Cipta Karya tolong diperhatikan Nduga ini sangat membutuhkan SPAM bisa, ya.

Saya ada satu catatan yang ingin saya sampaikan untuk kita semua bahwa ada yang namanya Undang-Undang Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 28 menyebutkan Anggota DPR RI dapat mengajukan program kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan APBN, jadi kita bisa, bisa kita, jadi APBN sudah ada kita bisa, ini catatan penting untuk kita semua yang selama ini kita lupa, saya nyampaikan ini, ini undang-undang ya. Dan, harapan saya ke depan tadi saya sangat mengamati benar, Saudara Menteri sampaikan tentang program-program yang sudah kita putuskan Tahun 2022 untuk 2023, saya melihat dengan seksama ada rumah khusus sekian di sini, sekian di sini, sekian di sini. Saya berbisik kepada Ketua, saya bilang 2024 saya mohon dengan sangat, kita kembali kepada titah kita, kita harus bisa duduk bersama maka ini yang ingin kita lakukan harusnya supaya berapa di dirjen ini perumahan ada sekian, oke, di mana saja, kita masuk ke dalam yang namanya satuan tiga, kita tidak dilarang di komisi tapi di badan anggaran tidak, karena itu ada keputusan MA, tetapi di Komisi kita punya hak untuk itu. Jadi, tidak setelah kita ketok, sebelum kita ketok saya minta kita bahas itu.

Jadi, mulai dari perencanaan kita bahas supaya hasil kunjungan kerja kita semua, spesifik kunjungan kerja reses bisa kita akomodir di dalam semua jajaran di kementerian sesuai dengan topiknya masing-masing. Ini yang ingin saya minta kepada kita semua agar nanti kita bahas 2024 sudah mulai kita bahas bersama perencanaan agar tidak lagi di ujung-ujung kita pun membuat Pak Menteri bingung mau dimasukin di mana slotnya *gimana* ya kan, maka dari awal kita harus duduk bersama supaya kita tau ini slotnya, ada slotnya, ada slotnya, begitu, supaya tidak ujug-ujug. Ini yang harus kita lakukan.

Yang berikut ini, kemarin saya pimpin kunjungan kerja ke Maluku, saya harus sampaikan juga karena terus terang, tidak ada satupun Anggota dewan di Komisi V yang dari Maluku, tidak ada, sangat memprihatinkan, Pak Dewo ikut bersama, kita lima orang ya yang hadir, Pak Harvey Malaihollo, Pak Dewo, saya, kami hadir di sana dan sangat memprihatinkan mendapat masukan-masukan yang kami lihat. Yang pertama ada kami ninjau jalan Laha Wakasih, itu akibat abrasi pantai, maka jalan itu, itu poros jalan provinsi. Memang kalau kita bicara anggaran, Provinsi Maluku cuma dapat 3,2 T, Gubernurnya mantan Anggota (suara kurang jelas) apa Brimob, Ketua PDIP, Pak Ketua punya Anggota, Pak Ketua *nggak* datang, saya yang datang. Beliau sangat mengharapkan bagaimana kita bisa hadir juga untuk memberikan bantuan dorongan untuk mendukung pembangunan jalan di sana.

Saya sampaikan bahwa kami sudah mengadakan revisi Undang-Undang Jalan, jadi tidak ada lagi sekarang jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan apa, semua kami dari pusat sebenarnya sudah bisa masuk. Cuma ini yang kita semua belum juga melihat Keppres apa, PP-nya, untuk pelaksanaan revisi undang-undang yang sudah kita lakukan. Harapan saya Pemerintah, Pak Menteri, harus segera bisa mendesak agar PP atau Keppres dan sebagainya ini turun untuk mendukung untuk kita bisa lakukan jalan sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan, jadi kita tidak lagi, kalau sekarang, ya, tadi saya

sampaikan, kita masih pakai standar ganda, yang baik kita bilang oh iya kita pakai undang-undang yang ini, yang merasa tidak perlu oh *nggak* bisa kita pakai yang ini, karena sudah revisi, tapi masih ada di tengah-tengah, ya, tapi kalau PP, apa Keppresnya keluar maka itu sudah tidak lagi kita harus pakai satu saja undang-undang yang harus kita pakai.

Yang berikut, saya ke satu daerah itu peninjauan kita ke rumah tidak layak huni, sangat memperhatikan, saya lihat di Papua, saya, satu kampung mungkin ini presentasinya ini *kok*, lebih banyak banget Pak Menteri. Sayang karena tidak ada Anggota Dewan di sini dari Maluku, jadi mereka tidak dapat, ya kan, tidak dapat program yang ada. Kalau sekarang itu terus dibuat lagi bahwa tidak boleh di luar Dapil, ya, kasihan *gitu*, saya bilang waduh kasihan juga saya mutasi *nggak* bisa juga karena di luar Dapil saya, *gitu*, ya kan, pasti tidak mungkin dikasih ke sana.

Harapan kita hal-hal ini yang perlu mungkin kita tidak lagi terlalu kaku, ya kan, kita sepakat tapi tidak boleh kaku, artinya sepakat bahwa lebih banyak harus bawa ke Dapil, tapi juga tidak boleh kaku daerah yang memang tidak ada Anggota kita wajib mereka juga bisa dapat. Hal-hal ini yang menurut saya supaya kita ke depan tidak lagi hanya kita yang ada di sini yang boleh bawa program ke daerah kita tapi kasihan daerah yang tidak ada Anggota dewan yang ada di Komisi ini tidak bisa kita berikan, kalau kita berikan pagar di antara kita.

Yang berikut, saya melihat juga bahwa rumah khusus nanti saya kira saya pernah berikan dokumen, April kemarin, tentang rumah khusus di kampung Iwaka Timika, mohon Pak Menteri mungkin sudah lama bisa minta dilihat kembali, ini kemarin saya ditagih sama mereka bagaimana dengan proposal kita yang sudah kita berikan, ini mohon menjadi perhatian Pak Menteri. Saya tidak masuk dirjen per dirjen tapi saya secara umum saja, yang paling penting bagi saya agar 2023, semua apa yang kita putuskan ini bisa berjalan baik, ya, di daerah kita masing-masing yang selama ini kita melihat bahwa masih banyak terjadi pemutusan kontrak yang terjadi di daerah-daerah kita, ini tidak terjadi lagi, ya dan saya minta nomenklatur yang dipakai yang termurah yang dimenangkan ini tolong dikaji kembali, walaupun itu dipakai tetapi tolong verifikasi itu tidak verifikasi hanya kertas. Kesiapan, kelengkapan material, kelengkapan alat itu menjadi yang utama, kalau cuma kertas dijual beli, Pak Menteri, perusahaan di Papua pakai tim ahli dari Jakarta di mana-mana jual beli keahlian itu untuk sertifikatnya dipakai di perusahaan-perusahaan.

Ini yang mungkin menurut saya Pak Ketua, tadi saya minta supaya kita bisa buat Panja Pengadaan Barang, karena apa yang kita temukan selama ini agar tidak akan juga terjadi nanti di 2023, 2024, semua yang kita putuskan ini untuk kebaikan masyarakat di daerah kami tapi ini yang kita temukan dan ini juga mencoreng mitra kita, Pak Menteri dan jajaran karena akibat daripada sistem yang dibuat dengan nomenklatur yang termurah yang menang, kita harus masuk ke sana.



Terima kasih, mohon maaf Pak Menteri dan jajaran teman-teman saya agak lama tapi karena ini pengawasan, kita harus lebih mengawasi lagi agar tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi bisa terulang kembali.

Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, Pak Roberth, berkaitan dengan kelengkapan dewan Pak, Panja Pansus dan seterusnya itu nanti kita bahas di rapat internal saja ya, tidak perlu didalami di sini, kalau kita pandang perlu nanti kita bahas di rapat internal, tidak perlu ditambah-tambah lagi oleh yang lain.

Silakan, Pak Iwan.

**F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Barang baru, Pak. Saya upayakan sesingkat-singkatnya Pak Ketua, karena tadi Pak Roberth, karena Ketua Fraksi mungkin panjang sekali bicara, jadi saya singkat-singkat aja. Tadi saya lihat ini Pak Menteri agak beda waktu Pak Roberth yang bicara agak sedikit gimana, waktu Bu Novi bicara tadi agak senyam-senyum, mudah-mudahan saya bicara Bapak bicara senyam senyum dikit. Baik, kelihatan Pak.

**Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi V dan Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas penyelesaian pembangunan (suara kurang jelas) Jalan Poros Bone-Wajo, *alhamdulillah* sudah dinikmati masyarakat, saya mewakili masyarakat Kabupaten Wajo dan Bone mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen Bina Marga, serta Kepala Balai yang sekarang, walaupun tiga kali putus kontrak Pak, *alhamdulillah* selesai juga akhirnya. Jadi, ada juga yang saya mau *stressing* kenapa ini jadi putus kontrak berkali-kali, tentunya, maaf dua kali putus kontrak, kontrak ketiga baru bisa selesai, karena kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Roberth Rouw itu juga yang terjadi harga terlalu rendah sehingga kemudian rekanan tidak mampu menyelesaikan dengan baik.

Kemudian, saya juga mengapresiasi serapan fisik, baik fisik maupun keuangan yang kalau kita lihat secara kolektif cukup baik Pak, 96,2%, cuma saja kami ingin mengklarifikasi bahwa pada rapat tanggal 28 November lalu, jumlah Pagu Anggaran kita kurang lebih 121,40 Triliun, terdapat penambahan sebesar dua puluh, 2,8 Triliun dan kemudian pada saat ini Pagu nya berubah lagi menjadi 125,99 Triliun, dan saya melihat bahwa dari realisasi serapan anggaran dan fisik itu mengacu kepada anggaran sebesar 125,99 Triliun dan cukup baik, Pak. Hanya saja kami juga sedikit menyayangkan bahwa penambahan anggaran ini tidak disertai laporan mitra Komisi V dalam hal ini Menteri PUPR kepada pihak Komisi V tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan sehingga tentunya fungsi pengawasan kami di Komisi V tidak

bisa optimal, karena kami sudah melihat bahwa tambahan-tambahan itu berupa kegiatan internasional, dampak bencana, IKN, dan lain sebagainya mungkin ke depannya kita harapkan bahwa ada laporan yang lebih detail tentang hal tersebut walaupun kemudian yang kita sahkan sebelumnya di 2022 Cuma seratus, kalau nggak salah cuma 100 triliun lebih Pak, dan itu berubah terus-menerus dan sepertinya kemudian apa yang disahkan itu kemudian tidak menjadi acuan kembali dalam proses pelaksanaan di setiap tahun anggaran.

Jadi, dari pemerintah agak mudah untuk merubah-rubah Pagu Anggaran yang membuat kita di komisi juga akan semakin hari semakin bingung bahwa ini *kok* berubahnya bisa bertambah dan berkurang begitu saja tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kita Komisi V.

Begitu pula juga dengan ini Pak, kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa, apakah kemudian bobot keuangan 93% ini dan 96% untuk fisik ini, itu berasal dari hasil revisi-revisi kegiatan misalkan kegiatan-kegiatan yang terputus kontrak yang kemudian otomatis kalau putus kontrak tentu penyerapannya *nggak* ada Pak Menteri, apakah kemudian anggaran-anggaran yang putus kontrak ini direvisi masuk ke kegiatan lain atau tidak lantas kemudian bobot kolektifnya bisa mencapai angka tersebut. Mungkin kalau kita mengurai perkegiatan kita juga bisa mengevaluasi seperti apa, di mana letak kegagalan-kegagalan konstruksi yang terjadi, apakah kemudian sisa anggaran yang tidak terserap ini diakibatkan oleh misalkan kegagalan kontrak atau dan lain sebagainya, dan kemudian tentu berkolerasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roberth Rouw tadi tentang proses pelelangan BP2JK yang mungkin salah satu menjadi penyebab akibat terjadinya kegagalan kontrak tersebut.

Selanjutnya Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk di 2023 ini, Pak Menteri masih belum masuk Pak, ada kegiatan yang dulu, Pak Menteri sempat janjikan ke saya waktu kita peresmian bendungan (suara kurang jelas) itu hanya 7 Miliar Pak, pembangunan rehabilitasi Rumah Adat Atakae di Kabupaten Wajo itu ada rumah yang jadi *iconic* kabupaten itu, saya dijanjikan oleh Ibu Dirjen sudah dua tahun ini Pak, bahkan pada saat rapat kerja dengan kami, rapat RDP dengan kami, beliau sudah memasukkan kegiatan itu dalam dua tahun anggaran berturut-turut, tapi kemudian per hari ini kegiatan tersebut tidak lagi ada, saya mohon mudah-mudahan Pak Menteri bisa memasukkan di 2023 ini, karena anggarannya gak besar Pak, hanya 7 miliar saja.

Kemudian, selain itu kami juga mengapresiasi kinerja atas Bina Marga ya, di Sulsel, kemarin itu terdapat banyak bencana banjir, *alhamdulillah* saat ini sudah mulai dilaksanakan dan mudah-mudahan dapat segera diselesaikan, tapi tentunya butuh dukungan anggaran Pak Menteri, karena akibat bencana banjir dan hujan yang begitu deras pada saat ini, saya kemarin keliling Sulawesi Selatan, karena kebetulan kami punya tugas bukan hanya Dapil II Sulsel saja, tapi kami kemudian mengelilingi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, kami mendapatkan tujuh titik longsor Pak, tujuh titik longsor, yang pertama di daerah Poros Sidrap Enrekang dan Tana Toraja, ini destinasi pariwisata Pak Menteri, saya kira Kepala Balai di sana juga perlu di-*support* dengan anggaran yang memadai dalam proses mengantisipasi longsor-longsor tersebut,

bencana tersebut, termasuk juga yang terakhir poros Maros-Bone yang sempat terjadi longsor.

Selain itu, kemudian saya juga ingin menyampaikan menyangkut masalah *bypass* Maminasata mudah-mudahan proses pembebasan lahan itu kalau dulunya, Maminasata ini masuk dalam PSN sehingga kemudian proses pembebasan lahannya bisa segera dilaksanakan, saya *nggak* tau karena kemarin sempat dikeluarkan dari PSN apakah proses pembebasan lahan ini masih tetap bisa dimasukkan dalam APBN atau tidak.

Yang kemudian, yang berikutnya Pak masalah Jenelata, saya *nggak* tau apakah saya dengar kontraknya sudah selesai tapi sampai saat ini masih belum jalan, mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan apa kendala-kendala yang terjadi, saya kira kalau melihat kondisi di sana proses pembebasan lahan dan sebagainya berjalan cukup baik dan kemudian kami berharap agar supaya pembangunan fisiknya bisa segera dilaksanakan.

Selanjutnya yang terakhir Pak, masalah rehab stadion Pak, kami ada stadion yang kemudian hasil daripada Kanjuruhan kemarin, Sekjen PSSI kemudian melakukan audit kepada seluruh stadion-stadion yang ada di provinsi, di setiap provinsi kemudian membuat standarisasi sehingga kemudian ada beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang menitipkan kepada kami agar bisa mendapatkan dana, mungkin *on top* atau apa dari Pak Menteri, agar supaya rehabilitasi stadion itu dimungkinkan nanti di akhir rapat saya akan serahkan ke Pak Menteri usulannya, karena kalau tidak salah juga gubernur juga sudah menyerahkan ke Pak Menteri untuk itu.

Baik Pak, mungkin itu saja Pak Ketua, saya *nggak* panjang-panjang, 10 menit cukup, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sekarang sebentar lagi Maghrib ini, ya Ketua kebagian terakhir, mudah-mudahan sebelum maghrib kita selesai. Nanti Pak Menteri *nggak* perlu jawab semua Pak, jawab yang singkat saja, nanti jawab tertulis saja Pak Menteri. *Nah*, pengawasan ini kan panjang nanti, saya rasa teman-teman sepakat kalau nanti jawab yang penting-penting saja ya, yang detail nanti jawab secara tertulis, jadi Pak Menteri bisa menjawab satu-satu. Kalau dijawab semua juga sampai subuh *ndak* selesai ini.

Saya sedikit barangkali Pak Menteri, saya mengingatkan juga ini, terkait dengan Dapil ini Pak Menteri. Kami di Kalbar itu seperti yang pernah saya sampaikan masalah utama di sana sekarang Pak, air bersih, Pak, di pedalaman itu, dan ini bulan Februari masuk kemarau Pak sana, agak aneh juga ini. Saya kebetulan baru pulang, beberapa daerah sudah kesulitan air bersih kondisi ini ya, di pedalaman kita bicara pedalaman karena perkebunan sawit itu ada di mana-mana. Sumber air sudah sangat terbatas, ya, ini untuk air minum beberapa yang pernah kita usulkan tetapi kelihatannya juga Pak Menteri tidak muncul ini di mata anggaran kita tahun ini.

Jadi, saya ada usulkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bu, secara tertulis dulu saya sampaikan ya, tadi saya juga sudah kontak dengan air minum di Kalimantan Barat ini, sampaikan bahwa masih ada banyak sekali yang perlu ditindaklanjuti, tapi nanti saya akan bikin tertulis saja ke Bu, *nuwun sewu*, Pak Menteri nanti ke Pak Dirjen Cipta Karya.

Kemudian, yang penahan tebing Pak, ya yang dulu pernah saya sampaikan dengan Pak Menteri juga kelihatannya belum ter-*handle* di sumber daya air yaitu Jembatan Kapuas yang di dalam Kota Putussibau, Pak, saya baru pulang kemarin hari senin dari sana, saya dari sini terbang ke Putussibau, dari Putussibau saya ke Sintang baru saya kembali ke Jakarta, itu retakannya sudah tambah besar Pak, kalau gak cepat ditangani saya khawatir nanti kaki jembatan Kapuas yang ada dalam kota itu Kedamin Pak, ya namanya, jembatan Kapuas di Kedamin, Putussibau, dulu pernah kita sampaikan, kita pernah naik *speed* dulu dengan Pak Menteri, kita pergi itu.

Kemudian jembatan yang di Kalis, Pak, jembatan dua jembatan ini kalau terganggu Putussibau itu lumpuh Pak, kota Putussibau itu lumpuh. *Nah*, karena di sana masuk musim kemarau jadi kemarin saya bisa leluasa melihat Pak. Kalau air pasang kan gak nampak dia ketutup, kemarin, saya pikir itu perlu cepat ditangani dan sebetulnya saya sudah usulkan itu ya, Pak Jarot sudah saya WA juga ke Pak Jarot waktu itu, ada daftarnya Pak, saya kirim ke Bapak beberapa waktu yang lalu ya, kalau kekuatan tebing di Sintang itu juga kemarin sudah dianggarkan ya memang menurut kepala balai itu baru permulaanlah mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan karena *geotech-geotech* itu yang kemarin kita kerjakan Pak Menteri, waktu banjir terakhir itu lewat Pak, airnya, lewat semua dan beberapa titik juga terjadi longsor karena beban, di tepi sungai itu rupanya tanahnya itu kan labil sekali, jadi kena beban dari atas turun dia terus *geotech*-nya, *geotech*-nya juga ikut tergerus ke bawah karena longsor.

Kemudian, terima kasih Pak Menteri, dari masyarakat Kapuas Hulu, semenjak danau itu ditangani di dalam kota dengan OP saja itu, Pak, padahal, hanya dengan OP saja kita tangani, baru satu danau Pak, Putussibau itu ada perubahan tipikal Pak, air naik tapi lama sekali naiknya, dan belum pernah mencapai titik tertinggi pada saat danau itu belum pernah ditangani Pak, padahal hujan intensitasnya lebih tinggi, ini menurut masyarakat, padahal ini juga baru ditangani paling 30%, Pak, maka kemarin Pak Jarot terima kasih OP nya saya lihat sudah ditambah ya, mudah-mudahan itu, total kalau ditangani semua kurang lebih 100 hektar lebih, Pak Menteri, bukaan nanti yang bisa ditangani, itu pengaruhnya langsung ke Kota Putussibaunya Pak, ya, ini kita bisa menyelamatkan banyak rumah kalau banjir ini terasa sekali. Ini kemarin Pak Bupati testimoni langsung dengan Kepala Balai yaitu Pak (suara kurang jelas) dengan Pak Pram, Pram kalau saya *nggak* salah ya Kalbar ya, kemarin disampaikan langsung dengan Kepala Balainya.

Kemudian, memang kalau air bersih di Kalbar itu kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir itu, ini sekarang *nggak* ada ini Pak Menteri, saya sudah cek ini bangunan lama semua dan sekarang sudah tidak, apalagi kalau *nggak* hujan satu minggu sudah hilang. Masyarakat *ndak* punya pilihan Pak, harus lari ke sungai Ketungau namanya, sungai ini kalau hari kayak

gini Pak, penuh mesin *check* di sungai itu, orang nambang emas liar Pak, ribuan mesin di sepanjang sungai itu, dan itu sudah pasti tercemar, ada *mercury* dan seterusnya. Masyarakat *ndak* punya pilihan Pak, jadi kalau kita bicara *stunting* dan seterusnya *nggak* akan selesai-selesai ini, Pak.

Jadi Ketungau itu dari Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir ini masalah, dan sumber air yang mau *ngambil* dari bukit atau dari gunung itu sangat terbatas, sangat terbatas sekali. Jadi, saya mohon izin kalau bisa jalur Ketungau ini Pak yang menuju ke perbatasan ini kan ke arah perbatasan ini. Kemudian, ada satu desa juga dekat Sungai Keli itu Pak, kemarin mengusulkan saya lupa namanya tapi di usulan saya, nanti akan sampaikan dengan Bu Dirjen nanti, Bu Dirjen ya nanti akan saya sampaikan, saya konsen di air minum.

Kemudian sumur-sumur bor ini beberapa titik itu kalau di, kemarin kan kita sudah sampaikan ABSAH, kemungkinan kita *ndak* usah lagi, kalau ABSAH masih perlu Pak, kalau di sana, karena untuk daerah-daerah yang dikelilingi perkebunan sawit itu, ABSAH itu sangat membantu Pak, seperti Pak Syarief tadi sampaikan, kalau dibor ada beberapa titik di Kalbar itu *ndak* bisa. Kalau di daerah perhuluhan cenderung bisa, Pak, ABSAH nya bisa, sumur bor juga bisa. Di sana kan hanya sedikit-sedikit penduduk Pak, Pak Menteri tau ya, jaraknya jauh-jauh. Jadi, kalau kita bangun jaringan dengan yang besar itu tidak efektif Pak, sumur bor itu efektif, sumur bor itu efektif. Saya kemarin PAMSIMAS yang modalnya cuma 200 jutaan saja seperti itu ya, programnya Cipta Karya, saya kemarin kebetulan meninjau hasilnya Bu, bersama Satker air minumnya Cipta Karya Kalimantan Barat Pak Urai kemarin, itu saya lihat dari sumur bor saja itu sudah sangat membantu masyarakat terkait soal ini. Jadi, program ini juga kita mintakan untuk kiranya bisa diteruskan.

Kemudian, jalan paralel Pak Menteri kemarin saya juga keliling ke sana ya, sekarang pelaksanaan untuk kontrak yang telah lalu sedang berjalan. Hanya memang menurut direktur pembangunan jalan waktu kami pergi ke sana, saya ajak langsung Pak Satrio waktu itu, memang masih dibutuhkan dana yang cukup besar Pak, untuk nyambung dari Balai Karangan sampai ke Badau, itu masih menurut hitungan beliau kemarin diperkirakan masih butuh dana kurang lebih 700an miliar Pak, itu baru bisa ketemu, itu menurut Pak Direktur Pembangunan Jalan, bersama-sama kami waktu itu.

Saya rasa itu saja, detail terkait hal-hal ini ya terutama air minum dengan, air minum tadi mana bagian SDA, mana bagiannya Cipta Karya nanti akan saya sampaikan dalam waktu yang dekat ini.

Saya rasa itu saja, Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan cepat, sebentar lagi sudah maghrib ya, terkait dengan usulan teman-teman kita akan lakukan rapat internal supaya kita ini *nggak* ada instruksi-instruksi lagi nanti, nanti kita rapat internal terkait dengan bagaimana pengawasan ini nanti kita lakukan.

Saya rasa itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya beri kesempatan kepada Pak Menteri atau saya tawarkan dulu ke teman-teman ini, sekarang sudah waktunya Maghrib, ya?

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Belum, 6.15 kan Maghrib.

**KETUA RAPAT:**

*Oh, masih bisa ya. Silakan, Pak Menteri, mungkin selesai kita baru break langsung kita tutup ya. Singkat saja, Pak Menteri saya persilakan.*

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Oke. Terima kasih.

**Bapak Ketua,  
Wakil Ketua,  
Ibu-Bapak Anggota DPR Komisi V yang terhormat dan saya hormati,**

Beberapa hal yang ingin kami jelaskan atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama tentang rehab dan rekon tentang bencana alam, ini karena ini merupakan kebijakan. Jadi, kebijakan nasionalnya ini kan banyak dipertanyakan tadi dari Bapak-Ibu, Bapak Suryadi yang pertama, Bu Neng Eem, dan lain-lainnya. Jadi, kalau untuk rehab dan rekonstruksi bencana alam, ada klasifikasi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kemudian relokasi. Yang ditangani oleh Kementerian PUPR adalah yang relokasi. Kalau yang berat, sedang, ringan, itu mendapat yang namanya dana bantuan yang kemarin dinaikkan 60 juta, 30 juta, dan 15 juta, itu di tangani oleh BNPB. Dan, Kementerian PUPR hanya mendampingi, makanya kami kirim insinyur-insinyur muda itu ya, oke. Untuk bisa secara *engineering* melalui kaidah-kaidah yang tahan gempa. Itu yang *policy*-nya itu.

Kemudian, yang di misalnya yang di Palu ataupun yang di Cianjur nanti siapa yang direlokasi. Itu memang keputusannya di Pemda, mengikuti arahan dari BMKG, BRIN, kemudian Badan Geologi. Beliau-beliau yang menentukan patahannya atau area merah tadi, oke. Yang merah tadi yang harus relokasi itu yang berhak menempati relokasi yang dibangun rumahnya oleh APBN, oke. Makanya di Palu juga ada tadi kriteria ini yang *nggak* berhak, karena kalau dia tidak di tempat yang merah pasti dia dapat stimulan 50 juta, pasti itu, Pak. Jadi, mungkin khawatir kalau sudah dapat 50 juta terus pindah lagi, itu kan saya. Tapi itu putusannya ada di Bapak Kepala Daerah, itu yang *policy*-nya, Bapak. Jadi, kami tidak menetapkan siapa yang berhak di situ, kami hanya membangun atas permintaan Pemda dan BNPB. Jadi, anggarannya pun kalau tidak dianggarkan oleh PU nanti akan dibayar oleh BNPB itu relokasi itu. Kalau memang masih ada waktu bisa dialokasikan oleh PU melalui rumah khusus tadi, oke. Jadi, saya kira itu *policy*-nya.

Kemudian kenapa rumah Huntap di Palu? Programnya ada 8.000 rumah yang akan dibangun. Sampai dengan Tahun 2022 ini ada 3.600 rumah yang sudah dibangun, termasuk yang sudah dibangun oleh PUPR, yang lainnya ada yang dari Bundha Suci dan lain-lain. Kenapa *kok* lambat? Karena tanahnya oleh pemda ini yang, Bapak pasti lebih tahu di daerah. Kami punya Dr. Hari sebagai ketua Satgasnya di sana yang selalu dengan Bapak Gubernur dan Walikota di Palu. Kalau itu sudah ditetapkan oleh kepala daerah pasti akan kita bangun. Yang dibangun oleh PU selain Huntap itu adalah fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jembatan kalau yang di Palu, jembatan pengaman pantai, sekolahan, rumah sakit, kantor BPKP, kantor polisi, rusun polisi, kantor kejati, termasuk yang di Clanjur itu kan polres, polsek yang rusak. Tidak ada kriteria harus negeri, siapa yang menetapkan harus negeri, tidak ada itu. Semua berhak mendapatkan penanganan dari APBN dan itu kami kerjakan. Kami dapat baru kemarin dapat laporan segini, Bu, verifikasinya dari Cipta Karya. Yang ditangani oleh verifikasi staf Cipta Karya itu kami hanya membantu teknis verifikasinya, SK-nya pasti Bupati, bukan Dirjen Cipta Karya apalagi bukan Menteri PU. SK-nya bupati mungkin ada kapolres, kajati, semua mungkin di situ ada, karena itu sangat-sangat apa ya, Bu, riskan untuk verifikasi masuk di dalam pendataan itu.

Jadi yang ditangani oleh kita, Bu, saya bilang kita karena pasti ada Komisi V-nya, itu adalah yang relokasi dan fasilitas umum, kantor DPRD itu kan APBN yang nangani, ya. Kemudian, perumahan yang di belakang korem yang juga rusak itu kita tangani, karena koremnya akan ditangani oleh Mabes AD sendiri, TNI sendiri, tapi perumahan yang di belakangnya akan kita tangani. Kemudian, sekolah SMP 1 yang mau roboh itu, kita akan robohkan. Pompes-pompes, masjid, itu kita tangani, masjid apa ada yang negeri? Kan *nggak* ada masjid negeri, jadi tetap kita tangani, Bu, *nggak* ada kriteria lembaga negeri, hanya yang negeri yang ditangani, semua Pompes kita tangani termasuk rusun-rusun Pompes kan *nggak* ada yang, *nggak* ada kriteria Pompes Negeri, yang penting ada santri yang lebih dari 500, ada yang 700, yang 1.000 kita tangani. Jadi, *nggak* ada, Bu, itu pasti *hoax gitu* ya, Bu. Kemudian, itu saya untuk rehab rekon.

Kalau yang hal-hal khusus yang kami ingin sepakati di sini, misalnya PSPS, kemudian MCK untuk sekolah santri yang tidak *boarding*, kemudian PAMSIMAS untuk gratifikasi, ABSAH, ini kan hal-hal yang harus fleksible tadi, itu hanya harga HVS. Saya setuju, bukan saya setuju, kami kalau bisa kita setuju tapi itu tidak generalisir, tidak bisa digeneralisir. Kan, kalau apanya, mata air kami tugaskan pada Cipta Karya, namanya proyek air minum itu di daerah yang langka air, bukan yang di daerah banyak air. Mungkin 14 kilo, 10 kilo kan harganya akan lain dari kalau yang cuma 5 kilo. Ini kan hanya *as a matter of* harga satuan. Jadi, tapi kalau dari programnya teman-teman kan hanya untuk *programming* 400 juta per desa. Tapi harus dilihat juga desa-desa itu karakteristiknya, misalnya di Gunung Kidul mungkin lain dengan yang di Pacitan, karena memang sumber airnya jauh. Saya kira saya sangat apa, sepakat apabila Bapak-Bapak membutuhkan ABSAH, di daerah lain butuh tapi tidak berarti semua harus “Oh, kami juga pengen ABSAH”, saya kira sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kita harus sepakati. Saya kira itu, Bu.

Misalnya BSPS, tadi Bapak Wakil Ketua bilang, di Papua pegunungan itu 40 juta, Bu. Jadi kalau di Talaud mungkin kalau angkutan saja 20 juta, masa tetap 20 juta. Jadi saya kira kita harus saling mengerti, tapi tidak semua langsung “kami juga minta naik”, ya jangan *gitu*, ini *toh* uang negara. Kalau sepakat itu kita saya kira lebih enak hidup ini kan, Bu. Di Pati misalnya minta naik 50 juta ya *nggak iso*, ya Pak, ya. Jadi, Talaud juga merasa, coba lalu angkat-mengangkat material dari Manado ke Malalayang ke Talaud itu 20 juta harga rumah 20 juta, *wong* di Papua 40 juta. Tapi, jangan semua terus nanti minta naik “Oh, sana naik”, kita jebol semua ini nanti APBN kita. Saya kira itu Bapak-Ibu, saya kira Bapak-Ibu sekalian, juga bertanggung jawab atas pengeluaran uang negara ini. Jadi saya kira itu, rehab rekon, Huntap di Palu, hal-hal yan serius tadi.

Kalau yang Bu Novi, banjir Jateng saya kira kami sudah menjelajahi semua apa Kali Pelumbon, Kali Beringin, kemudian Seringin, sampai ke Jati, SBD 1, SBD 2, hafal, Pak, sudah punya program, sudah saya laporkan kepada Pak Dewo, jadi itu sudah kita tangani, Bu, terima kasih.

Bu Athari, saya kira kalau datanya memang kami sebetulnya untuk menanganai PKE itu hanya, karena komandonya di Menko PMK, memakai data BKKBN. Tapi, kalau memang kalau yang di daerah Dapil Sumatera Barat ada 400 unit PKE tapi yang *eligible* hanya 250-an, yang selebihnya memang tidak *eligible*. Ini bisa kita verifikasi, memang harus ada verifikasinya di lapangan. Data ini memang tadi di Sentul juga diperdebatkan tentang data, bahkan data dari BPS dengan data dengan Menkes itu lagi. Jadi, ini saya kira kita cari data yang memang hampir sesuai dengan lapangannya.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, Pimpinan, izin.

**KETUA RAPAT:**

Sudahlah cukuplah, maghrib, nanti aja kita perpanjang besok.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Jadi, saya ingin nyampaikan sama Pimpinan, berbicara soal BSPS berarti dengan Dirjen Perumahan saja ya.

**KETUA RAPAT:**

Ya, dengan Dirjen Perumahan saja nanti kita ya.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Tapi setengah menit saja karena ini amal ibadah, Pimpinan



**KETUA RAPAT:**

Sudah mau ibadah ini.

**F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Waktu saya dengan Pak Roberth Rouw di Maluku, itu memang ada kondisi yang sangat memprihatinkan Pak, bekas konflik di tahun 90-an. Pada saat itu, itu masih ada puluhan KK mungkin ratusan KK yang tidak bertuan, Pak. Tidak punya rumah, rumahnya sederhana sekali, sangat tidak layak huni, infrastrukturnya tidak ada, SANIMAS-nya tidak ada. Dan ini memang diminta sekali oleh Gubernur Maluku. Pak, ini kesempatan saya sampaikan kepada Pak Menteri PUPR.

**KETUA RAPAT:**

Baik, setuju Pak. Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Terima kasih, Bapak. Saya kita itu, Bapak, yang saya bisa sampaikan *policy-policy* yang tadi dipertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

**F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):**

Izin, Pak Menteri, Sungai Rambut.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Sungai Rambut, nanti Pak Dirjen kan ada RDP-nya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke sudah cukuplah, maghrib ini maghrib. Baik,

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Pak, Pak Ketua, izin, permintaan.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Oh, tadi yang jembatan, bukan pindah lokasi, Bu, tapi antara FS dengan detail desain beda.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Oh, yang itu.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Iya, yang Ibu tadi ada “kok kenapa pindah lokasi?”, Ternyata tidak pindah lokasi tapi karena antara FS dan detail desainnya beda, sekarang sedang di-*review*.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

*Nggih*, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, cukup ya?

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Belum, bukan itu, Pak, saya mau minta ke Pak Dirjen Sumber Daya Air. Saya mohon memerintahkan kepada Balai, mungkin suatu saat pergi dengan saya ke Tulungagung di Kecamatan Sendang, karena di Kecamatan Sendang itu banyak orang yang difabel mungkin karena salah satu faktornya adalah air. *Nah*, oleh karena itu mungkin suatu saat perlu mengambil sampelnya itu, Pak. Karena 200 itu cukup besar satu kecamatan Pak, saya ke sana kemarin. Itu yang pertama.

Yang kedua, Bu Cipta Karya, kemarin Borobudur itu kan yang bangun PUPR *nggih*, Pak, *nggih*. Saya mohon dengan hormat yang difabel juga mendapat perhatian, karena kalau naik itu, kalau pakai kursi roda *nggak* bisa termasuk di Prambanan juga demikian, karena itu kan wisata untuk semuanya begitu ya.

Terima kasih, Pimpinan.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Ibu, kalau kami tidak menyentuh candinya, itu *heritage*.

**F-PDIP (SRI RAHAYU):**

Bukan candi, Pak, jalannya.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

*Oh*, kalau jalan oke.  
Oke, oke, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya fasilitas, fasilitas umumnya. Cukup ya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita langsung ke kesimpulan, nanti kita dalam dengan dirjen, masing-masing dirjen nanti kita ketemy lagi ya. Saya aja nanti ngirimnya sama dirjen aja. Oke,

**F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Tapi Pak Ketua, kalau sama dirjen jangan dibatesin.

**KETUA RAPAT:**

Ya nanti *nggak* dibatesin, saya *nggak* akan batasin.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Sebentar, kalau sama Dirjen justru saya batasin, saya kan curiga apa ini.

**KETUA RAPAT:**

Jangan dibatesin.

**F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

*Nggak*, Pak Dirjen, damai-damai.

**KETUA RAPAT:**

Baik kesimpulan, saya di kesimpulan saya masukin juga ini, ayo silakan. Poin pertama draf kesimpulan, mudah-mudahan ini tidak melewati maghrib kita ya, ini berat urusannya kalau melewati maghrib. Udah lewat belum? Oke, baik.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI Dengan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat PUPR, Selasa, 17 Januari 2023.

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR dalam APBN Tahun 2022
  - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:  
Realiasi Keuangan Tahun 2022 93,7% dan Realiasi Fisik Tahun 2022, 96,2%
  - b. Terhadap program atau kegiatan di Tahun 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan Tahun 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat pendataan, untuk:

- a. Mempercepat pendataan dan perbaikan infrastruktur yang rusak pasca bencana alam,
  - b. Meningkatkan sistem *monitoring*, evaluasi, dan koordinasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan Anggaran Tahun 2023
  - c. Mempercepat realisasi program infrastruktur berbasis masyarakat
  - d. Mengutamakan produk dalam negeri pada pembangunan infrastruktur
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Ini penekanannya terkait dengan kewenangan pemerintah pusat untuk mengintervensi persoalan daerah, karena sebagian besar Komisi V, sudah mengirim usulan kepada Kementerian PUPR, namun belum bisa ditanggapi karena Inpresnya belum selesai, itu menurut keterangan Pak Dirjen Bina Marga. Kemudian yang ke.

4. Terkait dengan pengawasan terhadap program dan anggaran Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI akan melaksanakan rapat internal untuk menentukan tindak lanjutnya

Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, gak perlu kita bahas di sini, nanti kita bahas di RDP, saya tanya dulu, bukan RDP maksudnya rapat internal.

Saya tanya dulu, teman-teman Komisi V, cocok? Cocok? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Pemerintah?

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Pak, nomor 3, kami mohon dukungan Komisi V, kami baru *ngecek* tadi proses Inpres tadi, karena dari kementerian, dari Sekneg sudah dikirim ke Bappenas. Bappenas sudah kami cek menunggu konfirmasi dari Menteri Keuangan tentang alokasi anggarannya. Jadi, kalau Bapak-Bapak dari Komisi V ada bisa mendorong dari Badan Anggaran misalnya saya *nggak* tahu jalurnya. Kami nanti akan coba dengan Menteri Bappenas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kesimpulan rapatnya begini cukup *nggak*, Pak?

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Setuju, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Baik Bapak-Ibu sekalian, dengan selesainya kesimpulan rapat ini maka selesai rapat kita pada hari ini. Mohon maaf, manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, mohon izin Pak Menteri, menyampaikan kata-kata penutup.

**MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR yang terhormat dan kami hormati, atas segala kritikan kerasnya akan menjadi, *eh*, apa, pacuan bagi kami untuk memperbaiki ke depan, terutama tentang BPJ tadi. Saya kira ini didengarkan oleh semua, jadi saya kira menjadi obat bagi kami untuk lebih tertib lagi ke depan, untuk lebih baik lagi di depan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Menteri, kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan (suara kurang jelas) rapat pada hari ini, mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam rapat ini berjalan.

Mohon izin Pak Menteri, nanti saya nitip ini dengan Pak Dirjen Sumber Daya Air ya, kalau Dirjen Cipta Karya *nyusul* nanti Bu, mohon izin ya. Makasih, saya akhiri rapat ini dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat Malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB)**

**JAKARTA, 17 Januari 2023**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**

**NIP. 196912021998032002**